



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PANDANGAN HAMAS TERHADAP  
PERJANJIAN OSLO I DAN II (1993-1996)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana**

**SALMAN FARIDZ**

**0606087946**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA**

**PROGRAM STUDI ARAB**

**DEPOK**

**JUNI 2011**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

**Depok, 21 Juni 2011**



**Salman Faridz**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Salman faridz**

**NPM : 0606087946**

**Tanda Tangan : .....**

**Tanggal : 21 Juni 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh  
nama : Salman Faridz  
NPM : 0606087946  
Program Studi : Arab  
Judul : Pandangan Hamas Terhadap Perjanjian Oslo I dan II (1993-1996)

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Arab, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

## DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Yon Machmudi Ph.D.

()

Penguji 1 : Juhdi Syarif S.S., M.Hum.

()

Penguji 2 : Drs. Suranta M.Hum.

(a/n Dr. Afdol Tharik Wastono S.S., M.Hum)

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 21 Juni 2011

oleh



Dr. Bambang Wibawarta  
NIP 196510231990031002

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan restu-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Suka duka yang disertai semangat dan doa hanyalah usaha dari saya. Semua kembali lagi kepada-Nya dan saya sangat bersyukur atas karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada saya. Skripsi ini diselesaikan untuk meraih gelar Sarjana Humaniora di Program Studi Arab. Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dukungan doa, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta yang tanpa henti memberikan bantuan dalam bentuk apapun. Terima kasih untuk mama dan papa yang terus memberikan semangat ketika saya menemui kesulitan selama kuliah. Saya sangat beruntung memiliki mereka karena tidak ada cinta yang lebih besar dari cinta orangtua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kakak saya, Nisa Istiani dan Mas Philly, Winna Andini Handayani dan Kak Ian, serta si kecil yang jenius, El, kamu harus seperti Om, masuk UI, ya! Saya juga ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya, atas doa dan dukungannya.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fauzan, pembimbing akademik saya yang lama, dosen yang memberikan saya semangat dalam menghadapi hidup. Terima kasih kepada Bapak Yon yang telah membimbing saya selama mengerjakan skripsi. Bapak Yon tidak hanya menjadi dosen yang mengenalkan saya kepada dunia Timur Tengah, tetapi juga penyemangat dengan segala nasehat dan bantuan selama mengerjakan tugas akhir saya tersebut.

Terima kasih kepada semua dosen Program Studi Arab, Ibu Wiwin, Ibu Ema, Ibu Ade, Bapak Apip, Bapak Suranta, Bapak Juhdi, Bapak Maman, Bapak Basuni, Bapak Fauzan, Bapak Letmiros, Bapak Aselih, Bapak Minal, Bapak Muta'ali. Terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan kepada saya selama kuliah.

Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat di kampus atas persahabatan yang terjalin selama kuliah, kehangatan seperti keluarga, perhatian serta dukungannya selama ini. Terima kasih kepada rekan seperjuangan selama

skripsi, Aliah, Zulham, Tiko, Adi, Yahya. terima kasih juga kepada sahabat Sastra Arab 06 lainnya yang sudah terlebih dahulu menjadi sarjana, kebersamaan selama kuliah bersama kalian memberikan suatu kebahagiaan yang tak terkira dan sulit dilupakan dan semoga kita bisa berkumpul kembali suatu saat nanti. Zikri, Gigih, Mardi, Hendi, Didit, Sugiho, Ragil, Khaidir, Zulham, Adi, Dimas, Tara, Aliah, Putri, semua angkatan Arab 2006 (maaf tidak bisa disebutkan satu-satu) sukses selalu. Dan untuk keluarga besar IKABA terima kasih atas kebersamaannya selama ini.

Saya juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada keluarga besar SASTRA FC yang telah memberikan saya pengalaman dalam berorganisasi dan memberikan saya kesempatan berprestasi melalui hobi saya sepak bola, semoga SASTRA FC akan selalu maju dan selalu juara di Tingkat UI maupun di luar UI. Banyak pelajaran yang saya dapat ketika bersama SASTRA FC. Untuk Primavera (Popon, Hary, Ucok, Rizki, Ridho, Tomi, Aad, Tiko, Mare, Adi, dan primavera lainnya kapan nih latihan pagi terus kita makan bubur kacang ijo). SASTRA FC bukan sebuah organisasi sepak bola biasa tapi sebuah keluarga, salam olahraga.

Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat saya di kontrakan Rumah Kardus (Hary, Ucok, Rizki, Adin, Kari, Ableh, Garit, Jekjon, Cimenk, Swara, Popon, Teli, Awank), kontrakan kukel (Catra, Ridwan, Dimas, Panji, Cemen, Adi, Ochan, Samsu, Nyibo, Dipta), dan sahabat kontrakan Kutek (Kons Babeh) yang turut membantu, Rikos (salam buat Tyas, David, Tiko, Anes, Aad, Carlos). Keberadaan kalian memberikan kehidupan saya menjadi penuh warna, kalian bukan sekedar sahabat tetapi keluarga.

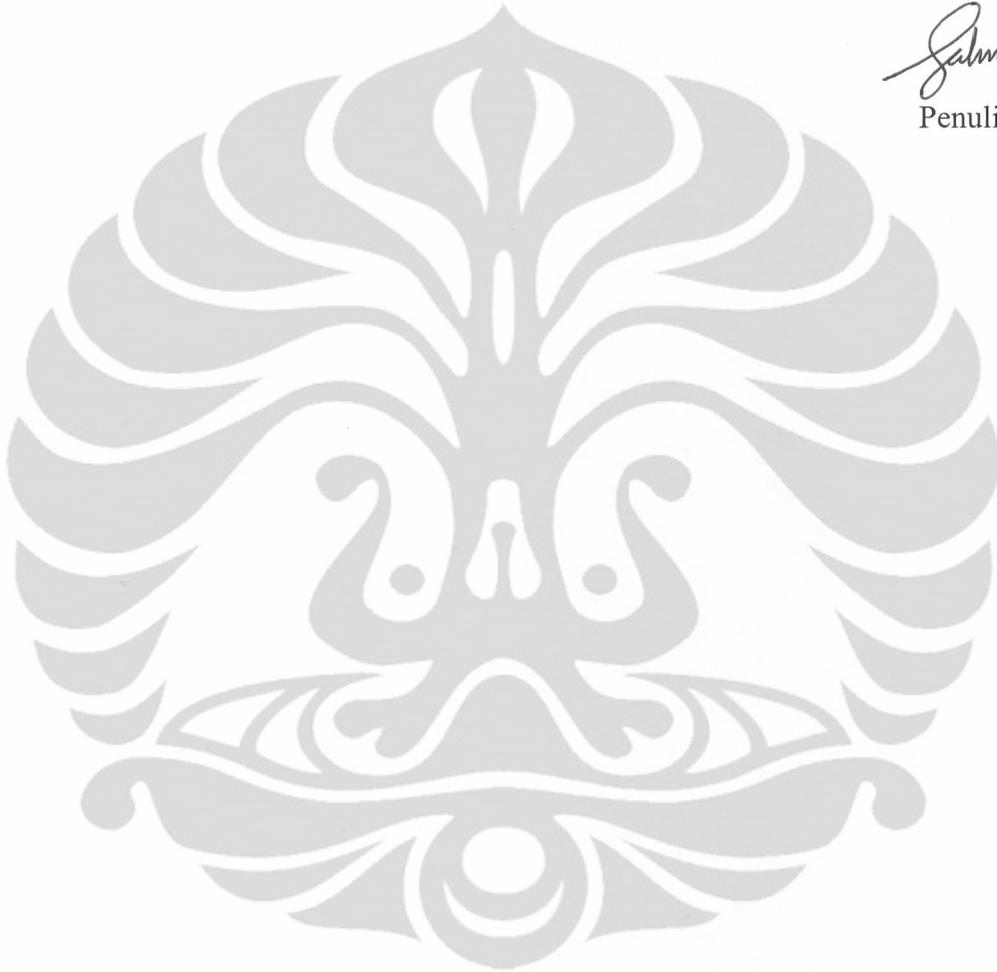
Teman-teman seperjuangan FIB 2006 ayo semangat kita pasti bisa lulus menjadi sarjana dengan gelar S.Hum.

Saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang spesial bagi saya Mutia Fadlina yang telah memberikan semangat, nasehat, dan dorongannya sehingga saya dapat terus maju untuk menyelesaikan skripsi saya. Tidak lelah-lelahnya menemani saya saat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi (senyumanmu selalu membuat saya semangat..hehe)

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 21 Juni 2011

  
Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salman Faridz  
NPM : 0606087946  
Program Studi : Arab  
Departemen : Sejarah  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pandangan Hamas Terhadap Perjanjian Oslo I dan II (1993-1996)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 21 Juni 2011

Yang menyatakan,



(Salman Faridz)

## ABSTRAK

Nama : Salman Faridz  
Program Studi : Arab  
Judul : Pandangan Hamas Terhadap Perjanjian Oslo I dan II (1993-1996)

Skripsi ini membahas tentang perundingan damai antara Israel-Palestina yaitu Perjanjian Oslo I dan II. Perjanjian Oslo I ditandatangani di Washington D. C pada tanggal 13 September 1993 sedangkan Perjanjian Oslo II pada tahun 1995. Kedua perjanjian ini secara garis besar membahas tentang pemberian pemerintahan otonomi Palestina, penarikan mundur tentara Israel dari Jalur Gaza dan Tepi Barat, mengadakan pemilu untuk memilih para dewan serta pemulangan para pengungsi Palestina. Sepintas perjanjian Oslo ini merupakan suatu terobosan bagi perdamaian di Timur Tengah, akan tetapi perjanjian ini mendapat kecaman dan penolakan dari salah satu gerakan garis keras di Palestina yaitu Hamas.

Kata Kunci  
Oslo, Hamas, dan konflik

## ABSTRACT

Name : Salman Faridz  
Program Study: Arab  
Title : Hamas's respond to Oslo I and Oslo II Agreement (1993-1996)

This study discusses Hamas's respond to the peace agreement between Israel-Palestine as stated in Oslo Agreement I and II. Oslo I Agreement signed in Washington DC on 13 September 1993 while Oslo II on 1995. Both agreement mainly discuss on the granted right to establish Palestinian Self-Government Authority, the withdrawal of Israeli forces from parts of the Gaza Strip and West Bank, the election to elect Palestine's council, and the right to return of Palestina's refugees. In brief, the Oslo Agreement demonstrate a peace agreement breakthrough in Middle East, however the agreement get strong resistant from Hamas, one of the strong movement in Palestine.

Key words:  
Oslo, Hamas, and Conflict

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Tinjauan Pustaka.....	7
1.5 Ruang Lingkup penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	9
<b>2. LANDASAN TEORI</b> .....	11
2.1 Pengertian dari Konflik.....	11
2.2 Faktor-faktor Penyebab Konflik.....	13
2.3 Jenis-jenis Konflik.....	15
2.4 Penyelesaian sebuah Konflik.....	16
<b>3. PROSES PERJANJIAN OSLO</b> .....	22
3.1 Latar Belakang Terbentuknya Kesepakatan Oslo I.....	22
3.2 Proses Terbentuknya Kesepakatan Oslo I.....	24
3.2.1 Isi dari Perjanjian Oslo I (1993).....	28
3.2.2 Tokoh-tokoh yang Berperan di Balik Alternatif Gaza-Jericho.....	33
3.3 Perundingan-Perundingan setelah Kesepakatan Oslo I....	40
3.3.1 Perundingan Kairo.....	40
3.3.2 Perundingan Oslo II.....	44
3.3.3 Peristiwa Kematian Yizhaq Rabin setelah Kesepakatan Oslo II.....	47
3.4 Dampak bagi Masyarakat di Palestina serta Peristiwa yang Terjadi setelah Kesepakatan Oslo I dan II.....	49
3.5 Gerakan-gerakan Garis Keras yang Menolak Kesepakatan Oslo I dan II.....	51
3.5.1 Di Luar Palestina.....	51
3.5.2 Di Dalam Palestina.....	53

<b>4. SIKAP HAMAS TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN ISRAEL-PALESTINA.....</b>	<b>54</b>
4.1 Struktur Organisasi Hamas.....	54
4.2 Cita-cita dan Tujuan Hamas.....	61
4.3 Sikap Hamas terhadap Perjanjian Oslo.....	63
4.4 Langkah-langkah Hamas dalam Menolak Perjanjian Oslo I dan II.....	68
4.3.1 Melakukan Intifadhah.....	68
4.3.2 Menolak Mengikuti Pemilu 1996.....	70
<b>5. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	76
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN 1</b>	
<b>LAMPIRAN 2</b>	
<b>LAMPIRAN 3</b>	
<b>LAMPIRAN 4</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Hasil Pemilu Legislatif tahun 1996.....	81
------------	---	----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Konflik Palestina-Israel yang berkepanjangan (*protracted conflict*) masih menyita perhatian dunia internasional dan masih menjadi agenda bagi terciptanya perdamaian di Timur Tengah. Secara historis, peperangan ini dikarenakan oleh keinginan bangsa Yahudi untuk mendirikan sebuah negara di atas tanah Palestina. Hal ini dilakukan salah satunya dengan cara memperluas wilayah bangsa Yahudi di tanah Palestina serta dengan menguasai seluruh sumber-sumber daya alamnya. Dalam penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel ini, sudah banyak dilakukan proses perdamaian melalui diplomasi dan perundingan yang diprakarsai baik oleh negara-negara Timur Tengah, Amerika, dan Eropa, yaitu Camp David (1979), Perjanjian Oslo I (13 September 1993), Perjanjian Kairo (1994), Perjanjian Oslo II (28 September 1995), kesepakatan Hebron (1997), Wye River Agreement (1998), Sharm el-Sheikh di Mesir (1999), Camp David II (2000), hingga Konsep Peta Jalan Damai (*Road Map*).<sup>1</sup>

Dalam rangka memecahkan masalah Palestina-Israel, Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab khusus, dikarenakan kerasnya konflik Palestina-Israel yang merupakan ancaman bagi keamanan dan stabilitas di kawasan Timur Tengah dan bagi perdamaian dunia, sehingga dengan demikian menuntut keterlibatan Dewan Keamanan PBB.

Akan tetapi, proses perdamaian yang telah diprakarsai oleh negara-negara Timur Tengah, Amerika, Eropa bahkan Dewan Keamanan PBB tersebut tidak dapat menjadikan konflik Palestina-Israel dapat terselesaikan. Ini dikarenakan hasil dari perundingan-perundingan yang sudah dilakukan, banyak merugikan negara Palestina. Selain itu, secara implementasinya Israel sering melanggar kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada dalam perundingan-perundingan yang sudah berlangsung. Salah

---

<sup>1</sup> Tesis Masyrofah. *Peranan PLO Dalam Proses Perdamaian Israel-Palestina (Studi Tentang Perjanjian Damai Oslo I & II)*. Jakarta: Universitas Indonesia, hal.1.

satunya adalah Perjanjian Oslo I (13 September 1993) dan Perjanjian Oslo II (28 September 1995).

Perjanjian Oslo I merupakan kesepakatan yang didalamnya berisi kesepakatan dalam bentuk Deklarasi Prinsip Prinsip (*Declaration of Principles*)<sup>2</sup> yang dicapai PLO dan Israel dalam perundingan rahasia di Oslo, Norwegia 20 Agustus 1993 dan ditandatangani oleh Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin di Washington DC bukan di Oslo 13 September 1993 dengan disaksikan oleh Presiden Bill Clinton.<sup>3</sup> Peristiwa bersejarah ini juga merupakan pertama kalinya mempertemukan dua pemimpin yang sebelumnya saling bermusuhan tersebut.

Perjanjian ini oleh banyak kalangan dianggap sebagai terobosan sejarah perdamaian di Timur-Tengah dan diharapkan bisa menyelesaikan konflik Palestina-Israel yang sudah berjalan 50 tahun. Perjanjian Oslo I ini mengenai pemerintahan otonomi Palestina di jalur Gaza dan Jericho (sebuah kota di Tepi Barat Sungai Yordan)<sup>4</sup>, merupakan “Terobosan Bersejarah” bagi Timur Tengah serta penarikan mundur pasukan militer Israel dari jalur Gaza dan Tepi Barat. Akan tetapi, pada kenyataannya, sampai tahun 1993 kedua wilayah tersebut itu tetap berada di bawah kekuasaan Israel.<sup>5</sup> Akan tetapi, walaupun perjanjian ini diharapkan bisa menyelesaikan konflik Palestina-Israel, ternyata ada beberapa organisasi garis keras di Palestina, yaitu Hamas dan Jihad Islam yang secara tegas penolakannya terhadap Perjanjian Oslo I tersebut. Kemudian Perjanjian Oslo I ini salah satu isinya adalah untuk mengadakan pemilu pada tahun 1996 dan salah satu yang tidak mengikuti pemilu pada tahun 1996 adalah Hamas.

Hamas merupakan singkatan dari *Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah*, yang dalam bahasa Indonesia berarti Gerakan Islam Perlawanan atau dikenal juga

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal.8.

<sup>3</sup> Dr. Muhammad Luthfi Zuhdi. *Menyelesaikan Konflik Palestina*. Koran Republika, 14 Mei 2008

<sup>4</sup> Tesis Masyrofah, *Peranan PLO Dalam Proses Perdamaian Israel-Palestina (Studi Tentang Perjanjian Damai Oslo I & II)*. Jakarta: Universitas Indonesia, hal.6.

<sup>5</sup> *Ibid.*,hal.89.

dengan nama *Islamic Resistance Movement* didirikan oleh Syaikh Ahmad Yassin setelah terjadinya Intifadah meletus atau sekitar Desember 1987. Pendirian Hamas kemudian segera disusul dengan ditetapkannya Piagam Hamas sebagai anggaran dasar negara ini.<sup>6</sup>

Ikhwanul Muslimin (Al-Ikhwān Al-Muslimīn) sering kali dipandang sebagai cikal bakal lahirnya berbagai gerakan Islam politik, khususnya di kawasan Timur Tengah. Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan bin Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna (Hasan Al-Banna) di Islamiyah, Mesir, pada 1928. Ikhwanul Muslimin merupakan jamaah yang religius dan filantropis, yang bertujuan menyebarkan moral Islam dan amal baik.

Kemudian antara tahun 1981-1987, ketika merasa kader-kader yang dibinanya sudah cukup siap untuk bergerak kembali di medan perjuangan politik dan militer menghadapi Israel, Ikhwanul Muslimin Palestina, melalui tangan salah satu tokohnya yang sangat brilian, Syekh Ahmad Yasin, berinisiatif mendirikan kembali sayap militer. Sekitar tahun 1982, didirikan “Mujahidin Palestina” (Mujahidun Filisthiniyyun) Jalur Gaza yang dipersiapkan sebagai jembatan untuk kembali mentransformasikan gerakan Ikhwanul Muslimin dari gerakan sosial dan pendidikan ke gerakan militer dan politik.

Pada 8 Desember 1987, meletus pemberontakan rakyat yang dikenal dengan perlawanan *Intifadhah*. Munculnya pemberontakan ini sangat besar kemungkinan karena kekecewaan rakyat terhadap upaya-upaya resmi yang dilakukan oleh PLO. *Intifadhah* yang dalam bahasa Arab berarti perlawanan, adalah nama untuk perjuangan yang dilakukan oleh sekelompok orang Palestina yang bersenjatakan batu-batu melawan Israel yang bersenjatakan senapan paling canggih, roket dan rudal. Intifadhah muncul pertama kali dipicu oleh pembunuhan enam orang anak-anak Palestina secara biadab oleh tentara Israel. Untuk membalas kekejian itu, para

---

<sup>6</sup> Bawono Kumoro. *Hamas: Ikon Perlawanan Islam Terhadap Zionisme Israel*. Mizan : Bandung, 2009, hal 78.

pemuda Palestina yang bersenjatakan batu-batu melakukan perlawanan langsung terhadap tentara-tentara Israel.

Para pemuda yang melakukan perlawanan itu sebagian besar adalah anak-anak muda yang dididik oleh Syekh Ahmad Yasin. Tindakan yang mereka lakukan tidak lepas dari dukungan yang diberikan Yasin. Maka dari itu, agar pasukan-pasukan intifadhah terorganisir dengan baik, pada 14 Desember 1987 Syekh Ahmah Yasin mendeklarasikan berdirinya Harakah Muqawamah Al-Islamiyyah ( Hamas ) yang dalam bahasa Indonesia berarti Gerakan Islam Perlawanan. Inilah tanggal berdirinya HAMAS, sebuah tanggal yang menandai munculnya fase baru perjuangan Ikhwanul Muslimin, pada khususnya, dan rakyat Palestina, pada umumnya.

Dalam pasal 2 Piagam Hamas disebutkan bahwa Hamas merupakan salah satu sayap dari gerakan Ikhwanul Muslimin. Karena itu, Hamas secara terbuka mencantumkan Islam sebagai asas utama perjuangan mereka. Meskipun demikian, Hamas tetap mengakui nasionalisme. Hanya saja, sebagaimana tertera pada pasal 12, Hamas memandang nasionalisme sebagai bagian dari keyakinan yang antara lain harus diwujudkan dalam bentuk jihad melawan siapa pun yang menduduki dan menjajah tanah air kaum Muslim.<sup>7</sup>

Cita-cita dan tujuan Hamas secara lengkap tertulis di dalam Piagam Hamas tahun 1988. Pada dasarnya, cita-cita dan tujuan Hamas tidak dapat dipisahkan dari perjuangan Ikhwanul Muslimin secara keseluruhan, yaitu mewujudkan kekuasaan Islam diseluruh dunia. Dalam konteks Palestina mungkin saja cita-cita dan tujuannya lebih bersifat lokal, yakni untuk membebaskan Palestina dari cengkeraman hegemoni Israel.

Salah satu yang menjadi alasan Hamas menolak perundingan Oslo I dan II adalah bertentangan dengan Piagam Hamas. Karena dalam satu pasalnya yang terdapat dalam Piagam Hamas yaitu Pasal 13 Piagam Hamas mengenai usaha perdamaian, prakarsa dan muktamar internasional yang isinya adalah berbagai

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal.80.

prakarsa dan apa yang disebut sebagai penyelesaian serta muktamar-muktamar (konfrensi/kongres) internasional yang diadakan untuk menyelesaikan masalah Palestina. Mengurangi sebagian Palestina sama dengan mengurangi sebagian dari agama (Islam) sebab patriotisme Hamas merupakan bagian dari agamanya. Atas dasar inilah para kadernya dibina. Jihad yang mereka lakukan di atas tanah air mereka adalah demi menegakkan panji Allah.<sup>8</sup>

Dengan demikian, Hamas secara tegas tidak menyetujui hasil dari setiap perundingan atau muktamar, khususnya Perjanjian Oslo I dan II yang tujuannya untuk penyelesaian konflik Palestina-Israel. Hamas tidak melihat muktamar-muktamar itu akan dapat mewujudkan beberapa tuntutan atau mengembalikan hak-hak yang telah hilang atau memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas. Tidak ada alternatif bagi penyelesaian masalah Palestina, kecuali dengan jihad. Semua prakarsa dan muktamar internasional hanyalah membuang-buang waktu dan sia-sia.

Akan tetapi, pada pertengahan Oktober tahun 1993, kelompok oposisi Yasser Arafat sempat membentuk Front Nasional Demokrasi Islam yang menghimpun berbagai faksi oposan Yasser Arafat baik di luar negeri maupun di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Mereka sempat pula mengeluarkan deklarasi bersama, yakni akan terus berupaya menggagalkan kesepakatan damai Israel-PLO dan memboikot Pemilu Palestina. Namun kabar yang bererdar front tersebut terus susut dan akhirnya tenggelam.<sup>9</sup>

Beberapa alternatif pilihan sempat menjadi pertimbangan sebagian kelompok oposan Yasser Arafat. Antara lain, akan ikut serta dalam Pemilu tanpa harus turut menjadi anggota dalam lembaga legislatif hasil Pemilu itu. Sikap ini pernah

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal.183.

<sup>9</sup> “*Tips dari liputan pemilu Palestina (2)*”, diakses tanggal 25 Juli 2010 dalam <http://www.journalist-adventure.com/?p=97>

disampaikan oleh pemimpin spritual Hamas, Ahmad Yasin, yang mengisyaratkan kemungkinan Hamas ikut serta dalam Pemilu tanpa harus terikat dengan kesepakatan damai Israel-PLO.<sup>10</sup>

## 1.2 Perumusan Masalah

Skripsi ini akan memaparkan bagaimana proses hingga terbentuknya Perjanjian Oslo I dan Perjanjian Oslo II terbentuk serta dampak dan pandangan atau sikap Hamas terhadap Perjanjian Oslo I dan Perjanjian Oslo II. Dari pemaparan tersebut, ada permasalahan yang ingin penulis angkat dalam skripsi ini dan penulis rumuskan kedalam bentuk pertanyaan.

1. Bagaimana latar, aktor, proses terbentuknya Perjanjian Oslo I dan II hasil dari perjanjian tersebut?
2. Apa dampak yang terjadi setelah Perjanjian Oslo I dan II di tandatangani bagi masyarakat Palestina sampai pemilu 1996?
3. Mengapa Hamas menolak Perundingan Oslo I dan II?
4. Apa yang melatarbelakangi Hamas untuk tidak mengikuti Pemilu 1996?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah.

1. Memaparkan proses, latar, aktor, hasil dan dampak dari Perjanjian Oslo I dan II yang dilakukan oleh PLO dan Israel bagi masyarakat Palestina.
2. Memaparkan pandangan dan sikap yang diambil kelompok garis keras Hamas pasca penandatanganan Perjanjian Oslo I dan II.

---

<sup>10</sup>Musthafa Abd Rahman., *Jejak-Jejak Juang Palestina : Dari Oslo hingga Intifadah Al-Aqsa*. Jakarta : Kompas,2002 hal. 66.

#### 1.4 Tinjauan Pustaka

Ada dua karya ilmiah berupa tesis karangan Masyrofah yang berjudul “*Peranan PLO dalam Proses Perdamaian Israel-Palestina (Studi Tentang Perjanjian Damai Oslo I dan Oslo II)*” dan karangan Saud P.Krisnawan yang berjudul “*Peran Hamas dalam Proses Perdamaian Israel-Palestina (1993-1998)*”.

Pada tesis masyrofah yang berjudul “*Peranan PLO dalam Proses Perdamaian Israel-Palestina (Studi tentang Perjanjian Damai Oslo I dan Oslo II)*” membahas tentang peranan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dalam proses perundingan damai Israel-Palestina yang kemudian menghasilkan Kesepakatan Oslo I tahun 1993 dan Kesepakatan Oslo II tahun 1995. Dalam penelitian ini lebih mengkhususkan pada masa awal proses perjanjian Oslo I dan Perjanjian Oslo II. Kemudian pembahasan dalam tesis ini membahas bagaimana peranan PLO melalui jalur diplomasi aktif dalam Perjanjian Oslo I dan II, faktor- faktor yang mendorong Israel dan Palestina menyetujui hasil Kesepakatan Oslo, dan kendala-kendala yang akan mempengaruhi proses perundingan damai tersebut. Kurun waktu dalam tesis ini yaitu pada awal tahun 1991 sampai tahun 1995. Selama kurun waktu 1991 hingga 1995, dimana terjadi penandatanganan Kesepakatan Oslo I pada 13 September 1993. Kemudian dilanjutkan Kesepakatan Kairo pada 4 Mei 1994 dan Kesepakatan Oslo pada 28 September 1995. Ketiga perjanjian itu dapat terlaksana dalam kurun waktu hanya berselang satu tahun. Sehingga ketiga perjanjian tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dan memiliki keterkaitan yang erat.

Dalam tesis karangan Saud P.Krisnawan yang berjudul “*Peran Hamas dalam Proses Perdamaian Israel-Palestina (1993-1998)*” membahas mengenai peran Hamas dalam hubungan Palestina-Israel. Hamas mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam hubungan damai yang disepakati, pihak Israel selalu meminta agar Pemerintah Sementara Palestina (PLO) dapat meredam segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Hamas. Dan setiap kali Hamas melakukan penyerangan terhadap warga Israel, maka hal tersebut selalu dijadikan pembenaran (*justifikasi*)

oleh Pemerintah Israel untuk tidak segera mengimplementasikan hasil-hasil kesepakatan damai. Dalam tesis ini juga membahas bagaimana peranan gerakan resistensi Hamas dalam proses perdamaian Palestina-Israel, dan membahas faktor-faktor yang menyebabkan Hamas melakukan perjuangan dengan menggunakan cara-cara kekerasan dan aksi-aksi terornya. Kurun waktu yang diambil dalam skripsi ini adalah tahun 1993-1998.

Persamaan penulis terletak pada pembahasan studi tentang Perjanjian damai Oslo I dan II. Akan tetapi, penulis lebih memfokuskan tentang keputusan apa yang diambil Hamas terhadap Perjanjian Oslo I dan II, langkah-langkah apa yang diambil Hamas dalam menyikapi keputusannya terhadap Kesepakatan Oslo I dan Oslo II, dan dampaknya bagi Palestina hingga pelaksanaan pemilu 1996. Selain itu, dalam skripsi ini juga mengulas peristiwa yang terjadi setelah ditandatangani Kesepakatan Oslo I dan Oslo II. Skripsi ini juga terdapat perbedaan dalam rentan waktunya dimana dalam tesis karangan Masyrafah rentan waktunya pada awal tahun 1991-1995 dan tesis karangan Saud P.Krisnawan rentan waktunya yaitu 1993-1998, sedangkan pada skripsi penulis, rentan waktunya adalah 1993-1996. Dalam rentan waktu tersebut terdapat proses Kesepakatan Oslo I dan II, dimana diantara proses tersebut terdapat Perjanjian Kairo (1994) yang masih berkaitan erat dengan kedua Kesepakatan Oslo, serta peristiwa yang terjadi pasca penandatanganan Kesepakatan Oslo seperti kematian Perdana Menteri Israel Yitzhaq Rabin kemudian diikuti dengan pelaksanaan pemilu 1996 dimana Hamas tidak mengikuti pemilu tersebut.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Rentan waktu yang ditulis dalam penulisan skripsi adalah awal 1993 sampai dengan 1996. Dalam rentan waktu tersebut ditandai dengan proses perdamaian yang menghasilkan kesepakatan yang dinamakan Perjanjian Oslo I, Perjanjian Kairo (1994), dan Perjanjian Oslo II yang pada akhirnya perjanjian tersebut yang menentukan sikap Hamas dalam Perjanjian Oslo. Wilayah geografis yang membatasi penulisan skripsi ini adalah wilayah Palestina. Adapun jika penulis menuliskan nama,

tempat dan peristiwa lain di luar pembatasan ruang lingkup skripsi, hal tersebut hanya bertujuan untuk melengkapi analisis penulis.

## 1.6 Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses itu disebut historiografi.<sup>11</sup> Metode ini diawali dengan pengumpulan data (heuristik). Dalam pengumpulan data ini, penulis hanya menggunakan sumber-sumber tertulis berupa buku, koran, jurnal, dan situs internet.

Sumber-sumber yang diperoleh dalam tahap heuristik tersebut selanjutnya perlu melalui tahap kritik internal untuk melihat kredibilitasnya sebagai sumber sejarah serta relevansinya dengan penelitian ini.

Tahap berikutnya adalah interpretasi, yaitu memberikan penafsiran terhadap fakta yang ditemukan dalam sumber-sumber yang didapat oleh penulis. Interpretasi ini dilakukan dengan menganalisis data-data yang sudah melewati proses kritik.

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah historiografi atau penulisan sejarah. Fakta-fakta sejarah yang sudah ditemukan kemudian diseleksi, disusun, diberi tekanan dan ditempatkan dalam suatu urutan kronologis dan sistematis.<sup>12</sup>

## 1.7 Sistematika Penulisan

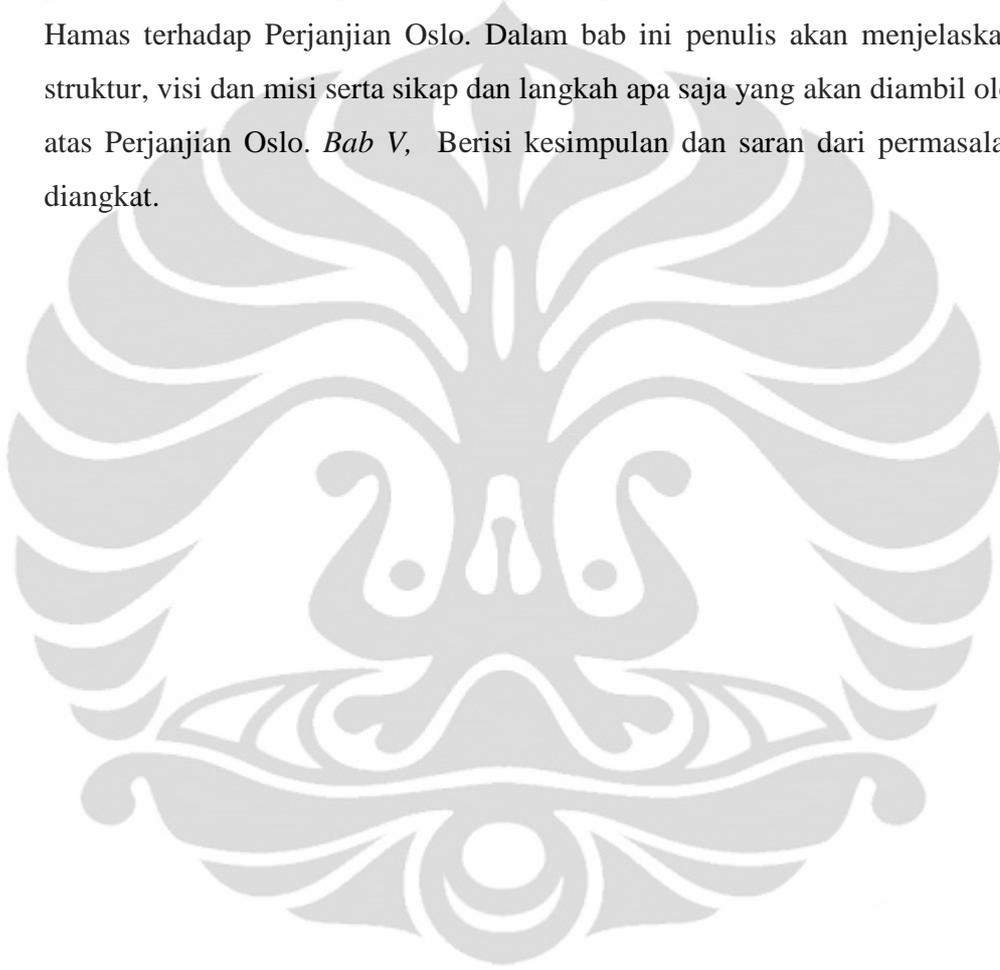
Skripsi ini penulis susun dalam beberapa bab. *Bab I*, berisi Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. *Bab II*, Teori tentang konflik. Dalam bab ini penulis akan

---

<sup>11</sup> Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah*. Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta, 1985, hal 32.

<sup>12</sup> Dudung Abdurrahman. *Metode Penelitian Sejarah*. Ar-Ruzz Media Group : Yogyakarta, 2007, hal. 53.

menjelaskan tentang pengertian konflik, jenis-jenis konflik, dan penyelesaian sebuah konflik. *Bab III*, Perjanjian Oslo. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang proses, hasil dan dampak yang terjadi bagi masyarakat Palestina. *Bab IV*, Sikap Hamas terhadap Perjanjian Oslo. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang struktur, visi dan misi serta sikap dan langkah apa saja yang akan diambil oleh Hamas atas Perjanjian Oslo. *Bab V*, Berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diangkat.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian dari Konflik**

Kata konflik berasal dari bahasa latin *cinfigere* yang artinya saling memukul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBRI), konflik didefinisikan sebagai percekocan, perselisihan, atau pertentangan. Dengan demikian secara sederhana, konflik merujuk pada adanya dua hal atau lebih yang berseberangan, tidak selaras, dan bertentangan. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (atau juga kelompok) yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Soerjono Soekanto menyebut konflik sebagai suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan, yang disertai dengan ancaman dan kekerasan.

Menurut K.J. Holsti konflik cenderung mengarah pada kekerasan yang terorganisir muncul sebagai akibat dari posisi yang saling bertentangan, sikap bermusuhan, dan tindakan militer atau diplomatik dari beberapa kelompok tertentu atas suatu masalah. Kelompok yang terlibat dalam konflik biasanya adalah pemerintah, Negara, dan bangsa (kekecualian yang sudah jelas sekarang ini adalah: PLO, Vietkong, dan sekjen PBB). Kelompok itu mempunyai tujuan tertentu, misalnya saja, mempertahankan atau bahkan memperluas wilayah, keamanan, pasar, pretise, sekutu, revolusi dunia, meruntuhkan pemerintah yang lalim, mengubah prosedur dalam PBB, dan banyak lagi yang lain. Untuk mencapai dan mempertahankan tujuan ini, tuntutan dan tindakan mereka akan sangat bertentangan dengan tujuan dan kepentingan kelompok yang lain.

Penyebab utamanya adalah perbedaan pendirian antar kelompok, termasuk posisi yang hendak mereka capai. Tingkah laku konflik (baik dalam bentuk sikap maupun tindakan) akan terjadi apabila kelompok A menempati posisi yang justru bertentangan dengan kemauan dan kepentingan kelompok B dan mungkin juga kelompok lain. Jadi kondisi krisis dari konflik adalah kondisi yang langka, di mana tindakan satu kelompok terhadap suatu masalah dilihat sebagai

mengorbankan posisi kelompok yang lain. Berbagai isu penyebab yang paling tradisional adalah masalah territorial, misalnya kontrol territorial hampir selalu merupakan kondisi yang menimbulkan konflik internasional. Mungkin juga terdapat perbedaan pandangan terhadap berbagai masalah. Konflik bisa timbul pada masalah ini karena suatu pemerintah ingin menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang bertentangan dengan kemauan pemerintah yang lain.<sup>13</sup>

Lewis A. Coser<sup>14</sup> berpendapat bahwa istilah konflik merujuk ke situasi di mana sekelompok orang yang teridentifikasi (berdasarkan suku, etnis, bahasa, kebudayaan, agama, social, ekonomi, politik) secara sadar terlibat pertentangan dengan satu atau lebih kelompok lain karena mereka berusaha mengejar tujuan yang bertentangan dapat berupa perjuangan terhadap nilai-nilai, klaim terhadap status, kekuasaan, sumber-sumber yang terbatas ketersediaannya, yang dalam prosesnya ditandai upaya pihak-pihak terlibat untuk saling menetralsisir, mencederai, bahkan mengeliminasi posisi lawan.<sup>15</sup>

Meski konflik mengandung unsur kompetisi, tetapi konflik menyiratkan pengertian yang lebih luas. Orang dapat berkompetisi untuk sesuatu yang terbatas tanpa harus menghiraukan keberadaan kompetitor atau tanpa perlu berupaya mencegah lawan dari usaha mengejar tujuan. Prinsipnya, dalam kompetisi pencapaian kemenangan dilakukan melalui proses saling mengungguli dan tidak bertujuan menghancurkan lawan. Tetapi kompetisi secara perlahan akan berubah menjadi konflik manakala pihak-pihak yang terlibat mulai berupaya memperluas posisi yang dimaksudkan sebagai upaya menghalangi lawan mencapai tujuan, atau bahkan berupaya menghancurkan posisi lawan, sehingga lawan tidak lagi menghalangi apa yang dicapai.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> K. J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1987, hal. 592-593.

<sup>14</sup> Lewis Alfred Coser seorang sosiolog kebangsaan Amerika Serikat. Ia lahir di Berlin pada tanggal 27 November 1913. Ia bermigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1941 dan memperoleh gelar doctor dari Columbia University. Beliau adalah sosiolog pertama yang berusaha melihat teori konflik dan fungsionalisme structural secara bersamaan.

<sup>15</sup> Coser A. Lewis. *The Functions of Sosial Conflict*. New York: Free Press. 1956, hal 3.

<sup>16</sup> Universitas Surabaya. Pusat Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dinamika HAM: Dimensi HAM Dalam Dunia Industri*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002, hal 36.

Menurut teori J.P. Sartre dan sesuai dengan refleksi filsafat, ‘sesama manusia’ merupakan ancaman yang dapat melahirkan konflik:

*Hubungan antarmanusia dengan sesamanya mempunyai ciri khas antara lain tampak dalam ketegangan-ketegangan yang terdapat antara kedua kutub... . Di dalam masyarakat manusia adanya sesama manusia itu menimbulkan masalah. Demikian sekurang-kurangnya menurut refleksi filsafat..., sedangkan Sartre manusia baru bertumbuh bercirikan konflik.*

Dalam teori evolusi terdapat pula teori konflik yang didukung oleh seorang pakar Botani Amerika, Asa Gray. Ia menyatakan bahwa di antara lapisan masyarakat manusia terdapat konflik pendapat yang kelak kemenangan berpihak pada yang kuat:

*‘He foresee a spirited conflict among opinion of every grade – a struggle for existense in which natural selection itself will destroy the weaker and allow the strouge to survive.*

Dengan hadirnya beberapa negara yang berkuasa, tanpa ketahanan sistem internasional yang mengikat mereka, dengan adanya negara-negara yang mementingkan diri sendiri, konflik tidak jarang mengarah pada peperangan. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dari kondisi ini, suatu negara harus mengandalkan peralatan sebagai antisipasi.<sup>17</sup>

## **2.2 Faktor-faktor penyebab Konflik**

Dalam buku Politik Internasional, K. J. Holsti menguraikan konflik internasional yang terjadi pada abad 20 ini berdasarkan 4 komponen yaitu: kelompok yang bertentangan, bidang masalah yang dipertentangkan, sikap dan tindakan. Keempat komponen ini akan memberi kita suatu dasar untuk menilai keefektifan sarana yang dipakai guna menyelesaikan konflik internasional.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Albertine Minderop. *Pragmatisme: Sikap Hidup dan Politik Luar Negeri Amerika Serikat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hal 132-133

<sup>18</sup> K. J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1987, hal. 595

Lebih lanjut K. J. Holsti menyebutkan ada 7 tipe penyebab terjadinya konflik, yaitu:<sup>19</sup>

1. Konflik teritorial terbatas.

Dalam konflik ini terdapat pertentangan posisi yang menyangkut pemilikan teritorial, misalnya klaim suatu negara terhadap suatu daerah yang berada di atau dekat wilayah negara lain. Masalah kedaulatan atas minoritas etnik juga sering dihubungkan dengan klaim suatu negara untuk mengontrol wilayah tersebut, dan oleh karena itu disebut konflik teritorial terbatas. Penyebab inilah yang menjadi akar konflik Palestina-Israel, di mana Israel mengklaim tanah Palestina.

2. Konflik yang terutama karena susunan pemerintah

Misalnya keterlibatan Amerika Serikat, Cina, dan Soviet dalam perang saudara di Laos 1959-1962

3. Konflik yang diakibatkan oleh usaha suatu negara untuk mempertahankan hak atau privelese mereka atau suatu teritorial negara lain demi mempertahankan dan melindungi kepentingan keamanannya. Contohnya adalah tuntutan Soviet pada 1939 untuk membangun suatu pangkalan militernya di negara Baltik dan Finlandia. Konflik ini disebut juga sebagai imperialisme startegis.

4. Konflik karena kehormatan nasional. Pada konflik ini pemerintah melakukan ancaman atau tindakan militer untuk membersihkan beberapa pelanggaran. Suatu negara mungkin meningkatkan beberapa insiden yang tadinya relatif kecil menjadi krisis dan besar. Contohnya adalah invasi Yunani ke Bulgaria pada 1925, yang diakibatkan terbunuhnya 2 orang penjaga perbatasan Yunani dalam suatu insiden di perbatasan dua negara.

5. Konflik karena imperialisme terbatas. Pada konflik ini suatu pemerintah ingin menghancurkan kemerdekaan negara lain, biasanya karena alasan kombinasi dari tujuan ideologis, keamanan dan perdagangan. Contohnya adalah penyatuan Austria oleh Nazi Jerman pada 1938.

<sup>19</sup> K. J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1987, hal. 596-597

6. Konflik karena pembebasan, atau perang revolusioner oleh suatu negara untuk membebaskan masyarakat negara lain.
7. Konflik yang timbul sebagai akibat dari usaha suatu negara untuk mempersatukan negara yang terpecah belah.

### 2.3 Jenis-jenis Konflik

Berdasarkan bentuknya, Lewis A. Coser membedakan konflik atas dua bentuk, yakni konflik realistik dan konflik nonrealistik.

1. Konflik realistik berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem dan tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial.
2. Konflik nonrealistik adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan yang antagonis (berlawanan), melainkan dari kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan.

Berdasarkan kedua bentuk konflik di atas, Lewis A. Coser membedakan adanya konflik in-group dan konflik out-group. Konflik in-group adalah konflik yang terjadi dalam kelompok itu sendiri. Konflik out-group adalah konflik yang terjadi antara suatu kelompok dan kelompok lain.

Ahli lain, Dahrendorf<sup>20</sup> membedakan konflik atas empat macam, yaitu sebagai berikut.

1. Konflik-konflik di antara peranan-peranan sosial. Sebagai contoh, konflik antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi, seperti peranan seorang suami dan istri dalam mendapatkan penghasilan.
2. Konflik-konflik di antara kelompok-kelompok sosial.
3. Konflik-konflik di antara kelompok-kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisasi
4. Konflik-konflik di antara satuan nasional, seperti antara partai politik, antara negara-negara, atau antara organisasi-organisasi internasional.

<sup>20</sup> Dahrendorf adalah seorang sosiolog, filsuf, ilmuwan politik dan politik liberal keturunan Jerman-Inggris. Seorang ahli terkemuka dalam pembahagian kelas di masyarakat modern, dan telah digambarkan sebagai salah satu pemikir yang paling berpengaruh di generasinya. *en.wikipedia.org/wiki/Ralf\_Dahrendorf*. Diakses pada tanggal 8 Juni 2011, pukul 14.00.

Selain itu, konflik juga dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>21</sup>

1. Konflik yang berwujud kekerasan

Konflik yang mengandung kekerasan, pada umumnya terjadi dalam masyarakat-negara yang belum memiliki konsensus dasar mengenai dasar dan tujuan negara, dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Huru-hara (*riot*), kudeta, pembunuhan atau sabotase yang berdimensi politik (terorisme), pemberontakan, dan sapatisme, serta revolusi merupakan sejumlah contoh konflik yang mengandung kekerasan.

2. Konflik yang tidak berwujud kekerasan

Konflik ini pada umumnya dapat ditemui dalam masyarakat-negara yang memiliki konsensus mengenai dasar dan tujuan negara, dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Adapun contoh konflik yang tidak berwujud kekerasan, yakni unjuk-rasa (demonstrasi), pemogokan (dengan segala bentuknya), pembangkangan sipil (*civil disobedience*), pengajuan petisi dan protes, dialog (musyawarah), dan polemik melalui surat kabar.

#### 2.4 Penyelesaian sebuah Konflik

Adapun cara-cara penyelesaian konflik di dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) merupakan tahap yang harus diikuti oleh setiap anggota-anggotanya yang berkonflik. Setiap anggota berjanji untuk menyelesaikan setiap perselisihan secara damai dan menghentikan ancaman dan penggunaan kekuatan. Jika suatu perselisihan terjadi kedua anggota harus tunduk kepada PBB, mencari sebuah penyelesaian-penyelesaian seperti negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan penyelesaian secara yudisial. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka anggota yang berkonflik atau semua

<sup>21</sup> Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1994, hal 149-150

anggota dari PBB atau Sekretaris Jenderal akan membawa permasalahan yang terjadi untuk diperhatikan oleh Dewan Keamanan atau Majelis Umum.<sup>22</sup>

1. *Negosiasi*, adalah metode untuk penyelesaian internasional secara diskusi langsung diantara anggota-anggota yang berselisih dengan objek yang dapat dijangkau melalui persetujuan. *Negosiasi* adalah hal yang penting dari praktek berdiplomasi.
2. *Good Offices* (jasa-jasa baik), *Good Offices* meliputi pihak ketiga, boleh menawarkan pendapatnya atau fasilitas untuk digunakan anggota-anggota yang berselisih, tetapi tidak boleh menawarkan saran atau usul pada pernyataan dari penyelesaian permasalahan. Pihak ketiga berada pada posisi yang netral untuk bernegosiasi atau menawarkan sebuah pendapat diantara anggota yang berselisih.
3. *Penyelidikan*, adalah suatu proses dari penemuan fakta-fakta oleh tim investigator yang berada pada posisi yang netral. Sering fakta-fakta dibuat atas penyelesaian yang kontroversi dan klarifikasi oleh sebuah komisi yang adil dari perselisihan tersebut.
4. *Mediasi*, adalah suatu prosedur yang meliputi usul atau saran dari pernyataan penyelesaian oleh pihak ketiga. Mediator masuk ke dalam sebuah *negosiasi* diantara anggota-anggota yang berselisih untuk penyelesaian perselisihan tersebut. Mediator tidak boleh menjatuhkan salah satu anggota dan harus berada pada posisi yang netral.
5. *Konsiliasi*, pengertiannya tidak terlalu jauh dari mediasi kecuali untuk jasa yang sah dari pihak ketiga, yang merupakan sebuah kondisi atau badan internasional yang meliputi bantuan pada penemuan suatu solusi yang memuaskan untuk suatu penyelesaian secara konsiliasi.
6. *Arbitrasi*, adalah arti dari penggunaan prinsip-prinsip yang sah dengan persetujuan sebelumnya diantara anggota-anggota yang berselisih. Seorang juri dari pengadilan atau arbitrator adalah dibuat dengan cara persetujuan khusus dari anggota yang berselisih atau oleh sebuah

---

<sup>22</sup> A. Leroy Bennet, *International Organizations: Principles & Issues*, New Jersey: Prentice Hall inc., 1977, hal. 105

persetujuan arbitrase. Persetujuan untuk dibawa ke dalam suatu arbitrase, anggota-anggota yang berselisih pun harus menyetujui pada keputusan tersebut.

7. Ajudikasi atau penyelesaian Yudisial, adalah suatu proses pertemuan dari suatu penyelesaian yang dibawa pada sebuah peradilan internasional. Tidak seperti arbitrase, pengadilan adalah bukan subjek permulaan di atas prosedur, fakta menjadi suatu pertimbangan atau prinsip yang sah yang harus digunakan.

Selain itu, masih ada cara-cara penyelesaian konflik yaitu menghindar atau mengubah sikap secara sukarela, penaklukan dengan cara kekerasan, memaksa tunduk atau penangkalan yang efektif, menyerah, dan penyelesaian pasif. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Penghindaran

Apabila kedua belah pihak yang sedang dalam konflik merasakan bahwa di antara mereka terdapat pertentangan tujuan, nilai, kepentingan, atau posisi, maka salah satu cara yang mungkin dapat menyelesaikannya adalah salah satu atau kedua belah pihak harus menarik diri dari posisi tawar menawar atau menghentikan semua tindakan yang dapat mengakibatkan respon yang bermusuhan. Meskipun cara ini tampaknya sulit untuk dilakukan, tetapi kemungkinan untuk itu ada karena setiap pemerintah pada dasarnya selalu ingin mempertahankan persahabatan. Misalnya, suatu negara mungkin saja mengubah tuntutannya dengan maksud agar ia tetap mendapatkan subsidi bagi pertaniannya, kalau ia pikir bahwa dengan bertindak sebaliknya akan mendapatkan reaksi negatif dari anggota lain dari organisasi itu.

2. Penaklukan

Kemungkinan penyelesaian yang kedua, yaitu penaklukan, membutuhkan banyak tentara untuk dapat menyerang musuh. Akan tetapi sebagai akhir dari penaklukan ini bisa saja berupa tawar menawar antar kedua belah

---

<sup>23</sup> K. J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1987 hal. 606-610

pihak yang bertentangan. Coser<sup>24</sup> mengingatkan kita agar salah satu pihak yang sedang dalam konflik menyadari bahwa perdamaian, dalam situasi penyerahan yang luar biasa sekalipun, merupakan suatu hal yang lebih diidamkan-idamkan dari konflik yang berkepanjangan.

### 3. Kepatuhan-Pencegahan

Kriteria yang membedakan kepatuhan dan pencegahan adalah apakah ancaman penggunaan cara-cara militer diterapkan atau tidak. Dalam kepatuhan atau pencegahan ini salah satu pihak terpaksa harus mengubah kepentingan posisi, nilai yang telah mereka pegang teguh sebelumnya, sebab pihak musuh telah mengancam akan menghancurkannya dengan penggunaan cara-cara militer.

Meskipun kemungkinan untuk terjadinya penggunaan cara-cara militer adalah kecil, akan tetapi dapatlah disimpulkan bahwa setiap kepatuhan merupakan suatu hasil dari ancaman militer sebagai cara penyelesaian konflik.

### 4. Kompromi

Kemungkinan keempat dari penyelesaian konflik atau krisis internasional adalah dilakukannya beberapa kompromi di mana kedua belah pihak sama-sama setuju untuk melakukan perubahan parsial terhadap tujuan, posisi, tuntutan, dan tindakan mereka semula.<sup>25</sup> Perubahan tersebut biasanya tidak sama bagi kedua belah pihak. Setiap penyelesaian yang meminta beberapa pengorbanan yaitu perubahan posisi dari kedua belah pihak, dapatlah disebut kompromi, meskipun salah satu pihak merasa lebih beruntung dari pihak lain.

Masalah utama dalam penyelesaian konflik dengan cara ini adalah bagaimana agar kedua belah pihak sama-sama menyadari bahwa biaya yang akan ditanggung akibat konflik yang berkelanjutan jauh lebih besar dari pada biaya dan konsekuensi dari pengurangan tuntutan atau mengubah militer atau diplomatiknya.

<sup>24</sup> K. J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1987 hal. 607

<sup>25</sup> Kenneth E. Boulding, *Conflict and Defense: A General Theory*. New York: Harper & Row, Publisher, 1962, hal. 309-310

## 5. Penyerahan

Penyerahan merupakan suatu penyelesaian yang sangat rumit sifatnya dan biasanya didahului oleh kompromi di mana pihak yang terlibat menyetujui suatu penyelesaian tanpa prosedur tawar menawar. Penyerahan suatu cara penyelesaian yang bersifat mengikat, dipengaruhi oleh pihak ketiga yang independen (misalnya pengadilan) atau kriteria tertentu. Tidak banyaknya konflik yang diselesaikan dengan cara penyerahan, sebab secara prosedural usaha semacam ini menyebabkan pelepasan hak tawar menawar dan menuntut kemauan keras untuk menyelesaikan berdasarkan beberapa kriteria, yang tidak memihak, yaitu hanya ada satu yang menang dan yang lain kalah. Namun penyelesaian konflik dengan penyerahan tidak perlu dilakukan melalui proses pengadilan. Sejauh beberapa kriterianya dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka cara ini juga dapat disebut sebagai penyerahan.

## 6. Penyelesaian Pasif

Konflik internasional sering tidak terselesaikan dengan cara formal, tetapi terus berlangsung dalam waktu yang lama sampai pihak yang terlibat secara implisit menerima status Quo baru. Quincy Wright menyatakan kebanyakan konflik internasional diselesaikan dengan cara dibiarkan begitu saja sampai usang. Artinya kedua belah pihak dengan sengaja hidup dalam situasi yang seolah-olah damai dalam beberapa waktu, meskipun sebenarnya di antara mereka masih terdapat pertentangan posisi. Secara perlahan-lahan, pihak yang terlibat mengurangi komitmen mereka semula, sampai ke titik di mana untuk melakukan tindakan militer secara terang-terangan dianggap sebagai hal yang tidak berarti.

Dengan demikian setiap konflik akan diselesaikan dengan salah satu dari 6 cara di atas. Sebagian dari cara penyelesaian ini seperti, kompromi dan penyerahan, biasanya dicapai melalui negosiasi, mediasi atau adjudikasi, dan persetujuan formal. Cara lain seperti: cara penghindaran dan penyelesaian pasif, merupakan hasil dari kehendak sendiri yang bersifat unilateral atau “non-aksi

bilateral”. Cara ini tidak memerlukan negosiasi atau perjanjian formal, meskipun penggunaannya untuk menyelesaikan konflik.

Berdasarkan cara-cara penyelesaian konflik internasional di atas, konflik Israel-Palestina menggunakan jalan kompromi melalui perundingan damai. Setelah berbagai tahap negosiasi dilakukan diantara kedua belah pihak, akhirnya mereka sepakat untuk mengadakan sebuah perundingan damai yang dikenal Perjanjian Oslo I dan II. Hasil kesepakatan dari kedua perjanjian tersebut Israel bersedia menyerahkan wilayah Jalur Gaza dan kota Jericho serta memberikan pemerintahan otonomi Palestina di kedua wilayah itu. Kemudian dilanjutkan dengan Kesepakatan Oslo II yang menghasilkan perluasan pemerintahan otonomi Palestina dari Jalur Gaza dan Jericho. Kedua Kesepakatan Oslo tersebut merupakan suatu terobosan untuk menuju perdamaian di wilayah Timur Tengah khususnya di Palestina. Karena kedua belah pihak mampu mengadakan sebuah negosiasi yang menyatukan pemikiran-pemikiran yang menyangkut permasalahan keberadaan Israel di Palestina. Akan tetapi, Kesepakatan Oslo I dan II ini tidak mewakili keinginan sebagian kelompok di Palestina, karena dalam proses perundingan damai ini berlangsung tidak mengikut sertakan kelompok seperti Jihad Islam dan Hamas. Bagi Israel kedua kelompok tersebut merupakan kelompok garis keras yang akan menghambat berdirinya negara Israel di wilayah Palestina. Sehingga banyak kecaman yang dilakukan oleh kedua kelompok tersebut terutama Hamas, yang secara tegas menolak Kesepakatan Oslo I dan II. karena hasil Kesepakatan Oslo I dan II tidak sesuai dengan visi dan misi Hamas.

Bagi Hamas Kesepakatan Oslo I dan II ini tidak adil bagi Palestina karena hanya di dua wilayah seperti Jalur Gaza dan Jericho yang diberikan pemerintahan otonomi Palestina. Hamas berkeinginan bahwa seluruh wilayah Palestina merasakan kemerdekaannya sebagai bangsa Palestina di tanahnya sendiri.

## **BAB III**

### **PROSES PERJANJIAN OSLO**

#### **3.1 Latar Belakang Terbentuknya Kesepakatan Oslo I**

Konflik antara Israel-Palestina merupakan sebuah konflik yang berkepanjangan yang tidak kunjung usai. Berbagai bentuk perjanjian damai telah dibuat oleh PBB, Amerika Serikat, Negara-negara Eropa dan Mesir untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Akan tetapi, dari segala bentuk perjanjian damai yang telah dibuat, seakan-akan tidak ada yang benar-benar menjadi sebuah solusi bagi terciptanya perdamaian antara Israel dan Palestina. Hal ini terjadi karena, dalam implementasinya Negara Israel telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap isi dari setiap perjanjian damai yang telah dibuat. Salah satu bentuk perjanjian damai yang telah dilanggar oleh pihak Israel adalah Kesepakatan Oslo I dan II pada tahun 1993 dan 1995.

Kesepakatan oslo ini terbentuk karena tidak adanya kemajuan yang dicapai dari sebuah perundingan bilateral Israel-Palestina yang dinamakan Konferensi Madrid. Konferensi Madrid ini merupakan perundingan resmi Israel-Palestina dan diselenggarakan oleh pemerintahan Spanyol dan didukung Negara Amerika Serikat dan Negara Uni soviet pada tanggal 30 Oktober 1991 di Madrid. Kemudian negara-negara yang terlibat dalam konferensi tersebut yaitu Israel, Palestina, Suriah, Lebanon dan Yordania.

Rangkaian dari konferensi Madrid ini telah berjalan sampai pada putaran kesepuluh yang diadakan di Washington pada tahun 1993. Ketika perundingan bilateral Israel-Palestina dari rangkaian Konferensi Madrid mencapai putaran kesepuluh yang berlangsung dari 15 Juni hingga 1 Juli 1993, Utusan khusus AS Dennis Ross saat itu tiba-tiba bertanya kepada jubah delegasi Palestina Hanan Ashrawi tentang kebenaran adanya kontak rahasia Israel-Palestina, selain forum perundingan di Washington itu.

Pada saat Ross menanyakan hal tersebut, perundingan rahasia di Oslo memang sedang berjalan tanpa dideteksi oleh media massa. Meski demikian, Yasser Arafat tetap memonitor dan mengarahkan perundingan Washington.

Perundingan resmi Israel-Palestina di Washington saat itu telah mencapai hasil cukup jauh, yaitu isu pembuatan deklarasi prinsip yang menegaskan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari wilayah Palestina, dan penarikan pertama akan dilakukan dari Jalur Gaza atau dikenal dengan nama “Gaza pertama”. Isu yang sama juga dirundingkan secara rahasia di Oslo.

Usai perundingan putaran kesepuluh di Washington itu, delegasi Palestina langsung menuju Tunis menemui Yasser Arafat untuk meminta persetujuan soal proyek “Gaza-Jericho pertama”, agar kota Jericho menjadi simbol kedaulatan Palestina di Tepi Barat.

Setelah mencapai kesepakatan proyek “Gaza-Jericho pertama” dikalangan pemimpin Palestina itu, delegasi Palestina yang ikut perundingan Washington pulang ke Tepi Barat, untuk menunggu lawatan Menlu AS Warren Christopher berikutnya ke Timur Tengah. Pada saat itu pula, perundingan rahasia di Oslo semakin mencapai kemajuan dan hampir final.<sup>26</sup>

Walau perundingan rahasia di Oslo semakin mencapai kemajuan dan hampir final, pemimpin Palestina Yasser Arafat belum memberi tahu kepada Hanan Ashrawi yang merupakan salah satu delegasi Washington dari palestina tentang perundingan rahasia Oslo yang sudah mendekati final. Pada saat itu Hanan Ashrawi masih mempersiapkan perundingan Washington putaran kesebelas yang akan dimulai 31 Agustus hingga 14 September 1993.

Namun pada 24 Agustus 1993, Hanan Ashrawi tiba-tiba mendapat telepon dari seorang pejabat Palestina di Tunis, bahwa telah terjadi perkembangan luar biasa hingga tidak perlu lagi menggelar perundingan Washington putaran kesebelas. Setelah mendapat berita tersebut, Hanan Ashrawi bergegas berangkat ke Tunis untuk mengetahui lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah tiba di Tunis dari Jerussalem, Ashrawi, Faisal Huseini dan Akram Haniah (anggota delegasi Washington dari Palestina) untuk pertama kalinya mendapat penjelasan secara transparan bahwa Ahmed Qurei (ketua Parlemen Palestina) dan Hassan Ashfour (menteri Negara Palestina) dengan pengarahan dari Mahmud

---

<sup>26</sup> Musthafa Abd Rahman., *Jejak-Jejak Juang Palestina : Dari Oslo hingga Intifadah Al-Aqsa*. Jakarta : Kompas,2002 hlm : 4

Abbas telah berhasil mencapai kesepakatan di Oslo (Norwegia) tentang deklarasi prinsip “Gaza-Jericho Pertama”.

Ashrawi dan Faisal Husseini mengakui, terkejut mendengar penjelasan tersebut, dan mereka merasa belum puas. Keesokan harinya, mereka mendatangi kantor Mahmud Abbas untuk membaca sendiri dokumen kesepakatan deklarasi prinsip itu, dan mereka terkejut lagi karena isu pemukiman Yahudi dan Kota Jerusalem Timur ditunda pada perundingan final nanti, tanpa ada jaminan Israel tidak mengubah lagi keadaan lapangan yang menguntungkan Tel Aviv. Perdebatan cukup sengit terjadi sekitar isi Kesepakatan Oslo antara Mahmud Abbas dan Hanan Ashrawi, namun semua itu sudah terlambat karena telah disetujui Yasser Arafat dan PM Israel Yitzhak Rabin saat itu.<sup>27</sup>

Namun Yasser Arafat tetap meminta Hanan Ashrawi berangkat ke Washington untuk menghadiri perundingan putaran kesebelas yang ternyata merupakan putaran terakhir dari rangkaian Konferensi Madrid.

### **3.2 Proses Terbentuknya Kesepakatan Oslo I**

Perundingan yang membahas tentang isi dari perjanjian Kesepakatan Oslo I ini berlangsung dari sebuah rumah kuno yang apabila dilihat dari luar, rumah kuno tersebut terbuat dari kayu dan berhalaman luas di tenggara Oslo, ibu kota Norwegia, ketika para delegasi Palestina membicarakan proyek “Gaza-Jericho Pertama”. Bangunan itu memang seperti rumah biasa. Penduduk sekitarnya hanya tahu bahwa rumah kuno yang lampunya sering menyala hingga larut malam itu dihuni dua orang profesor yang tengah menulis sebuah riset. Tak seorang pun tahu kelak, rumah kuno berlantai kayu yang di dalamnya berisi sejumlah lukisan antik itu bakal menjadi tempat bersejarah. Di rumah inilah, antara lain, diproses kesepakatan PLO dan Israel yang kemudian disebut Deklarasi Prinsip, deklarasi yang merinci prinsip-prinsip otonomi Jalur Gaza dan Jericho, sebagai pegangan pokok otonomi di Gaza dan Jericho, yang diharapkan menjadi awal proses berdirinya negara Palestina merdeka.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Ibid., hal 6

<sup>28</sup> Lihat “PLO-Israel, Setelah Perundingan Rahasia”, Majalah Tempo, 11 September 1993

Adapun proses jalan perdamaian itu:<sup>29</sup> FAFO<sup>30</sup>, Institut Norwegia untuk Ilmu Terapan, yang mengadakan penelitian tentang kondisi hidup di wilayah pendudukan. Untuk mendapatkan izin penelitian ini, Terje Rod Larsen, direktornya, menemui Yossi Beilin, anggota parlemen Partai Buruh. Juli 1992, berdiri pemerintahan Partai Buruh di Israel, yang memenangkan pemilu di bulan sebelumnya. Yitzhak Rabin menjadi perdana menteri, Shimon Perez menteri luar negeri, dan Beilin diangkat sebagai wakil menteri luar negeri. Hubungan Larsen dengan Pemerintah Israel pun semakin erat. Sebagai wakil menteri luar negeri, Beilin, menurut harian Washington Post, banyak membaca teleks dari delegasi Israel yang mengabarkan bahwa perundingan damai tak mencapai kemajuan sedikit pun. Di sekitar waktu inilah Beilin mulai pesimistis, perundingan akan gagal.

Pada tanggal 10 September 1992 Egeland, seorang diplomat Norwegia, menemui Beilin di Tel Aviv, membicarakan kelanjutan riset FAFO. Di antara pembicaraan itu disinggung pula soal perundingan Timur Tengah yang tidak berjalan lancar. Egeland menawarkan jasa sebagai jembatan antara Israel dan PLO karena sejauh itu Norwegia punya hubungan sangat baik dengan kedua pihak. PLO memang sudah lama mempunyai perwakilan di Norwegia. Beilin menyambut tawaran Egeland. Sejak tahun 1986 orang Israel dilarang menemui PLO. Akhirnya pertemuan diadakan secara informal, dan dirahasiakan. Kemudian Yossi Beilin menyetujui untuk menjadi koordinator dari pihak Israel. Sementara itu, di sisi lain, Shimon Perez, yang dalam soal konflik Palestina-Israel hanya ditugasi mengurus hal-hal di luar politik, seperti soal pembagian air dan masalah pengungsi, menjalin hubungan dengan Ahmad Krai, pejabat senior PLO, yang ditugasi Arafat mengurus hal yang sama dengan Perez. Hubungan ini kemudian menjadikan Krai penghubung antara Arafat dan Israel. Dua hal itulah kemudian yang menjadikan gagasan Egeland terwujud. Selain itu, yang menjadikan

<sup>29</sup> Lihat "PLO-Israel, Setelah Perundingan Rahasia", Majalah Tempo, 11 September 1993

<sup>30</sup> FAFO didirikan pada tahun 1982 oleh Konfederasi Perhimpunan Perdagangan Norwegia. Tahun 1993, FAFO menjadi sebuah yayasan lembaga penelitian independen dengan modal sahamnya berbasis pada donasi dari Konfederasi Perhimpunan Perdagangan Norwegia, Perhimpunan Pekerja Norwegia, dan beberapa korporasi bisnis besar lainnya di Norwegia (Orkla ASA, Umoe AS, Elkem ASA, Coop Norge, Spare Bank 1 Gruppen, Telenor AS). [www.Norway.org](http://www.Norway.org)

perundingan akan berjalan karena Yitzhaq Rabin (Perdana Menteri Israel) menerima gagasan perundingan yang difasilitasi oleh Egeland (Diplomat Norwegia). Salah satu alasannya, ia menyimpulkan para wakil dari wilayah pendudukan tak menghasilkan keputusan apa pun. Bisa jadi rencana inilah yang kemudian membuat Rabin mencabut undang-undang yang melarang orang Israel bertemu dengan anggota PLO pada 19 Januari 1993. Yang jelas, pencabutan itu mempercepat pertemuan di Oslo, dan tetap dirahasiakan.

Pertemuan Oslo dibuka pertama kali pada tanggal 20-22 Januari 1993, mempertemukan wakil Israel yang bukan orang pemerintah, dan wakil PLO. Dalam pertemuan tersebut pada awalnya membahas kondisi sosial ekonomi di wilayah pendudukan. Akhirnya pertemuan "ilmiah" itu pun berubah menjadi pertemuan politis. Mulailah disinggung-singgung oleh wakil Israel bagaimana kalau Gaza dulu yang diberi otonomi. Pihak PLO menjawab, sebaiknya Gaza dan Tepi Barat. Pertemuan ditutup dengan keputusan, perundingan akan dibuka lagi Maret.

Perundingan kembali diadakan di Oslo pada tanggal 4 Maret 1993. Beberapa pejabat Israel terlibat, antara lain Uri Savir, pejabat tinggi di kementerian luar negeri, Dedi Zucker, anggota parlemen sedangkan di pihak PLO, selain Ahmad Krai, Mahmoud Abbas alias Abu Mazen, pejabat senior PLO.

Shimon Peres berkunjung ke Norwegia untuk melihat rancangan Deklarasi Prinsip pada tanggal 20 Agustus 1993. Beberapa hari kemudian Shimon Perez terbang ke California untuk menjelaskan rancangan Deklarasi Prinsip itu kepada Menteri Luar Negeri AS, Warren Christopher. Bersamanya, Menteri Luar Negeri Norwegia Johan Joergen Hoslt dan Terje Rod Larse, Direktur FAFO.

Perundingan rahasia Oslo terungkap ke tangan pers Israel tanggal 28 Agustus 1993. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 1993 PM Rabin menjelaskan rencana pemberian otonomi Gaza dan Jericho pada kabinetnya, sebagai hasil pertemuan rahasia di Oslo.

Kemudian pada tanggal 13 September 1993 perjanjian Oslo I ditandatangani di Washington D.C (bertepatan dengan konferensi perundingan damai yang ke-11) oleh Mahmoud Abbas mewakili PLO dan Shimon Perez

mewakili Israel. Peristiwa itu disaksikan oleh Warren Christopher dari Amerika Serikat dan Andrei Kozyrev dari Rusia, di depan Presiden A.S. Bill Clinton dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dengan ketua PLO Yasser Arafat.<sup>31</sup>

Sebagai bagian dari perjanjian pada September 1993, Arafat mengirim surat ke PM Rabin yang di dalamnya ia menyatakan dengan tegas bahwa PLO mengakui Israel untuk hidup secara damai dan aman, menerima resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 dan 338, berkomitmen untuk penyelesaian konflik secara damai, mengecam penggunaan terorisme dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya, menegaskan bahwa pasal-pasal dalam perjanjian PLO yang menolak hak Israel untuk eksis tidak lagi valid dan berjanji untuk menunjukkan komitmen tersebut ke Dewan Nasional Palestina untuk perubahan resmi perjanjian tersebut.

Meskipun Israel mengakui PLO sebagai satu-satunya perwakilan Palestina dalam negosiasi perdamaian dan menjanjikan lima tahun perkembangan selanjutnya, Arafat gagal untuk mendapatkan konsesi spesifik lainnya mengenai jadwal penarikan mundur Israel dari wilayah-wilayah yang diduduki. Akibatnya, yang ia peroleh dari perjanjian Oslo adalah jaminan untuk membentuk pemerintah Palestina dan tetap berkuasa sehingga ia dapat mengatur masalah-masalah Palestina di Tepi Barat dan Gaza. Israel menginginkan dan mendapat lebih dari itu.<sup>32</sup>

Berikut beberapa yang penting dari Deklarasi Prinsip itu:<sup>33</sup>

1. Dua bulan setelah deklarasi disetujui, Israel akan menandatangani persetujuan untuk menarik pasukannya dari Jalur Gaza dan kota tua Jericho. Seluruh pasukan akan ditarik tidak lebih dari empat bulan setelah perjanjian ditandatangani. Tetapi itu dengan catatan, Israel tetap

<sup>31</sup>Anwar.M Aris: *Israel Is Not Real: Negara Fiktif Di Tanah Rampasan*, Jakarta: Rajut Publishing House, 2009. hal 112.

<sup>32</sup>Jimmy Carter. *'Palestine Peace Not Apartheid'* Palestina Perdamaian bukan Perpecahan. Trans. Khairul Fuad. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.hal 173-174

27 Lihat "Pasal-Pasal Oslo, Majalah Tempo. 11 september 1993

mengontrol pintu-pintu masuk ke Gaza dan Jericho, dan mengawasi keamanan seluruh wilayah.

2. Bangsa Palestina akan diberi kontrol penuh bagi urusan dalam negerinya sendiri. Tapi, belum boleh menyatakan kedaulatannya di kedua wilayah yang dikosongkan dari tentara Israel tersebut.
3. Segera setelah berlakunya Deklarasi Prinsip dan penarikan pasukan, Palestina berwenang mengatur semua urusannya di seluruh Tepi Barat, yang meliputi kepolisian, pendidikan, kesejahteraan sosial, pajak, dan pariwisata.
4. Dalam kurun 9 bulan setelah deklarasi prinsip diberlakukan, akan dilakukan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Palestina. Dewan terpilih yang mempunyai kekuasaan legislatif inilah yang akan memerintah Jalur Gaza dan Tepi Barat selama masa transisi yang dijanjikan tidak akan lebih dari lima tahun itu.
5. Untuk sementara waktu, dalam masa transisi, permukiman Yahudi di Jalur Gaza dan Tepi Barat tetap berada di bawah yurisdiksi Israel. Setelah itu, penduduk di kawasan tersebut boleh memilih tunduk pada pemerintah Palestina atau kembali ke Israel.
6. Perundingan terhadap status seluruh wilayah bekas pendudukan Israel dan Yerusalem Timur itu akan dimulai dalam waktu dua sampai tiga tahun kemudian.

### **3.2.1 Isi dari Perjanjian Oslo I (1993)**

Naskah perjanjian Deklarasi Prinsip-Prinsip Kesepakatan Oslo terdiri dari tujuh pasal dan empat pasal tambahan, yaitu :<sup>34</sup>

1. Pasal I Tujuan Negosiasi :

Menciptakan sebuah kekuasaan sendiri Interim bangsa Palestina, pemilihan dewan bagi rakyat Palestina di tepi Barat dan Jalur Gaza, bagi suatu periode transisi yang tidak lebih dari kurun waktu lima

---

<sup>34</sup> Tesis Masyrofah, "Peranan PLO Dalam Proses Perdamaian Israel-Palestina (Studi Tentang Perjanjian Damai Oslo I & II)", Jakarta: Universitas Indonesia, hal 82-83

tahun, menuju suatu penyelesaian perdamaian berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan no.242 dan no.338.

2. Pasal II Kerangka Kerja Bagi Periode Interim

Kerangka kerja yang disepakati bagi periode interim sudah diajukan dalam Deklarasi Prinsip-prinsip ini.

3. Pasal III Pemilu

Rakyat Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza bisa memerintah berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, langsung, bebas dan politik umum, pemilu untuk memilih Dewan di bawah pengawasan yang disepakati.

4. Pasal IV Yurisdiksi

Yurisdiksi Dewan tersebut akan mencakup wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza, kecuali isu-isu yang akan dinegosiasikan dalam negosiasi-negosiasi permanen.

5. Pasal V Periode Transisi dan Negosiasi-Negosiasi Berstatus permanen.

Periode transisi lima tahun akan dimulai bersamaan dengan penarikan mundur dari Jalur Gaza dan kawasan Jericho. Negosiasi-negosiasi berstatus permanen akan dimulai segera mungkin yang mencakup isu-isu Yerusalem, para pengungsi, pemukiman, pengaturan-pengaturan keamanan, perbatasan-perbatasan, hubungan dan kerjasama dengan Negara-negara tetangga dan isu-isu lainnya sesuai kepentingan bersama.

6. Pasal VI Persiapan Peralihan Kekuasaan dan Tanggung Jawab

Pada saat diberlakukannya Deklarasi Prinsip-Prinsip ini dan penarikan mundur dari Jalur Gaza dan Jericho, sebuah peralihan dari pemerintahan militer Israel dan Administrasi sipilnya kepada pihak Palestina dalam lingkup sebagai berikut : pendidikan dan kebudayaan, kesehatan sosial, perpajakan langsung, serta turisme.

## 7. Pasal VII Perjanjian Interim

Perjanjian Interim ini akan menetapkan struktur dewan, jumlah keanggotaanya, serta peralihan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah militer Israel dan Administrasi sipilnya ke Dewan.

Adapun dalam pasal-pasal tambahan Deklarasi prinsip-prinsip Kesepakatan Oslo terdiri dari empat pasal, yaitu :

1. Pasal Tambahan I Protokol tentang cara dan kondisi Pemilu.
2. Pasal Tambahan II Protokol penarikan kekuatan militer Israel dari Jalur Gaza dan kawasan Jericho.
3. Pasal Tambahan II Protokol tentang kerjasama Israel-Palestina dalam program-program ekonomi dan pembangunan.
4. Pasal Tambahan IV Protokol tentang kerjasama Israel-Palestina berkaitan dengan pembangunan regional.

Dalam butir-butir kesepakatan atas Deklarasi tentang Prinsip-prinsip pengaturan pemerintah sendiri sementara berisi 17 pasal secara keseluruhan.<sup>35</sup>

Kemudian kedua belah pihak Israel dan PLO juga telah menyepakati suatu perkiraan jadwal waktu (*approximate timetable*) yang memungkinkan bangsa Palestina (PLO) mengambil alih tanggung-jawab pemerintahan di Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai berikut :<sup>36</sup>

(13 Oktober 1993) : deklarasi prinsip mulai diberlakukan. Komite-komite yang diperlukan agar segera dibentuk untuk menyelesaikan berbagai isu, mulai dari kemungkinan perbedaan pengertian tentang kesepakatan, dan masalah-masalah pembangunan ekonomi, transportasi, pengairan, tenaga listrik dan prasarana komunikasi.

(13 April 1994) : penarikan mundur pasukan Israel dari Gaza dan Jericho harus sudah tuntas. Kemudian akan dibentuk pemerintahan sendiri Palestina yang akan memerintah selama masa peralihan lima tahun. Pemerintah Palestina itu akan

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 83

<sup>36</sup> Tesis Kurniady Rudy, "*Fundamentalisme Islam : Reaksi Terhadap Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Israel dalam Perjanjian Palestina-Israel (1991-1993)*", Jakarta : 1999. Universitas Indonesia. Hal. 86-87

mengurus sekolah-sekolah dan rumah sakit, memungut pajak dan membentuk angkatan kepolisian.

(13 Juli 1994) : Pemilihan Umum Dewan Palestina untuk mengambil alih fungsi dan tugas pemerintah Palestina. Pada waktu itu tentara Israel hanya akan berada di luar pusat-pusat perkampungan Arab.

Sesudah pemilihan umum Juli 1994, administrasi sipil Israel akan dibubarkan. Namun Israel akan terus bertanggung jawab kepada kemungkinan ancaman dari luar dan terus mempertahankan keamanan dan ketenteraman tempat-tempat pemukiman Israel.

Status Tepi Barat lebih lanjut (termasuk Yerusalem) akan dibicarakan setelah tiga tahun berlakunya kesepakatan.

Akan tetapi, walaupun perjanjian Israel-Palestina yang dikenal dengan Kesepakatan Oslo memang merupakan langkah terobosan dalam mewujudkan perdamaian, sebagian kalangan mempertanyakan isi dari deklarasi tersebut. Palestina berharap dokumen itu merupakan langkah awal menuju Negara Palestina Merdeka, tetapi, dokumen itu tidak mengandung janji seperti harapan tadi. Israel ingin kesepakatan itu mengarah kepada perdamaian dengan rakyat Palestina yang bermukim di Jalur Gaza dan Tepi Barat, dua kawasan yang terbelah oleh Negara Israel. Berikut ini beberapa soal yang menimbulkan catatan dan pertanyaan dari perjanjian itu :

1. Otonomi Palestina

Terobosan utama dalam perjanjian ini adalah periode lima tahun otonomi terbatas untuk Palestina di Jalur Gaza dan Jericho. Sebelum tahun ketiga berakhir, dua belah pihak akan mulai menegosiasikan perjanjian permanen. Hanya setelah itu, status Yerusalem, batas-batas wilayah, pemulangan pengungsi, pemukiman Israel dan pos-pos militer dipastikan.

2. Mundurnya Israel

Serdadu Israel akan mundur dari Gaza dan Jericho dan kemungkinan pusat-pusat pemukiman di Tepi Barat, dalam jangka waktu empat bulan setelah perjanjian ditandatangani. Tetapi, seberapa banyak dan seberapa

jauh penarikan mundur pasukan Israel itu, serta pembagian kontrol antara Palestina dan Israel terhadap kawasan otonomi tidak jelas.

### 3. Pemilihan Umum

Dalam jangka sembilan bulan, Palestina akan menyelenggarakan pemilu untuk memilih Dewan Kota yang akan mengendalikan pendidikan, pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, penarikan pajak dan kesejahteraan sosial. Pemerintahan sipil yang dioperasikan oleh Angkatan Bersenjata Israel, yang selama ini menggunakan badan-badan itu untuk menindas Palestina akan dihapuskan. Tetapi, detail tanggung jawab dewan kota yang akan dipilih Palestina, jumlah anggota dan siapa yang berhak bertanding dalam pemilu, akan masih dinegosiasikan.

### 4. Keamanan

Palestina akan membentuk polisi yang direkrut dari warga Palestina dikawasan itu, maupun di pengasingan, Jordania, Mesir dan Lebanon. Tetapi, kerangka tanggung jawab mereka, termasuk hubungan mereka dengan pasukan Israel, belum diputuskan.

### 5. Penyelesaian Sengketa

Persengketaan antara Israel dan Palestina yang pasti akan muncul ketika menerapkan perjanjian itu dan akan dipecahkan melalui sebuah komite bersama. Tetapi, perjanjian itu tidak memberikan mekanisme jelas untuk mencapai pemecahan secara damai terhadap masalah-masalah yang sebagian besar sangat mendasar

### 6. Pemukiman

Israel akan terus memberikan perlindungan kepada para pemukim Yahudi yang bersenjata dan hidup di Tepi Barat maupun Gaza. Tetapi perjanjian itu sangat kabur tentang bagaimana Israel akan melindungi Yahudi, terutama jika mereka ada diluar pemukiman.

### 7. Pengungsi

Perjanjian itu sedikit membicarakan cara-cara pemulangan 200.000 pengungsi Palestina yang lari dari Tepi Barat dan Jalur Gaza pada perang Arab-Israel 1967. Tetapi, tidak ada garansi atas pemulangan mereka dan

mengesampingkan pembicaraan mengenai pengungsi Palestina lain yang meninggalkan kawasan itu pada 1948 ketika Israel menyelenggarakan teror untuk mendirikan Negara Yahudi.

#### 8. Jerussalem

Masa depan Jerussalem yang diklaim oleh Israel maupun Palestina sebagai ibukota mereka, ditunda sampai status negosiasi final.

#### 9. Bantuan Ekonomi

Perjanjian itu menunjuk pembentukan Komite Kerjasama Ekonomi Israel-Palestina untuk menerapkan program-program pembangunan ekonomi di kawasan miskin Gaza dan Tepi Barat. Tetapi, perjanjian tidak merinci mekanisme distribusi milyaran dollar bantuan keuangan dari luar yang telah dijanjikan. Bank dunia menjanjikan paket bantuan ekonomi 10 tahun senilai 3 milyar dollar AS. Masyarakat Eropa menjanjikan 600 juta dollar AS selama lima tahun mendatang.<sup>37</sup>

### 3.2.2 Tokoh-Tokoh yang Berperan di Balik Alternatif Gaza-Jericho Yitzhak Rabin

Bagi Yitzhak Rabin, peristiwa perundingan untuk merumuskan Kesepakatan Oslo I lebih berupa pengejawantahan sikap kesediaan berkompromi dengan mengorbankan sebagian kehendak dirinya. Pada buku hasil karyanya *Catatan Pengabdian*. Rabin sama sekali tidak mengungkapkan, sekalimat pun, rasa toleransi atau tenggang rasa terhadap rakyat Palestina. Berbeda dengan pendahulunya Moshe Dayan yang lebih menggunakan pendekatan psikologi dan budaya dalam berhubungan dengan akrab, Rabin lebih suka memakai pendekatan kekuatan dan kekerasan.

Yitzhak Rabin lahir di Yerussalem yang masuk bagian Palestina tepatnya Mandat Britania Palestina, yang saat ini menjadi Israel, pada tanggal 1 Maret 1922 dan meninggal pada tanggal 4 November 1995 pada

<sup>37</sup>Lihat “*Perjanjian Otonomi Palestina; Lebih banyak Pertanyaan ketimbang Jawaban*”, Republik, 13 september 1993

umur 73 tahun. Yitzhak Rabin adalah Perdana Menteri kelima Israel pada 1974-1977 dan menjabat kembali pada 1992 hingga Rabin terbunuh pada 1995 oleh Yigal Amir, seorang aktivis sayap kanan yang tidak mendukung kebijakan mengenai Perjanjian Oslo. Rabin adalah perdana menteri Israel pertama yang dilahirkan di Israel, satu-satunya perdana menteri Israel yang terbunuh dan orang kedua yang meninggal dalam jabatannya setelah Levi Eshkol. Dalam masa jabatannya yang kedua, ia berusaha menjalin hubungan baik dengan Palestina. Atas usahanya itu, pada tahun 1994 bersama-sama Yasser Arafat dan Menteri Luar Negeri Shimon Perez ia mendapat hadiah Nobel Perdamaian. Ada beberapa pihak yang menolak keras langkah-langkah perdamaannya. Tanggal 4 November 1995, ia tewas diberondong peluru oleh sesama Yahudi di Tel Aviv.<sup>38</sup>

Sewaktu menjabat menjadi menteri pertahanan, tahun 1988, ia melakukan tindakan sangat kejam terhadap intifadah, sehingga diluluskan rakyat Palestina sebagai perbuatan yang sulit dimaafkan dan dilupakan. Sikap keras Rabin itu diduga terwariskan dari pengalaman masa kecilnya.

Suatu kali Rabin kecil yang dilahirkan di kota Quds tahun 1992 mengadakan perjalanan ke Jalur Gaza. “Saya saat itu mengingap di sebuah sekolah di Jalur Gaza, tapi rasa takut kepada anak-anak Palestina di Jalur Gaza membuat saya gelisah dan sulit tidur”, ucap Rabin suatu kali menuturkan pengalamannya kepada teman-teman sekolahnya. Pengalaman itu pula yang merupakan catatan pertama Rabin mengenai rasa curiga kepada anak-anak Palestina, yang lalu mewariskan sikap keras selanjutnya. Rabin pun sangat mengagumi Ketua Partai Buruh pertama, David Ben Gurion, dikenal lebih dekat kepada Ketua Partai Likud, Yitzhak Shamir, daripada teman separtainya Shimon Perez serta anggota Partai Buruh yang sangat populer di mata anggota Partai Likud.

Namun sebuah titik balik sejarah hubungan Palestina-Israel terjadi karena Rabin, mengeluarkan pernyataan yang dinilai mulai menyiratkan tenggang rasa kepada rakyat Palestina. “Intifadah merupakan perjuangan

---

<sup>38</sup> [wikipedia.org/wiki/Yitzhak\\_Rabin](http://wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Rabin). Diakses pada tanggal 3 Juni 2011, pukul 13.00.

mulia rakyat Palestina yang memberikan kebesaran dan kepahlawanan. Generasi baru Palestina memang patut dikagumi dan mendapat pujian,” tegasnya suatu waktu pada tahun 1988. Karena itu kesepakatan Gaza-Jericho kali ini tidak lebih dari klimaks pengungkapan tenggang rasa Rabin kepada rakyat Palestina yang semula hanya berupa pernyataan dan akhirnya diwujudkan menjadi kenyataan.<sup>39</sup>

### **Shimon Perez**

Bagi Menlu Israel, Shimon Perez, kesepakatan Gaza-Jericho tidak lebih dari perwujudan cita-cita dan keimanan pribadinya. Ia selalu menekankan, “Saya lebih percaya lewat dialog daripada berpijak pada ideologi yang statis dalam upaya menyelesaikan suatu persoalan.”

Shimon Perez lahir di Wieniawa, Polandia (sekarang Vishneva di Belarusia) 2 Agustus 1923. Ia lahir dengan nama akhir asli Persky. Pada tahun 1934, semasa masih kecil, ia pindah ke Tel Aviv (Israel) bersama keluarganya. Ia bersekolah di Sekolah Geula di Tel Aviv dan sekolah pertanian di Ben Shemen. Shimon Perez seorang penggagas kesepakatan perdamaian dengan Palestina pada tahun 1990-an. Ia bermigrasi bersama keluarganya di suatu tempat yang sekarang dikenal sebagai negara Israel pada 1934) adalah politikus Israel, mantan perdana menteri, dan wakil perdana menteri.

Perez tercatat sebagai anggota dan kemudian memimpin Partai Buruh dari tahun 1950-an hingga Desember 2005. Setelah itu, ia beralih dan mendukung partai baru bernama Partai Kadima. Ia terpilih di Parlemen (Knesset) pada Maret 2006 sebagai anggota dari Partai Kadima. Sejak 4 Mei 2006, ia menjabat sebagai Menteri Pembangunan untuk Negev, Galilea, dan Ekonomi Regional serta Wakil Premier.

Perez tampil kedelapan sebagai Perdana Menteri Israel (1984-1986 dan 1995-1996), Menteri Luar Negeri Israel (2001-2002), dan Wakil

---

<sup>39</sup> Musthafa Abd Rahman., *Jejak-Jejak Juang Palestina : Dari Oslo hingga Intifadah Al-Aqsa*. Jakarta : Kompas, 2002 hal. 10

Perdana Menteri dalam koalisi di bawah kepemimpinan Ariel Sharon pada awal tahun 2005. Pada 1994, Perez memenangi Penghargaan Perdamaian Nobel bersama dengan Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat dalam Peretujuan Oslo. Peres kemudian menang dalam pemilu nasional, sehingga membuat posisinya di Partai Buruh semakin kuat dan tangguh untuk waktu yang tidak terbatas.<sup>40</sup>

Latar belakang lingkungan Eropa Timur menyebabkan Menlu Israel itu dikenal sangat kuat menganut aliran sosialisme dan membuatnya selalu bersikap moderat pula terhadap konflik Arab-Israel. Bahkan ia masih memegang kuat ide pendiri Negara Israel, David Ben Gurion, berupa keharusan Israel menarik diri dari Tepi Barat Sungai Yordan dan Jalur Gaza.

Sebaliknya, Shimon Perez menjadi simbol perjuangan melawan partai-partai sayap kanan Israel. Tahun 1958 Shimon Perez membuat gusar partai kanan karena ia mengadakan kontrak penjualan sejumlah senjata Israel ke Jerman yang masih dianggap pembantai Yahudi di Eropa pada masa Perang Dunia II. Pengabdianannya pun banyak dicurahkan pada upaya pendekatan budaya dan pemikiran Arab-Israel. Maka sekalipun ia memegang peranan kunci dalam perundingan rahasia di Oslo, tetapi harapan sesungguhnya tertuju pada perundingan multilateral yang dianggapnya pembuka jalan kearah terciptanya dunia baru bagi Timur Tengah. Ia kini sedang menyiapkan sebuah buku berjudul Timur Tengah Baru yang akan menyumbang pemikiran tentang bentuk masa depan Timur Tengah. Karena itu bagi Shimon Perez, kesepakatan Gaza-Jericho hanya terminal pertama buat pembangunan kawasan Timur Tengah yang lebih luas lagi.<sup>41</sup>

### **Yasser Arafat**

Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini lahir di Kairo, Mesir, 24 Agustus 1929 – meninggal di Paris,

<sup>40</sup> *id.wikipedia.org/wiki/Shimon\_Peres*. Diakses pada tanggal 3 Juni 2011, pukul 13.05.

<sup>41</sup> Musthafa Abd Rahman., *Jejak-Jejak Juang Palestina : Dari Oslo hingga Intifadah Al-Aqsa*. Jakarta : Kompas, 2002 hal. 12

Perancis, 11 November 2004 pada umur 75 tahun), yang populer dengan nama panggilan Yasser Arafat atau Abu `Ammar, adalah seorang pemimpin Palestina dan seorang penerima Penghargaan Nobel. Semasa hidupnya pernah menjabat sebagai Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Presiden Otoritas Nasional Palestina (PNA), serta merupakan pemimpin partai politik Fatah yang didirikan pada tahun 1959. Arafat menghabiskan sebagian besar hidupnya memerangi Israel untuk memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri bagi Palestina. Awalnya ia menentang keberadaan Israel, namun kemudian berubah pada tahun 1988 ketika ia menerima Resolusi Dewan Keamanan PBB 242.

Menjabat sebagai Presiden Otoritas Palestina sejak tahun 1993 dan terpilih menjabat selama lima tahun pada tahun 1996. Selain sebagai Presiden, Arafat sebelumnya juga telah memimpin PLO sejak tahun 1969. Pada tahun 1994, bersama dengan Shimon Perez dan Yitzhak Rabin Arafat dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian untuk perundingan Persetujuan Damai Oslo tahun 1993.<sup>42</sup>

Bagi Palestina, kesepakatan Gaza-Jericho merupakan puncak upaya penerjemahan sikap kesediaan berkompromi dengan kenyataan-kenyataan baru serta mengorbankan sebagian cita-cita diri. Kepekaan melihat kenyataan baru ditunjukkan Yasser Arafat sewaktu berkunjung ke Perancis tahun 1988. Saat itu, Yasser Arafat dengan tidak ragu-ragu menyatakan, beberapa butir dalam piagam PLO sudah ketinggalan zaman dan tidak berlaku lagi. Tentu saja yang dimaksudkan adalah butir yang berbunyi pembasmian Negara Israel dan batas Negara Palestina mencakup semua tanah Israel.

Penegasan Yasser Arafat tahun 1988 itu diulang kembali pertengahan September 1993 sebagai syarat tercetusnya pengakuan timbal balik PLO-Israel, disusul penandatanganan kesepakatan Gaza-Jericho oleh kedua belah pihak di halaman Gedung Putih di Washington. Tindakan Pragmatis Yasser Arafat itu setidaknya menyebabkan terciptanya dua hal.

---

<sup>42</sup> *d.wikipedia.org/wiki/Yasser\_Arafat*. Diakses pada tanggal 3 Juni 2011, pukul 13.10.

*Pertama*, ia berhasil mengantar rakyat Palestina ke tahap perjuangan di atas secul tanah (Gaza-Jericho) yang baru dibebaskan. Yasser Arafat pada usianya yang genap 64 tahun (24 Agustus 1993) baru dapat mengakhiri masa pengungsiannya dari Negara ke Negara sejak 36 tahun lalu. *Kedua*, Ketua PLO itu tidak saja memberi legitimasi atas keabsahan perjanjian Belfour bulan November 1947 yang membagi Negara Israel dan Palestina, tetapi kemungkinan terciptanya batas-batas Negara Israel lebih luas lagi akibat perbedaan penafsiran terhadap resolusi PBB No. 242 yang menjadi rujukan pada perundingan PLO-Israel berikutnya.<sup>43</sup>

### **Abu Mahzen**

Pandangan dunia tentu saja tertuju pada Abu Mahzen, panggilan akrab Mahmoud Abbas. Anggota eksekutif ini dikenal sebagai salah seorang arsitek perundingan rahasia Oslo. Abu Mahzen yang lahir pada tahun 1935, juga dikenal sangat dekat dengan Ketua PLO Yasser Arafat dan suka bekerja di balik layar. Seorang akademis tangguh yang berhasil meraih gelar doktor dengan disertasi tentang Zionisme dari Universitas Moskow pada akhir tahun tujuh puluhan. Keyakinannya sangat kuat, tidak ada penyelesaian konflik Arab-Israel tanpa ada dialog langsung PLO-Israel, membuat ia sejak tahun 1970-an membina hubungan tidak resmi dengan tokoh-tokoh Israel terutama yang beraliran kiri.

Pertemuan Abu Mahzen dengan tokoh Israel semula banyak dilakukan di Praha, Cekoslowakia. Cara pendekatan Abu Mahzen yang cenderung berbeda dari tokoh-tokoh Palestina lainnya terus berkembang bahkan beberapa pertemuan rahasia juga berlangsung di kota-kota Eropa Barat. Puncaknya adalah pertemuan rahasia Oslo-Norwegia. Upaya Abu Mahzen yang dirintis sejak hampir dua dekade ini baru mendapatkan hasilnya pada hari Senin 13 September 1993 di halaman Gedung Putih, Washington, yakni penandatanganan kesepakatan Gaza-Jericho yang dilakukan sendiri anggota eksekutif PLO yang berpenampilan tenang itu.

---

<sup>43</sup> Ibid.

Abu Mahzen menjadi anggota Fatah, faksi terbesar di tubuh PLO, sejak tahun 1960. Sejak tahun 1983 ia menjadi anggota eksekutif PLO dan ketua Pembina hubungan Arab dan Internasional. Ia praktis menjadi figur andalan dalam perundingan rahasia dengan Israel setelah meninggalnya teman dekatnya Ishaq Shartawi di Portugal tahun 1983<sup>44</sup>.

#### **Ahamad Qurei**

Qurei dilahirkan di AbuDis (dekat Yerusalem) pada tahun 1937 dalam sebuah keluarga yang relatif kaya. Ia bergabung dengan Fatah, organisasi politik dan militer terbesar, yang membentuk Organisasi Pembebasan Palestina, pada 1968. Sebagai seorang bankir, ia menggunakan keahliannya pada 1970-an sebagai direktur cabang investasi asing dan direktur jenderal cabang ekonomi PLO, dan membantu menciptakan organisasi itu salah satu badan yang mempunyai pegawai terbesar di Lebanon. Ia mengikuti Yasser Arafat ke Tunis setelah PLO dipaksa meninggalkan Lebanon. Setelah lebih banyak pimpinan senior PLO meninggal, Qurei pun semakin menonjol dan terpilih menjadi anggota Komite Sentral Fatah pada Agustus 1989.

Sebagai seorang anggota Komite Sentral, Qurei banyak berperan dalam perundingan untuk Persetujuan Oslo. Ia memegang banyak jabatan dalam kabinet Otoritas Nasional Palestina pertama, termasuk Menteri Ekonomi dan Perdagangan dan Menteri Perindustrian. Ia pun bertanggung jawab atas rencana pembangunan wilayah-wilayah Palestina yang diajukan kepada Bank Dunia pada 1993. Ia juga mendirikan dan menjadi direktur dari Dewan Ekonomi Palestina untuk Pembangunan dan Rekonstruksi (PECDAR) pada 1993 untuk menolong mendapatkan uang dari donor-donor internasional. Tak lama kemudian ia dipilih menjadi anggota Dewan Legislatif Palestina dan terpilih menjadi ketuanya pada Maret 2000.<sup>45</sup>

Ahmad Qurei (Abu Alaa), dari kampung Abudis, Tepi Barat adalah tangan kanan Arafat yang dikenal murah senyum dan dekat dengan

<sup>44</sup>Ibid., hal 12

<sup>45</sup>[id.wikipedia.org/wiki/Ahmed\\_Qurei](http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Qurei). Diakses pada tanggal 3Juni 2011, pukul 13.15.

wartawan. Ia disebut calon kuat memegang jabatan menteri urusan ekonomi atau penasihat ekonomi pemerintahan otonomi Palestina. Selama ini Abu Alaa memang bertanggung jawab atas semua badan usaha milik PLO. Ekonomi Palestina ini pada sidang majelis revolusi Fatah yang terakhir di Tunis mendapat kritikan keras lantaran krisis keuangan yang melilit PLO akhir-akhir ini.

Terlepas dari krisis PLO tersebut, Abu Alaa telah diakui berhasil mempertahankan kesehatan badan-badan usaha milik PLO, di saat lembaga-lembaga PLO lain terancam hancur. Beberapa tahun terakhir ini, ia berhasil pula memperkuat pengaruhnya berkat keikutsertaannya dalam perundingan multilateral, serta termasuk anggota perundingan Palestina (di samping Abu Mazen) dalam perundingan rahasia di Oslo-Norwegia, hingga menghasilkan alternatif Gaza-Jericho yang terkenal itu.<sup>46</sup>

### **3.3 Perundingan-Perundingan setelah Kesepakatan Oslo I**

#### **3.3.1 Perundingan di Kairo**

Perundingan yang berlangsung di Kairo merupakan perundingan dari kelanjutan Kesepakatan Oslo I di Washington, dimana pada tanggal 4 Mei 1994, Arafat dan Rabin kembali menandatangani suatu kesepakatan baru di ibukota Mesir yaitu Kairo. Berdasarkan kesepakatan itu, maka sejak 17 Mei 1994 secara resmi mengambil alih otoritas sipil di Jalur Gaza dan Jericho (yang terletak di Tepi Barat sungai Yordan) dari tangan Israel. Pengambil-alihan kekuasaan ini menandai berakhirnya kekuasaan Israel di kedua wilayah tersebut yang sudah berlangsung selama 27 tahun. PLO mengambil alih tanggung jawab atas masalah-masalah perekonomian, pendidikan, perpajakan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan kepariwisataan. Masalah-masalah luar negeri dan keamanan eksternal tetap berada di tangan penguasa Israel.

---

<sup>46</sup> Musthafa Abdr Rahman., *Jejak-Jejak Juang Palestina : Dari Oslo hingga Intifadah Al-Aqsa*. Jakarta : Kompas, 2002 hal. 22

Adapun perjanjian Kairo menetapkan tiga poin penting, yaitu:<sup>47</sup>

1. Israel mempunyai hak veto atas undang-undang atau peraturan lain yang dihasilkan oleh parlemen PLO di Gaza dan Jericho.
2. Para pemukim yahudi akan terus dibiarkan hidup di Gaza dan Tepi Barat tetapi tidak tunduk dibawah undang-undang atau hukum PLO.
3. Para polisi PLO tidak diizinkan menangkap warga Israel atau pemukim Yahudi yang melakukan pelanggaran hukum. Hanya tentara Israel yang berhak menangkap mereka.

Dengan terjadinya peralihan otoritas sipil di Gaza dan Jericho, maka ini bisa dianggap sebagai suatu langkah positif bagi proses perdamaian Arab-Israel.

Ada dua peristiwa yang telah terjadi setelah ditandatanganinya Perjanjian Kairo. *Pertama*, pernyataan Arafat yang disampaikan dalam salah satu ceramahnya di Johannesburg, Afrika Selatan (10 Mei 1994), dimana ia menyerukan pada seluruh umat Islam untuk “berjihad” guna membebaskan kota suci Yerusalem. *Kedua*, penembakan terhadap dua warga Yahudi di kota Hebron yang dilakukan oleh kelompok Hamas pada 17 Mei 1994, atau bertepatan dengan peralihan otoritas sipil di Gaza dan Jericho.

Pernyataan “jihad” Arafat dengan segera menimbulkan reaksi keras baik dari penguasa Israel maupun AS. Rabin langsung mengeluarkan ancamannya untuk menghentikan semua bentuk perundingan dengan pihak PLO yang dengan sendirinya berakibat pada gagalnya seluruh proses perdamaian PLO-Israel yang sudah berlangsung sejak Agustus 1993 itu. Sementara itu Menlu AS selain menyatakan protes keras terhadap pernyataan Arafat, juga menegaskan dukungannya pada sikap Rabin.

---

<sup>47</sup> Tesis Masyrofah, “*Peranan PLO Dalam Proses Perdamaian Israel-Palestina (Studi Tentang Perjanjian Damai Oslo I & II)*”, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 90

Permasalahan tentang “jihad” itu pun segera mereda, setelah Arafat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “jihad” adalah “perjuangan menuju perdamaian”. Israel, seperti dikemukakan oleh Menlu (waktu itu) Shimon Perez, memang kemudian dapat menerima penjelasan Arafat itu. Namun, pernyataan “jihad” Arafat tersebut bisa jadi lebih ditujukan untuk konsumsi dalam negeri, yaitu guna menarik simpati kelompok Hamas yang masih menolak perdamaian dengan Israel.

Jika masalah pernyataan Arafat soal “jihad” kemudian tidak menimbulkan implikasi yang lebih jauh bagi Perjanjian Kairo (kendati kaum garis keras Israel sempat mencemaskannya), maka tampaknya tidak demikian halnya dengan masalah aksi Hamas di Hebron. Aksi ini dipandang sebagai penegasan sikap Hamas yang tetap menentang setiap bentuk kompromi dengan Israel. Tidak lama sesudah kejadian di Hebron itu, misalnya, kelompok Jihad Islam Palestina yang bersekutu dengan Hamas melancarkan serangan terhadap polisi Israel di Eretz, wilayah perbatasan antara Gaza dan Israel.<sup>48</sup>

Situasi tersebut menempatkan PLO dalam posisi yang dilematis. Yaitu, antara tunduk pada tekanan pihak Israel dan AS, atau berkompromi dengan tekanan dari pejuang Muslim Palestina. Jika alternatif pertama yang dipilih, maka bisa terjadi perang saudara antarsesama bangsa Palestina. Sebaliknya, alternatif kedua hampir tidak mungkin dipilih oleh PLO mengingat selama ini mereka terbukti “tidak berdaya” jika harus berhadapan dengan Israel dan AS.<sup>49</sup>

Perjanjian Kairo pada hakikatnya merupakan implementasi dari Perjanjian Oslo I, dan jika ditarik jauh ke belakang lagi ia merupakan kelanjutan dari Perjanjian Camp David (1978-1979). Ketiga perjanjian itu, seperti diketahui, dibuat dalam kondisi di mana Israel berhasil menekan AS untuk mendukung posisinya berada dalam posisi yang lebih kuat ketimbang para mitra rundingnya. Akibatnya Israel dapat dengan mudah

---

<sup>48</sup> Riza Sihbudi., *Menyandera Timur Tengah*. Jakarta : Mizan, 2007 hal : 209-210

<sup>49</sup> Ibid.,hal 211

mempermainkan isi perjanjian tersebut. Israel memang sudah bersedia menyerahkan otoritas sipilnya pada PLO, dan negara-negara Uni Eropa sudah menyatakan kesediaan mereka untuk membantu pemerintahan Arafat dalam membangun kembali Gaza dan Jericho. Namun, beberapa persoalan serius menghadang Arafat. Disamping masalah sikap anti-Israel dari Hamas dan kelompok-kelompok Islam Palestina lainnya, maka sikap anti-Arab/Palestina dari kaum pemukim Yahudi militan merupakan tantangan yang serius bagi otoritas sipil PLO di Gaza dan Jericho.

Sebagaimana diungkapkan oleh Faisal Husseini, salah satu pembantu dekat Arafat, "*It is not easy for one who has lived years and years believing he is the master and the others are slaves to suddenly see one of these slaves stop him and ask him for identity card,*"<sup>50</sup> (bahwa tidak mudah bagi kaum Yahudi yang sudah bertahun-tahun menganggap dirinya sebagai "tuan" tiba-tiba harus tunduk pada orang-orang Palestina yang selama ini hanya dianggap sebagai "budak" mereka). Belum lagi dengan adanya sikap penguasa Israel yang masih mengizinkan para pemukim Yahudi untuk memiliki senjata secara bebas, sementara di sisi lain polisi PLO tidak diizinkan menangkap mereka yang melanggar hukum. Jadi, persoalan siapa tunduk pada hukum siapa, menjadi kendala bagi implementasi Perjanjian Kairo.

Masalah *kedua* menyangkut status otoritas PLO itu sendiri. Apa yang diperoleh PLO barulah "otonomi terbatas dan sementara". Kata "sementara" mengandung makna bahwa setiap saat Israel dapat mencabut kembali pemberian otonomi itu jika PLO dipandang tidak mampu. Misalnya, jika PLO kemudian tidak mampu menghentikan aksi perlawanan kelompok Islam Palestina terhadap pasukan pendudukan Israel.

Masalah *ketiga* dan terpenting adalah menyangkut status kota suci Yerusalem. Baik dalam Perjanjian Oslo I maupun Kairo, masalah ini tampaknya sengaja diabaikan. Padahal bagi mayoritas bangsa Palestina

---

<sup>50</sup> Riza Sihbudi., *Menyandera Timur Tengah*. Jakarta : Mizan, 2007 hal. 212.

dan Dunia Islam pada umumnya, status Yerusalem merupakan salah satu inti persoalan di Timur Tengah. Di sisi lain, Israel berulang kali menegaskan penolakannya untuk membicarakan apalagi mengembalikan Yerusalem. Karena mereka tidak mau mengubah kontribusi bagi perdamaian di kawasan Timur Tengah.<sup>51</sup>

### 3.3.2 Perundingan Oslo II

Kesepakatan ini ditandatangani di Washington DC pada tanggal 28 September 1995, masing-masing oleh Presiden PLO Yasser Arafat, PM Israel Yitzhak Rabin, dan dilaksanakan oleh Bill Clinton. Menurut kesepakatan ini Israel harus menyerahkan 90 persen daerah Tepi Barat yang berpenduduk sekitar satu juta warga Palestina, yang berarti memperluas wilayah otonomi Palestina ke tujuh kota dan ratusan desa di Tepi Barat. Selain itu, Kesepakatan Oslo II ini juga berisi mengenai penarikan mundur Israel dari beberapa kota di Tepi Barat, yaitu Bethlehem, Jenin, Nablus, Qalqilyah, Ramallah, dan Tulkarem dan 450 desa pada akhir 1995. Israel tetap memegang kontrol atas wilayah pemukiman Yahudi dan instalasi militer. Mengenai status kota Hebron akan dibahas pada negosiasi tahap berikutnya.<sup>52</sup>

Setelah penandatanganan Kesepakatan Oslo II, Palestina dan Israel membicarakan perundingan mengenai status kota Hebron. Perundingan ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang ditanda tangani oleh Yasser Arafat dan Shimon Perez dan salah satunya mengenai penarikan pasukan Israel dari kota Hebron pada bulan September tahun 1995 di Taba.

Selain itu, kesepakatan Kota Hebron yang telah ditanda tangani Arafat-Perez menegaskan, Hebron merupakan kota satu kesatuan, meskipun pemegang otoritas keamanan atas kota itu dibagi ke dalam wilayah H1 yang merupakan 80 persen dari luas keseluruhan kota Hebron berada di bawah kontrol Palestina sepenuhnya, baik sipil maupun

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> Lihat "Perdamaian Tidak Mudah Dicapai", Koran Kompas, 24 Oktober 1998

keamanan. Sedangkan di wilayah H2 yang merupakan 20 persen dari luas kota Hebron, kontrol keamanan dipegang Israel dan otoritas sipil tetap dipegang Palestina.

Akan tetapi, baik Kesepakatan Oslo II dan Kesepakatan Kota Hebron mempunyai kelemahan dalam masalah tidak memberi batasan wilayah yang tegas terhadap wilayah C, tidak seperti halnya wilayah A (kota-kota Palestina) dan B (pedesaan Palestina). Dokumen Kesepakatan Oslo II yang ditandatangani di Taba dan Washington bulan September tahun 1995, terdiri dari 314 halaman.

Pada halaman 15, bab XI, butir 3 ditegaskan, wilayah C adalah wilayah di Tepi Barat selain wilayah A dan B. artinya wilayah C adalah jalan-jalan yang menghubungkan antarkota dan desa Palestina, serta tanah pemerintah/waqaf (tanah tak bertuan versi Israel), pusat lokasi militer Israel dan kompleks pemukiman Yahudi.<sup>53</sup>

Kelemahan Kesepakatan Oslo II itu tampaknya sama-sama dipahami oleh Israel dan terutama Palestina. Sebab itu, Yasser Arafat bersikeras meminta surat jaminan AS sebagai syarat kesediaannya menandatangani protokol Kesepakatan Hebron. Namun demikian, pelaksanaan protokol Kesepakatan Hebron khususnya yang menyangkut sejauh mana penarikan pasukan Israel dari wilayah C di Tepi Barat, masih ibarat bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan mengancam ambruknya perdamaian di Timur Tengah.

Beberapa hal yang patut dicatat dari Perjanjian Oslo II adalah

1. Perjanjian itu merupakan suatu langkah yang positif, paling tidak bagi tiga pihak Yasser Arafat dan pendukungnya, pemerintah Partai Buruh di Israel dan pemerintah Bill Clinton di AS. Namun, oleh karenanya, kelangsungan “nasib” perjanjian pun sangat tergantung pada Arafat, Rabin, dan Clinton.

---

<sup>53</sup>Musthafa Abd Rahman., *Jejak-Jejak Juang Palestina : Dari Oslo hingga Intifadah Al-Aqsa*. Jakarta : Kompas, 2002 hlm : 102

2. Penandatanganan Perjanjian Oslo II menunjukkan adanya semacam paradoks, di mana PLO dalam posisi yang lemah, dan sebaliknya dengan Israel dan AS. Karenanya, implementasi perjanjian itu bergantung pada kemauan politik pihak Israel dan AS.
3. Aspek ekonomi-politik. Kemampuan Arafat dan para pendukungnya dalam melaksanakan rekonstruksi infrastruktur sosial-ekonomi di Gaza dan Tepi Barat. Dalam hal ini tetap diragukan kesungguhan negara-negara donor dalam membantu pembangunan ekonomi di tanah Palestina sebagaimana yang pernah mereka janjikan pada Arafat sesuai penandatanganan Perjanjian Oslo I dua tahun sebelumnya. Sampai ditandatangani Perjanjian Oslo II, ternyata janji itu tetap tinggal janji. Padahal Arafat harus berpacu dengan waktu. Artinya, banyak warga Palestina yang semula mendukung perdamaian dengan Israel kemudian berbalik menentangnya, karena tidak kunjung merasakan “nikmatnya” perdamaian, dalam bentuk perbaikan nasib dan peningkatan kesejahteraan.
4. Berkaitan dengan posisi Suriah. Dalam kamus politik dunia Arab masih berlaku moto “tidak ada perang tanpa Mesir, tidak ada perdamaian tanpa Suriah”. Makanya kira-kira demikian, tidak akan pernah terjadi suatu perang besar antara Arab dan Israel tanpa melibatkan Mesir. Mesir memang masih dipandang sebagai negara Arab terkuat secara militer. Sebaliknya, perdamaian Arab-Israel pun akan sulit terwujud tanpa melibatkan Suriah. Kendati secara militer tidak mampu mengalahkan Israel, namun Suriah memiliki kemampuan sebagai “pengganggu” maupun “perintang” perdamaian Arab-Israel. Hal ini, antara lain, karena Suriah di bawah Hafiz Al-Asad menjadi “kiblat” bagi sementara kaum “radikal” Arab. Oleh sebab itu, salah satu ujian yang sebenarnya dari misi perdamaian AS di Timur Tengah adalah sejauh mana mereka mampu membujuk Suriah untuk berdamai dengan Israel. Jika Suriah sudah melakukannya, maka Lebanon pun secara otomatis akan mengikuti jejak “saudara tuanya” itu. Dalam

perkembangannya, AS selalu gagal untuk mewujudkan perdamaian Suriah dan Israel.

5. Persepsi tentang perjanjian damai itu sendiri. Sampai disepakatinya Perjanjian Oslo II, kedua pihak masih memiliki perbedaan persepsi yang cukup tajam. Bagi Arafat, misalnya, perjanjian itu berarti sebuah langkah awal menuju Negara Palestina Merdeka, namun, bagi pihak Israel, perwujudan Negara Palestina Merdeka hanyalah “mimpi”. Yang ada dalam benak para pemimpin Israel bukanlah sebuah negara Palestina Merdeka, melainkan negara Palestina yang berkonfederasi dengan kerajaan Yordania.<sup>54</sup>

### 3.3.3 Peristiwa Kematian Yitzhaq Rabin setelah Perjanjian Oslo II

Pada November 1995 terjadi dua peristiwa yang sangat mengejutkan di kawasan Timur Tengah setelah proses Perjanjian Oslo II yang ditandatangani pada tanggal 28 September 1995, yaitu yang pertama peristiwa terbunuhnya Perdana Menteri Israel Yitzhaq Rabin pada 4 November tahun 1995 dan terjadinya ledakan bom mobil yang menewaskan sedikitnya enam orang (termasuk empat tentara Amerika) di Riyadh, Arab Saudi, 13 November 1995. Kedua peristiwa tersebut menjadi indikasi meningkatnya kembali politik kekerasan di kawasan Timur Tengah yang sebelumnya dipenuhi berbagai harapan dengan adanya Perjanjian Oslo I dan Oslo II.

Peristiwa kematian Yitzhaq Rabin merupakan peristiwa yang sangat mengejutkan karena baru saja Rabin beserta Yasser Arafat dan Shimon Perez menerima hadiah nobel perdamaian 1994. Selain itu, peristiwa ini merupakan tragedi yang pertama kali dalam sejarah Israel, dimana seorang pemimpin dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Disamping itu, tewasnya Rabin sekaligus juga memunculkan sejumlah ironi.<sup>55</sup>

*Pertama*, kematian Rabin mencerminkan adanya ironi dalam sistem keamanan Israel. Tidak diragukan lagi, Israel dikenal luas memiliki

<sup>54</sup> Riza Sihbudi., *Menyandera Timur Tengah*. Jakarta : Mizan, 2007 hal. 213.

<sup>55</sup> Ibid.,hal 215

dinas intelijen yang sangat tersohor di dunia, yaitu Mossad. Kehebatan Mossad, antara lain, terlihat dari operasi-operasi yang dilancarkannya guna menumpas musuh-musuh Israel, seperti beberapa tokoh “fundamentalis” Palestina dan Lebanon. Karena begitu canggihnya kinerja Mossad, sampai-sampai muncul *joke* di Timur Tengah bahwa Mossad tahu persis apa warna celana dalam yang dipakai para pemimpin Arab. Kehebatan dinas keamanan Israel juga terlihat dari tidak sedikitnya negara dunia ketiga yang mendatangkan penasihat di bidang keamanan dari negeri Yahudi ini. Negara-negara seperti Singapura dan Taiwan termasuk di antara yang memanfaatkan jasa pelayanan keamanan dari Israel.

Akan tetapi, kehebatan dan kecanggihan dinas keamanan Israel yang begitu disegani pihak lawan maupun kawan (AS sebagai sekutu terdekatnya pun sering menjadi sasaran operasi dinas rahasia Israel), seakan-akan tinggal mitos belaka. Dinas keamanan Israel ternyata hanya hebat di luar, tapi rapuh di dalam negerinya sendiri. Barangkali tidak sedikit warga dunia yang masih belum bisa percaya, bahwa apa yang dilakukan Yigal Amir (yaitu menembak dengan jarak dekat kearah seorang perdana menteri) bisa terjadi di negara seperti Israel, yang notabene menempatkan aspek keamanan sebagai prioritas paling utama.

*Kedua*, kematian Rabin ditangisi dan disesali banyak kalangan. Setidaknya ini terlihat dari kehadiran puluhan tokoh dunia termasuk dari sejumlah negara Arab dalam prosesi pemakaman jenazah Rabin di Yerusalem, dua hari sesudah ia ditembak mati. Namun, ironisnya, banyak juga kalangan yang menyambut gembira kematian Rabin. Mereka tentu saja, adalah lawan-lawan politiknya, baik di dalam maupun di luar Israel, seperti kaum “fundamentalis” Israel dan Palestina beserta para pendukung dan simpatisan mereka. Yang lebih ironis, kendati mereka sama-sama menyambut gembira kematian Rabin, namun justru mempunyai alasan yang bertolak belakang. Kaum “fundamentalis” Israel menilai Rabin sebagai seorang yang telah “mengkhianati” ajaran agama Yahudi, karena kesediaannya menyerahkan kembali (sebagian) wilayah Tepi Barat Sungai

Yordan kepada bangsa Palestina. Dalam terminologi Yahudi, wilayah Tepi Barat disebut sebagai “Yudea dan Samaria”, bagian dari “tanah yang dijanjikan” (The Promised Land) seperti tercantum dalam kitab suci milik umat Yahudi.

Sebaliknya, bagi kaum “fundamentalis”<sup>56</sup> Palestina (juga Lebanon), Rabin dipandang tidak lebih dari seorang “teroris” yang tidak pernah berhenti menciptakan penderitaan panjang bagi bangsa Palestina dan Lebanon. Dimata mereka, Rabinlah yang atas nama “perdamaian” telah berhasil membuat Arafat dan PLO bertekuk lutut di depan Israel. Terlepas dari sejumlah ironi yang menyertai kematian Rabin, orang pun mulai meragukan nasib proses perdamaian Palestina-Israel yang disponsori Amerika Serikat. Sulit dipungkiri, bahwa konseptor sebenarnya yang berada di belakang ide-ide “berani” Rabin tidak lain dari Shimon Peres. Menlu Israel yang kemudian sempat menggantikan posisi Rabin sebagai Perdana Menteri ini dikenal cukup konsisten dalam mewujudkan gagasan “*land for peace*” (menukar tanah untuk perdamaian). Bahkan sewaktu Rabin sendiri masih menjadi bagian dari kubu garis keras.<sup>57</sup>

### **3.4 Dampak bagi Masyarakat di Palestina serta Peristiwa yang Terjadi setelah Kesepakatan Oslo I dan II**

Kesepakatan Oslo I dan II secara umum memiliki arti yang penting bagi berdirinya negara Palestina. Karena hasil dari kedua kesepakatan tersebut memberikan hak-hak otonom terhadap wilayah-wilayah di Palestina serta penarikan pasukan Israel yang khususnya berada di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

<sup>56</sup> Dalam buku Steve Bruce. 2000. *Fundamentalisme*. Pertautan Sikap Keberagaman dan Modernitas. Jakarta, Erlangga. Fundamentalisme adalah sebuah gerakan dalam sebuah aliran, paham atau agama yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas (fondasi). Karenanya, kelompok-kelompok yang mengikuti paham ini seringkali berbenturan dengan kelompok-kelompok lain bahkan yang ada di lingkungan agamanya sendiri. Mereka menganggap diri sendiri lebih murni dan dengan demikian juga lebih benar daripada lawan-lawan mereka yang iman atau ajaran agamanya telah "tercemar". Kelompok fundamentalis mengajak seluruh masyarakat luas agar taat terhadap teks-teks Kitab Suci yang otentik dan tanpa kesalahan. Mereka juga mencoba meraih kekuasaan politik demi mendesakkan kejayaan kembali ke tradisi mereka.

<sup>57</sup> Sihbudi, Riza., *Menyandera Timur Tengah*. Jakarta : Mizan, 2007 hal. 216

Dengan demikian, masyarakat Palestina terbebas dari segala intimidasi yang dilakukan pasukan Israel agar mereka keluar dari wilayah-wilayah yang telah mereka tinggali. Selain itu, dengan ditandatangani kedua kesepakatan tersebut berhak menyatakan kemerdekaan Palestina di wilayah-wilyah yang telah disepakati dalam kesepakatan tersebut yaitu Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Kemudian dampak positif dari salah satu hasil Kesepakatan Oslo ini adalah diadakannya pemilu. Dengan pemilu ini masyarakat Palestina dapat bebas memberikan aspirasinya serta memilih anggota dewan yang akan mengurus masalah-masalah pendidikan, kebudayaan, ekonomi, politik dan keamanan. Dan dalam pemilu ini administrasi sipil Israel akan dibubarkan. Namun Israel akan terus bertanggung jawab kepada kemungkinan ancaman dari luar dan terus mempertahankan keamanan dan ketenteraman tempat-tempat pemukiman Israel.

Dari hasil Kesepakatan Oslo tersebut juga memberikan keamanan bagi masyarakat Palestina, karena Israel menarik mundur pasukannya dari wilayah-wilayah Palestina yang telah diberikan otonominya. Kemudian masalah keamanan di wilayah-wilayah otonomi diserahkan kepada otoritas Palestina.

Untuk masalah pengungsi Palestina yang terusir sejak kependudukan Israel di Palestina mendapatkan harapan baru dengan hasil Kesepakatan Oslo ini. Karena hasil dari kesepakatan tersebut membahas tentang pemulangan para pengungsi ke Palestina. Sehingga mereka dapat kembali ke tempat asal mereka di Palestina.

Bagi Israel sendiri keuntungan utama dari Perjanjian Oslo adalah tanggung jawab formalnya untuk kondisi kehidupan dan kesejahteraan di wilayah tersebut, yang penduduknya bertambah dengan cepat, tapi masih sepenuhnya dibawah dominasi pasukan Israel.<sup>58</sup>

Akan tetapi, Kesepakatan Oslo walaupun seintas terlihat memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi masyarakat dan negara Palestina ternyata menimbulkan dampak negatif bagi Palestina. Pada akhirnya masyarakat Palestina mengakui keberadaan Israel di wilayah Palestina yang sebelumnya mereka

---

<sup>58</sup>Jimmy Carter. *'Palestine Peace Not Apartheid' Palestina Perdamaian bukan Perpecahan*. Trans. Khairul Fuad. Jakarta: Dian Rakyat, 2010, hal 176

tentang keberadaan Israel tersebut. Masyarakat Palestina tidak menyadari bahwa dengan mengakui keberadaan Israel di Palestina sama saja dengan mengurangi wilayah Palestina itu sendiri. Karena Israel akan mendapatkan sebagian wilayah Palestina yang seharusnya wilayah tersebut dimiliki Palestina seluruhnya.

Selain itu, pemukiman penduduk Palestina di tepi Barat diratakan dengan menggunakan bulldoser-bulldoser Israel. Sumur-sumur warga di Tepi Barat ditimbun tanah oleh tentara IDF (tentara pertahanan Israel). Sumber-sumber produktif lahan rakyat Palestina juga dirusak oleh bulldoser Catterpillar D9 Israel.

Di Jalur Gaza, jutaan rakyat Palestina menderita kelaparan. Anak-anak menderita kurang gizi. Sumber penghidupan mereka telah dihancurkan oleh Israel. Melalui pemerintahan Mesir, Israel melakukan blokade daratan dari segala lini. Jalur Gaza ini lebih tepat disebut sebagai penjara terbesar sepanjang sejarah umat manusia.<sup>59</sup>

Kemudian Kesepakatan Oslo ini dapat menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat Palestina itu sendiri. Karena diantara masyarakat tersebut terdapat masyarakat yang mendukung Fatah merupakan organisasi pro terhadap Kesepakatan Oslo dan ada yang mendukung Hamas yang secara tegas menolak seluruh Kesepakatan Oslo. Dengan demikian, hal ini akan menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat Palestina. Karena akan terjadi ketegangan diantara dua pendukung yang saling bertolak belakang dalam menyikapi Kesepakatan Oslo ini.

### **3.5 Gerakan-gerakan Garis Keras yang Menolak Kesepakatan Oslo I dan II**

#### **3.5.1 Di Luar Palestina**

Gerakan garis keras Republik Islam Iran merupakan salah satu pengecam keras terhadap Kesepakatan Oslo tersebut. Kesepakatan tersebut menurut Iran dinilai sebagai salah satu kearah pengesahan kekuasaan Israel atas daerah pendudukan. Departemen Luar Negeri Republik Islam Iran mengatakan penentangannya atas negosiasi antara bangsa Arab

---

<sup>59</sup> Anwar.M Aris., *Israel Is Not Real: Negara Fiktif Di Tanah Rampasan*, Jakarta: Rajut Publishing House, 2009. hal 112.

dengan rezim Zionis, ditegaskan pula Iran menolak setiap langkah yang tidak mewakili ideal-ideal bangsa Palestina serta seluruh kelompok pejuang dipungung Palestina. Pernyataan ini merupakan sikap mendukung perjuangan kelompok garis keras Palestina.

Sementara itu, sebuah radio Iran (13 september 1993) mengeluarkan pula pernyataan kecaman terhadap kesepakatan antara PLO-Israel. Radio tersebut mengatakan bahwa kesepakatan Oslo merupakan penghinaan yang lebih besar dibandingkan dengan Kesepakatan Camp David antara Mesir dan Israel. Ditandaskan kemudian kesepakatan tersebut menjadikan PLO sebagai sarana untuk menekan intifadhah serta memberi kesempatan kepada Israel guna melakukan hubungan dengan Arab, Palestinalah yang kalah.

Selanjutnya, suara menentang rujuknya PLO dengan Israel terus menggema dari dalam negeri Iran. Pada tanggal 13 September 1993 sejumlah media masa negeri kaum mullah tersebut secara serentak mengecam kesepakatan saling mengakui antara PLO dengan Israel yang diresmikan Washington tersebut. Menurut mereka, hal itu dapat mengakibatkan luntarnya pengakuan otonomi Palestina oleh dunia Islam dan menodai serta mengkhianati perjuangan bangsa Palestina.<sup>60</sup>

Kemudian pernyataan penolakan terhadap Kesepakatan Oslo juga disampaikan oleh berbagai organisasi dari luar negeri yang membantu perjuangan HAMAS. Di antara organisasi-organisasi tersebut adalah Ikhwanul Muslimin Mesir, Gerakan Dusturiyah Islamiyah Kuwait, Ikhwanul Muslimin Yordania, Jamaat Islami Pakistan, Front Penyelamat Nasional Palestina (FPNF), putra-putri Palestina di Kuwait, Persatuan Islam Palestina di Amerika Utara, Jamaah Ishlah Al Ijtima'I Kuwait.<sup>61</sup>

Selain penolakan dari organisasi dari luar negeri, terdapat juga penolakan dari para ulama dan mufti dari berbagai negara menyatakan

<sup>60</sup> Tesis Kurniady Rudy, *Fundamentalisme Islam : Reaksi Terhadap Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Israel dalam Perjanjian Palestina-Israel (1991-1993)*, Jakarta : 1999. Universitas Indonesia. Hlm : 127

<sup>61</sup> Abu Ridha. *Palestina Nasibmu Kini*. Yayasan SIDIK: Jakarta. 1994, hal 205-218

tidak setuju karena alasan yang hampir sama dengan alasan HAMAS. Di antara ulama yang menandatangani pernyataan tersebut adalah ulama kenamaan Saudi Arabia, Syeikh Abdullah Al-Utsaimin. Ulama lain yang ikut menandatangani adalah Syeikh Hamud ibn Abdullah Al-Tuwaijiri, Salman bin Fadh Al-Audah, Dr. Muhammad Sa'id Al-Qathani.<sup>62</sup>

### 3.5.2 Di Dalam Palestina

Kecaman-kecaman terhadap kesepakatan PLO-Israel datang pula dari beberapa kelompok perjuangan “Garis Keras” serta kelompok perjuangan yang dikatakan sebagai “kelompok Pro Iran”. Kelompok-kelompok seperti Al Jihad dan Hamas. Kelompok-kelompok ini menegaskan bahwa mereka akan terus melanjutkan intifadhah serta menempuh jalan militer untuk melawan zionis Israel.

Sebuah surat kabar harian milik kelompok “Garis Keras”Palestina, *Jomhoori Islami*, mengecam pemimpin PLO, Yasser Arafat. Harian tersebut menegaskan bahwa dengan menyerahkan tanah Palestina kepada kekuatan pendudukan, Arafat dengan rekan-rekannya telah mengkhianati rakyat Islam. selanjutnya harian tersebut menegaskan, maka mereka harus dihukum, dan hukuman bagi pengkhianatan adalah kematian. Ditegaskan pula bahwa perjanjian PLO-Israel merupakan penyerahan diri Palestina kepada Israel dan Amerika Serikat. Selain itu, hal tersebut juga merupakan upaya yang sebenarnya untuk meredam kemungkinan gerakan Palestina yang lebih menggelora. Surat kabar tersebut menulis pula bahwa intifadhah tidak akan pernah surut.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Abu Ridha. *Palestina Nasibmu Kini*. Yayasan SIDIK: Jakarta. 1994, hal 4-9 dan 99-111

<sup>63</sup> *Ibid.*,hal.128.

## BAB IV

### SIKAP HAMAS TERHADAP PERJANJIAN OSLO

Hamis merupakan kelompok garis keras yang didirikan oleh Syaikh Ahmad Yasin (setelah Intifadhah) di Palestina bertujuan untuk berjuang membebaskan tanah Palestina dari Israel. Berbagai upaya dilakukan Hamas untuk mengusir Israel dari tanah Palestina dengan cara melakukan intifadhah, gerakan politik dan propaganda, menggerakkan perlawanan sipil, operasi martir (bom bunuh diri) serta gerakan seni dan budaya<sup>64</sup> yang tujuannya mengajak rakyat Palestina untuk berjuang melawan Israel, dan menolak segala bentuk perjanjian damai antara Israel dan Palestina (diwakili oleh PLO). Salah satu perjanjian damai yang secara tegas tidak disetujui oleh Hamas adalah Perjanjian Damai Oslo I dan II. Penolakan Hamas terhadap perjanjian damai tersebut dilatarbelakangi oleh tidak sesuai antara isi Perjanjian Oslo I dan II terhadap visi dan misi dari pergerakan Hamas yang tertuang dalam Piagam Hamas. Kemudian untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana pergerakan Hamas dalam memperjuangkan Palestina diperlukan mengetahui bagaimana struktur organisasi Hamas.

#### 4.1 Struktur Organisasi Hamas

Hamas merupakan kelompok yang memiliki etos kemandirian. Mereka berusaha mengandalkan potensi yang ada dalam masyarakat sebagai kekuatan inti, dengan mengembangkan solidaritas seluruh penduduk Palestina. Gerakan ini tidak mengharapkan datangnya “bantuan” dari luar sebagaimana sebelum perang 1967, ketika solidaritas Arab masih dapat diandalkan. Perang 1967 merupakan kemunculan peran penting rakyat Palestina dan awal hilangnya dominasi peran negara-negara Arab dalam perjuangan pembebasan Palestina.<sup>65</sup>

Organisasi ini merupakan organisasi paramiliter sekaligus partai politik di Palestina, didirikan tahun 1987. Pendiri Hamas adalah Syaikh Ahmad Yassin,

<sup>64</sup> Tiar Anwar Bachtiar. *Hamis Kenapa Dibenci Amerika?*. Jakarta : Penerbit Hikmah, 2006, hal. 126-134.

<sup>65</sup> Tesis Saud P.Krisnawan. *Peran Hamas dalam Proses Perdamaian Israel-Palestina (1993-1998)*. Jakarta : Universitas Indonesia, hal. 39.

lahir pada tahun 1938 di desa Jaurah, pinggiran Al-Mijdal, Selatan Jalur Gaza. Kemudian mengungsi bersama keluarganya ke Jalur Gaza setelah terjadi perang pada tahun 1948.<sup>66</sup> Hamas berdiri tidak lepas dari Intifadhah I yang terjadi pada tahun yang sama. Sejak itu, Hamas dikenal luas oleh masyarakat internasional berkat perlawanannya terhadap aparat bersenjata Israel.<sup>67</sup>

Salah satu fenomena kelahiran Hamas adalah berhentinya Fatah<sup>68</sup> (salah satu faksi yang mendukung Kesepakatan Oslo) mengantar warga Palestina menuju gerbang kemedekaan. Perbedaan total visi dan sikap politik terhadap Israel tidak jarang menimbulkan konflik bersenjata antara keduanya. Akan tetapi, Fatah tidak bisa merekayasa lagi bahwa Hamas terbukti lebih unggul. Sejumlah program sosial dilakukan oleh Hamas, mulai dari mendirikan rumah bagi penduduk, membangun Rumah Sakit, menciptakan struktur dan infrastruktur pendidikan, hingga perpustakaan di Jalur Gaza dan Tepi Barat.<sup>69</sup>

Sara Roy<sup>70</sup> dari Universitas Harvard mencatat bahwa Hamas menjalankan jaringan pelayanan sosial terbaik di Jalur Gaza, terstruktur dan terorganisir dengan baik. Hamas dipercaya menyalurkan bantuan dan dianggap jauh dari korupsi ketimbang patronase yang ditunjukkan patner nasionalis sekulernya. Lembaga PBB UNRWA ( *United Nations Relief and Works Agency* ), menegaskan bahwa Hamas adalah satu-satunya faksi yang mereka percayai untuk mendistribusikan bantuan pangan kepada masyarakat. Aktivitas-aktivitas semacam itu, di samping

<sup>66</sup> Abdullah Azzam. *Surat Dari Garis Depan: Suara Hati Tokoh Perlawanan*. Solo: Jazera, 2006, hal 33.

<sup>67</sup> Anwar.M Aris., *Israel Is Not Real: Negara Fiktif Di Tanah Rampasan*, Jakarta: Rajut Publishing House, 2009. hal 162-163.

<sup>68</sup> Fatah atau singkatan dari *Harakah Al-Tahrir Al-Wathani Filisthini* (Gerakan Pembebasan Nasional Palestina) didirikan di Gaza oleh anak-anak muda profesional Palestina pada tahun 1954. Para pendirinya antara lain: Yasser Arafat Khalil Al-Wazir, dan Khaled Yashruti. Mereka adalah aktivis-aktivis GUPS (*General Union of Palestinian Study*) antara tahun 1952-1956 di Cairo University. [www.en.wikipedia.org/wiki/Fatah](http://www.en.wikipedia.org/wiki/Fatah)). Diakses pada tanggal 18 Juni 2011 pada pukul 14.00 WIB.

<sup>69</sup> *Ibid.* hal 110

<sup>70</sup> Sara Roy merupakan Ilmuwan Politik dan sarajana dari Amerika Serikat. Dia adalah Senior Research Sholar di Pusat Studi Timur Tengah Di Universitas Harvard. Dia telah melakukan riset lebih dari 100 yang lebih memfokuskan tentang ekonomi Gaza dan riset yang terbarunya tentang gerakan Islam di Palestina. Dia juga mempelajari tentang politik Palestina dan konflik Palestina. [http://en.wikipedia.org/wiki/Sara\\_Roy](http://en.wikipedia.org/wiki/Sara_Roy). Diunduh pada tanggal 11 Mei 2011, pada jam 10.35 WIB.

militansi dan reputasi mereka yang bersih dari korupsi, telah membuat Hamas menjadi oposisi politik utama terhadap Otoritas Palestina.

Hamas bukanlah organisasi orang-orang brutal. Mereka rata-rata adalah orang yang berpendidikan dan berbasis kampus. Abdul Aziz Al-Rantisi misalnya, pengganti Yassin di Jalur Gaza itu berpendidikan pascasarjana kedokteran dari Mesir. Khaled Meshal, pemimpin Hamas di luar negeri, adalah seorang sarjana psikologi. Para pendiri Hamas sebagian besar adalah orang-orang profesional seperti para dokter, ahli farmasi, dan guru.

Dalam buku *Between Jihad dan Salaam: Profiles in Islam*, Ibrahim Ghosheh, salah seorang petinggi Hamas yang bermukim di Amman, Yordania, mengungkapkan kepada Joyce M. Davis bahwa Hamas adalah organisasi yang dibangun dari keimanan dan prinsip. Jika para pemuda disiapkan berdasarkan landasan ini, mereka sangat kuat dan sangat berani. Inilah perbedaan besar antara Hamas dan orang-orang Arafat yang bekerja karena ada dukungan uang.

Hamas mengembangkan struktur organisasi dan kepemimpinan desentralisasi. Jadi, agak mengherankan kalau orang menyangka Hamas akan bergantung pada satu figur pemimpin. Kepemimpinan desentralisasi ini kemudian terbukti merupakan suatu keniscayaan karena seringnya penangkapan dan pemenjaraan terhadap para pemimpin perjuangan Palestina.

Sejatinya, Hamas merupakan gerakan pemikiran dan sosial. Gerakan semacam ini tidak mudah bubar begitu saja jika pemimpinnya tiada. Bahkan, selama ini terbukti, justru dengan kematian pemimpinnya, Hamas semakin populer. Tidak semata-mata mengandalkan anggotanya, Hamas pun lebih ditopang oleh kekuatan rakyat yang mendukungnya baik di Palestina maupun di luar negeri. Hamas merupakan gerakan yang telah mengakar di Palestina dan terpatri dalam kesadaran rakyat Palestina.

Selain itu, Hamas dikenal sebagai faksi atau pihak yang paling dinamis dan efektif. Gerakan Hamas dikenal sebagai sayap dari gerakan Ikhwanul Muslimin. Disebutkan dalam piagamnya bahwa ia menganggap Islam sebagai jalannya yang dijadikan sebagai sandaran ide, konsepsi dan persepsi. Kepada Islamlah gerakan ini berhukum dan darinya meminta jalan keluar dalam

perjalanannya. Sedangkan target utama didirikannya Hamas ini adalah memerdekakan bumi Palestina, mendirikan negara Islam disana, dan menyerukan pendidikan yang universal bagi generasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang diidamkan.<sup>71</sup>

Solidaritas pengikut Hamas sangat tinggi, khususnya ketika menghadapi tekanan dari Israel. Penderitaan salah satu anggota selalu diatasi dengan bantuan anggota lainnya. Ikatan diantara mereka sangat efektif untuk meredam penderitaan yang merupakan resiko dari perlawanan terhadap Israel.

Struktur organisasi Hamas tidak berbeda jauh dengan struktur organisasi Ikhwanul Muslimin. Struktur organisasi berbasis pada pendidikan individu dan keluarga. Untuk melaksanakan aktivitas dilapangan, Hamas membentuk semacam badan pelaksana yang bertanggung jawab langsung kepada majelis syura. Badan pelaksana ini melakukan berbagai aktivitas , seperti dakwah, gerakan-gerakan sosial politik, militer, dan pendidikan.<sup>72</sup>

Dengan demikian, Hamas dalam setiap membahas dan menghasilkan suatu keputusan mengenai persoalan Palestina dilakukan melalui majelis syura. Majelis syura ini secara etimologis, syura berarti permusyawaratan, hal bermusyawarah atau konsultasi. Majelis Syura berarti juga majelis permusyawaratan atau badan legislatif. Istilah *syura* berasal dari kata kerja *syawara-yusyawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata kerja *syawara* adalah *asyara* (memberi isyarat), *tasyawara* (berunding, saling bertukar pendapat), *syawir* (meminta pendapat, musyawarah), dan *mutasyir* (meminta pendapat orang lain). *Syura* atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.

Dalam Islam, *syura* diletakkan sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik dan pemerintahan. *Syura*

<sup>71</sup> Muhammad Saleh Muhsin. *Palestina Sejarah. Perkembangan dan konspirasi*, terj. Tim Comes. Jakarta : Gema Insani Pers, 2002, hal. 104.

<sup>72</sup> Bawono Kumoro. *Hamas: Ikon Perlawanan Islam Terhadap Zionisme Israel*. Bandung : Mizan, 2009, hal 93.

merupakan suatu sarana dan cara memberi kesempatan kepada anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang sifatnya mengikat, baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijakan politik. Setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha menyatakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Namun demikian ihwal pelaksanaan *Syura*, tidak ada *nash* Al-Qur'an yang memberikan paparan detail tentangnya. Nabi Muhammad SAW—yang telah melembagakan dan membudayakan *syura* karena ia gemar bermusyawarah dengan para sahabatnya—tidak mempunyai pola dan bentuk tertentu. Karena itu, bentuk pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan zaman umat Islam.

Dalam prinsip *syura*, pendapat dan keputusan yang dimenangkan bukanlah pendapat mayoritas dari sudut hitungan angka, tetapi mayoritas *hujjah* (argumentasi), logika, pikiran, bukti-bukti dan dalil *syar'i*. Dengan demikian, *syura* merupakan media untuk mengambil suatu ketetapan yang bersandar kepada kebenaran dan dalil *syar'inya*, bukan kepada kekuatan praktisnya (Asy-syawii, 1997:363). Inilah perbedaan yang hakiki antara prinsip *syura* dengan sistem demokrasi.

Konseptualisasi *syura* dalam perkembangannya memberikan kontribusi bagi pengkayaan metodologi dalam proses pengambilan keputusan secara mufakat dalam politik Islam. Namun, konsep *syura* juga memiliki kontribusi besar bagi dialog antara politik Islam dengan demokrasi. Dari sini muncul kesan, musyawarah atau juga *syura* adalah bagian dari konsep penting yang dilahirkan dari peradaban Islam, dan karenanya masyarakat Islam tidak perlu mempertimbangkan "produk" dari luar Islam, apalagi memakainya. Produk "barat" yang selalu disejajarkan dengan *syura* dalam Islam adalah demokrasi.<sup>73</sup>

Keanggotaan Hamas terdiri atas dua jenis keanggotaan, yaitu anggota biasa yang terdiri dari kader-kader yang telah dibina secara khusus dalam berbagai pengkaderan Hamas dan anggota luar biasa yang terdiri dari kaum muslimin pada

<sup>73</sup> [syihabasfa.wordpress.com/.../majelis-syura-alternatif-”demokrasi-islam”/](http://syihabasfa.wordpress.com/.../majelis-syura-alternatif-”demokrasi-islam”/), diakses pada tanggal 25 Mei 2011, pukul 14.10.

umumnya yang menyatakan bergabung dengan Hamas, namun belum dibina secara khusus oleh Hamas. Yang berhak memilih dan duduk dalam kepengurusan Hamas adalah anggota biasa. Sedangkan anggota luar biasa hanya berhak ikut berpartisipasi dalam berbagai kekuatan Hamas.<sup>74</sup>

Struktur mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahap pertama, yang berlangsung 1988-1989, badan pelaksana terdiri dari tiga divisi berikut.<sup>75</sup>

*Pertama*, divisi politik. Divisi ini bertanggung jawab untuk memberikan pernyataan kepada publik, menerbitkan berbagai publikasi, dan menyelesaikan berbagai masalah politik. Divisi ini untuk pertama kalinya dipimpin oleh Syaikh Ahmad Yassin dan Majdi Aqil.

*Kedua*, divisi keamanan. Divisi ini bertanggung jawab mengumpulkan berbagai informasi intelijen mengenai Israel. Para pemimpin divisi ini antara lain Ruhi Musytaha dan Yahya As-Sinwar.

*Ketiga*, divisi militer. Divisi ini bertanggung jawab untuk menggalang kekuatan guna melakukan berbagai kontak senjata dan penyerangan terhadap kelompok-kelompok bersenjata Israel. Divisi ini dipimpin oleh Shalah Sahadah.

Setelah tahun 1989, praktis hanya dua divisi yang diaktifkan, yaitu divisi politik dan militer. Kemudian pada akhir 1990 dan awal 1991 terjadi perubahan mendasar dalam struktur Hamas, mengingat terjadi perubahan strategi perjuangan. Pada tahap ini, struktur Hamas terdiri dari majelis syura, badan pelaksana pusat, dan pelaksanaan teknis khusus. Pada tahap ini, sayap militer tetap dipertahankan dengan diberi nama baru, yaitu Brigade Izzudin Al-Qassam. Sayap militer ini bertanggung jawab kepada badan pelaksana pusat. Pada tahap ini pula peran Brigade Izzudin Al-Qassam sangat dominan mengintai eskalasi konflik bersenjata dengan Israel yang kian meningkat. Posisi Syaikh Ahmad Yassin sebagai pemimpin tertinggi Hamas tetap dipertahankan.

Secara organisasional terbagi kedalam empat sektor, tiga di Tepi Barat dan satu di Gaza, masing-masing dengan struktur kepemimpinan sendiri. Di setiap

<sup>74</sup> Tiar Anwar Bachtiar. *Hamas Kenapa Dibenci Amerika?*. Jakarta : Penerbit Hikmah, 2006, hal. 24.

<sup>75</sup> Bawono Kumoro. *Hamas: Ikon Perlawanan Islam Terhadap Zionisme Israel*. Bandung : Mizan, 2009, hal. 94.

sektor, terdapat kelompok-kelompok dakwah yang terdiri dari orang Islam biasa, sebagaimana pasukan-pasukannya yang mengejutkan, mendirikan sekolah, menanamkan dan memantau standar nasional dan penyebaran bacaan-bacaan keagamaan.<sup>76</sup>

Hamis sebagai sebuah gerakan bawah tanah memiliki sifat rahasia. Mereka mementingkan ketahanan organisasi dalam menghadapi Israel. Untuk menjaga kerahasiaan gerakan, para anggota Hamis diberikan pelatihan khusus dalam menjaga kerahasiaan. Mereka memiliki kode sandi untuk berkomunikasi dengan tokoh-tokoh kunci dan mekanisme untuk menghindari perangkap Israel. Para anggota juga memiliki tata cara untuk menghadapi interogasi, menyampaikan pesan-pesan dalam penjara dan cara menghindari pantauan dinas rahasia Israel.<sup>77</sup>

Para pengikut Hamis mayoritas berasal dari kalangan menengah ke bawah dalam struktur sosial masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang kecewa dengan kondisi kehidupan di wilayah pendudukan dan merasa tidak memiliki masa depan kecuali dengan jalan menciptakan jalan perubahan. Ditengah-tengah orang Palestina yang tertindas itu, Hamis datang membawa harapan baru akan datangnya perubahan dan menawarkan alternatif masa depan yang lebih baik. Mereka yang semula tidak memiliki apa-apa, setelah masuk sebagai pengikut Hamis menemukan harga diri dalam eksistensi dan ikatan kelompok, yang memupuk harapan bersama dengan perjuangan kelompok.

Kemudian para pendukung Hamis adalah warga Palestina yang sudah tidak percaya lagi pada keberhasilan perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh PLO dengan diadakannya perjanjian-perjanjian perdamaian dan konferensi internasional yang membahas masalah Israel-Palestina. Mereka tidak lagi melihat harapan datangnya kemerdekaan Palestina, kecuali dengan melakukan usaha perjuangan sendiri, termasuk dengan jihad.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Malik Fatoni, *Gerakan Islam Politik Di Timur Tengah; Studi Atas Hamis Di Palestina*. Jakarta : Universitas Indonesia, hal. 87.

<sup>77</sup> Ahmad Faozi, *Gerakan Hamis Dalam Perjuangan Kemerdekaan Palestina*. Studi Press, April 1996, hal. 42.

<sup>78</sup> Tesis Saud P.Krisnawan. *Peran Hamis dalam Proses Perdamaian Israel-Palestina (1993-1998)*. Jakarta : Universitas Indonesia, hal. 58.

## 4.2 Cita-Cita dan Tujuan Perjuangan Hamas

Tujuan dan cita-cita perjuangan Hamas tertulis di dalam Piagam Hamas (*The Hamas Covenant*) tahun 1988. Akan tetapi, tujuan perjuangan Hamas ini tidak bisa dipisahkan dari tujuan perjuangan Ikhwanul Muslimin di seluruh dunia, yaitu ingin mewujudkan kekuasaan Islam di seluruh dunia. Namun, dalam konteks Palestina tujuannya lebih bersifat lokal untuk kawasan Palestina yang nantinya akan besinergi dengan gerakan Ikhwanul Muslimin di belahan dunia lain untuk mewujudkan cita-cita besar Ikhwanul Muslimin.

Pada intinya tujuan Hamas didirikan adalah untuk memerdekakan bangsa Palestina, mendirikan negara berdasarkan Islam, dan membangun pendidikan muslim guna mewujudkan cita-cita. Dalam anggapan Hamas, keberadaan Negara Israel harus ditolak karena mereka tidak lebih dari sekedar penjajah di negeri Palestina. Setiap kali serangan zionis Israel dilancarkan, Hamas segera membalas. Ketika serdadu zionis membantai muslim di Mesjid Ibrahim di kota Hebron, mereka juga segera dikejutkan oleh aksi balasan dari Hamas. Kesombongan Israel sejenak terhenti, ketika Hamas berhasil membunuh 70 orang Yahudi dan mencederai 340 lainnya. Aksi-aksi balasan Hamas terhadap kebrutalan serdadu zionis memaksa Israel untuk berpikir dua kali, ketika mereka hendak menekan, mengusir, dan meneror penduduk Palestina.<sup>79</sup>

Adapun cita-cita dan tujuan perjuangan Hamas yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.<sup>80</sup>

### **Tujuan Umum : *Mendirikan Negara Islam di Palestina***

Pada pasal Sembilan Piagam Hamas, Hamas percaya bahwa berdirinya sebuah Negara bagi rakyat Palestina adalah tujuan akhir dari gerakan pembebasan Palestina. Setelah Palestina bebas, maka yang harus terwujud adalah Negara Islam. oleh sebab itu, dengan berbagai cara Hamas mengarahkan seluruh gerakannya untuk mewujudkan Negara Islam di Palestina merdeka. Bagi Hamas, adalah hak rakyat Palestina untuk

<sup>79</sup> Abu Bakar. *Berebut Tanah Suci Palestina*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008, hal 268-269.

<sup>80</sup> Anwar Tiar Bachtiar. *Hamas Kenapa Dibenci Amerika?*. Jakarta : Penerbit Hikmah. 2006, hal. 11.

hidup dalam kemerdekaan dan memerintah diri sendiri dibawah payung Islam yang menjadi agama mayoritas warga Palestina. Tujuan ini, selain disebutkan dalam pasal 9, juga sering kali diulang-ulang dalam berbagai kesempatan.

**Tujuan antara : *Membebaskan Tepi Barat dan Jalur Gaza***

Tepi Barat dan Jalur Gaza dikuasai secara *de facto* oleh Israel setelah kemenangannya atas negara-negara Liga Arab pada perang tahun 1967. Sejak saat itu, Ikhwanul Muslimin yang menjadi cikal bakal Hamas terus berusaha agar kedua wilayah itu kembali ketangan bangsa Arab-Palestina. Saat Hamas berdiri, maka salah satu yang menjadi target perjuangannya adalah membebaskan kedua daerah tersebut.

Sekalipun sudah ditandatangani Perjanjian Oslo atau Perjanjian Gaza-Ariha pertama pada 13 September 1993 antara PLO dengan Israel yang meresmikan berdirinya pemerintahan Otoritas Palestina melalui pemilihan umum dan menyepakati akan diberikannya Jalur Gaza dan Tepi Barat. Sebab, kesepakatan itu justru malah semakin memantapkan kedudukan Israel di wilayah-wilayah Palestina dengan diakuinya secara resmi keberadaan Israel oleh PLO dan kemudian oleh pemerintah Otoritas Palestina. Untuk itu, bagi Hamas Tepi Barat dan Jalur Gaza masih harus terus diperjuangkan. Apalagi, Israel kelihatannya tidak serius dengan kesepakatan itu. Israel masih terus melakukan serangkaian kekerasan terhadap rakyat sipil yang tidak berdosa. Di Hebron, 24 Februari 1994, terjadi pembantaian sadis terhadap warga Palestina yang tengah melaksanakan shalat subuh. Korban meninggal sebanyak 66 orang dan 300 lainnya menderita luka luka.

**Tujuan Strategis : *Memerdekakan Seluruh Tanah Palestina***

Bagi Hamas, tanah milik rakyat Palestina adalah dari Laut Tengah di Selatan sampai sungai Jordan Utara. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Zionis Yahudi sejak tahun 1930-an hingga yang terakhir pada tahun 1967 terhadap beberapa daerah di kawasan itu adalah tindakan penyerobotan. Mereka tidak berhak sama sekali atas daerah-daerah

tersebut, apalagi dengan mengusir penduduk yang sudah sejak lama mendiami daerah-daerah tersebut.

Oleh sebab itulah, Hamas menempatkan pembebasan tanah Palestina sebagai tujuan strategis yang mungkin dicapai dalam jangka waktu cukup panjang mengingat penguasaan Israel atas daerah-daerah itu cukup kuat. Untuk mencapai tujuan ini, berdasarkan Piagam Hamas, harus dilakukan oleh tiga kekuatan yaitu kekuatan rakyat Palestina itu sendiri, kekuatan negara-negara Arab, dan kekuatan seluruh umat Islam. Untuk mewujudkan tujuan itu, rakyat Palestina tidak bisa berjuang sendirian. Oleh karena itu, pada prakteknya Hamas selalu mengedepankan upaya kerja sama dan menjalin dukungan dari seluruh dunia.

#### **Tujuan Segera : *Memantapkan Legitimasi Politik***

Mendapatkan legitimasi politik dari rakyat Palestina sendiri. Tujuan inilah yang mengantarkan Hamas pada berbagai kebijakan politik yang selintas terlihat agak berseberangan dengan gerakan-gerakan radikal yang selama ini dilakukannya. Bagi Hamas, perang bukanlah tujuan utama. Tujuan utamanya adalah terwujudnya Negara Islam di Negara Palestina yang merdeka. Oleh sebab itu, selain gerakan militer, Hamas pun tetap berusaha melakukan gerakan pada ranah politik. Tidak mengherankan bila kemudian Hamas memutuskan untuk ikut dalam pemilu kedua Palestina pada 2006 setelah pada pemilu pertama tahun 1996 tidak ikut dalam pemilu berkaitan dengan masih ditahannya Syekh Yasin. Ini adalah langkah politik yang cukup strategis untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat Palestina.

### **4.3 Sikap Hamas terhadap Perjanjian Oslo I dan II**

Terciptanya kesepakatan Washington (September 1993) yang isinya mengenai disetujuinya pembentukan suatu pemerintahan otonomi sementara di wilayah pendudukan Jalur Gaza dan kota Jericho serta saling mengakui eksistensi masing-masing pihak antara PLO-Israel, ternyata telah menimbulkan reaksi keras masyarakat internasional baik yang bersifat mendukung maupun yang menentang.

Dukungan terhadap terciptanya kesepakatan “Perdamaian” tersebut, seperti diketahui datang dari berbagai negara Barat terutama Amerika Serikat dan sekutunya serta beberapa negara Arab “Moderat”. Sementara itu kecaman terhadap kesepakatan yang dilakukan oleh pihak PLO dan Israel datang dari negara-negara atau kelompok “Garis Keras”, seperti Republik Islam Iran, Libya, Front Rakyat bagi Pembebasan Palestina-Komando Umum (PFLP-GC) dan Hamas.<sup>81</sup>

Dari persepsi kelompok “Garis Keras” Bangsa Palestina, persetujuan tersebut tidak adil karena Bangsa Palestina hanya mendapatkan 2% dari seluruh wilayah Palestina. Persetujuan tersebut pun dinilai bukanlah atas prakarsa Bangsa Palestina, melainkan prakarsa PLO. Sebagai pernyataan sikap ketidaksetujuan terhadap kesepakatan Washington tersebut, kelompok “Garis Keras” menyatakan penolakannya atas hasil-hasil yang disepakati Israel dan PLO serta mengikrarkan untuk terus mengangkat senjata dalam membebaskan seluruh wilayah Palestina. Berkaitan dengan hal tersebut, gerakan intifadhah pun marak kembali.

Mengenai kesepakatan yang tercipta antara PLO dengan Israel. Gerakan Hamas pada konferensi pers yang diadakan pada tanggal 4 September 1993 mengatakan :

“Mereka yang menerima dan loyal terhadap Arafat sebenarnya telah menghancurkan cita-cita PLO secara total. Bagaikan sebuah granat yang meledak ditengah-tengah bangsa Palestina, memporak-porandakan persatuan serta memercik api peperangan saudara yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Gerakan Hamas mengajak seluruh kekuatan faksi yang ada dan masyarakat Palestina pada umumnya untuk berusaha mengadakan konferensi nasional umum guna menghadapi kelompok Arafat dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan masalah ini”.<sup>82</sup>

Sejak awal, Hamas yang merupakan gerakan “Garis Keras” di Palestina sudah mencurigai pertemuan-pertemuan Arafat dengan pemerintah Israel sebelum ditandatanganinya Kesepakatan Oslo. Hamas melihat bahwa kesepakatan itu,

<sup>81</sup> Tesis Kurniady Rudy, *Fundamentalisme Islam : Reaksi Terhadap Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Israel dalam Perjanjian Palestina –Israel (1990-1993)*, Jakarta : Universitas Indonesia, hal. 126.

<sup>82</sup> Tesis Kurniady Rudy, *Fundamentalisme Islam : Reaksi Terhadap Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Israel dalam Perjanjian Palestina –Israel (1990-1993)*, Jakarta : Universitas Indonesia, hal. 126.

sekalipun terlihat sepiintas menguntungkan pihak Palestina karena Jalur Gaza dan Tepi Barat diberikan pada Palestina, namun secara prinsipil Palestina sudah kalah dari Israel. Sebab, secara tidak langsung, Palestina telah mengakui keberadaan negara Israel di bumi Palestina. Kuartet pendukung utama kesepakatan, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, dan PBB, telah merekayasa kesepakatan itu untuk menggiring Palestina agar mengakui keberadaan Israel.

Kesepakatan untuk membuat kesepakatan dengan Israel juga disebabkan Hamas dan berbagai pihak lain yang tidak setuju atas kesepakatan itu melihat ke belakang. Berkali-kali telah dilakukan kesepakatan dengan Israel. Namun, justru Israel yang selalu menjadi biang keladi mentalnya kesepakatan-kesepakatan yang sudah diambilnya sendiri. Saat ditandatangani Kesepakatan Oslo, banyak orang yang sudah menduga bahwa Israel pasti akan tidak serius terhadap Kesepakatan Oslo tersebut. Kesepakatan yang mereka buat hanya akan ada di atas kertas. Seterusnya mereka akan melakukan hal-hal yang menyokong keinginan mereka, yaitu menguasai seluruh wilayah Palestina untuk dijadikan negeri Israel Raya.

Seperti yang sudah diramalkan banyak orang, Israel melanggar kesepakatan yang sudah mereka buat karena Israel tidak pernah serius ingin menarik diri dari Jalur Gaza dan Tepi Barat seperti yang tertera dalam perjanjian. Kemudian pada 25 Februari 1994, di pagi hari yang dingin tentara Israel membombardir warga sipil Palestina yang tengah melaksanakan shalat subuh di sebuah mesjid di kota Hebron. Korban meninggal dan luka-luka bergelimpangan mencapai jumlah yang tidak sedikit. Tercatat 66 meninggal dan 300 orang lebih luka-luka. Peristiwa ini membuat Hamas dan umumnya warga Palestina semakin tidak percaya pada Kesepakatan Oslo. Setelah itu pun berkali-kali terjadi pembantaian biadab yang dilakukan tentara Israel terhadap warga sipil Palestina.<sup>83</sup>

Oleh karena kebijakan pemerintah Israel yang tidak pernah mematuhi hasil-hasil kesepakatan damai, maka rakyat Palestina sudah tidak percaya pada penyelenggara perjanjian-perjanjian damai dan muktamar internasional yang

---

<sup>83</sup> Anwar Tiar Bachtiar. *Hamas Kenapa Dibenci Amerika?*. Jakarta : Penribit Hikmah, 2006, hal. 140

bertujuan untuk terciptanya kemerdekaan Palestina. Hal ini terlihat pada piagam Hamas Pasal 13 yang berbunyi :<sup>84</sup>

*“Berbagai prakarsa dan apa yang disebut sebagai penyelesaian serta muktamar-muktamar (konferensi/kongres) internasional yang diadakan untuk menyelesaikan masalah Palestina adalah bertentangan dengan akidah Hamas. Mengurangi sebagian Palestina sama dengan mengurangi sebagian dari agama (Islam). sebab patriotism Hamas merupakan bagian dari agamanya. Atas dasar inilah para kadernya dibina. Jihad yang mereka lakukan di atas tanah air mereka adalah demi menegakkan panji Allah”.*

Kemudian, menurut Hamas tidak ada alternatif bagi penyelesaian masalah Palestina, kecuali dengan jihad. Semua prakarsa dan muktamar internasional hanyalah membuang-buang waktu dan sia-sia. Bangsa Palestina adalah bangsa yang mulia, tidak akan menerima jika masa depan, nasib, serta hak-haknya disia-siakan dan dipermainkan.<sup>85</sup>

Apabila kita melihat dari visi dan tujuan Hamas tersebut akan bertolak belakang dengan hasil dari Kesepakatan Oslo sehingga Hamas menolak hasil kesepakatan tersebut, seperti :

#### **1. Mendirikan Negara Islam di Palestina**

Pada pasal Sembilan Piagam Hamas, Hamas percaya bahwa berdirinya sebuah Negara bagi rakyat Palestina adalah tujuan akhir dari gerakan pembebasan Palestina. Setelah Palestina bebas, maka yang harus terwujud adalah negara Islam. Oleh sebab itu, dengan berbagai cara Hamas mengarahkan seluruh gerakannya untuk mewujudkan negara Islam di Palestina merdeka. Bagi Hamas, adalah hak rakyat Palestina untuk hidup dalam kemerdekaan dan memerintah diri sendiri dibawah payung Islam yang menjadi agama mayoritas warga Palestina. Tujuan ini, selain disebutkan dalam pasal 9, juga sering kali diulang-ulang dalam berbagai kesempatan.

Hal ini tidak dapat dilakukan oleh Hamas karena dengan menyetujui hasil kesepakatan tersebut berarti Palestina mengakui keberadaan Israel di wilayah Palestina. Sehingga dengan begitu Palestina tidak sepenuhnya bebas menjadi

---

<sup>84</sup> Anwar Tiar Bachtiar. *Hamas Kenapa Dibenci Amerika?*. Jakarta : Penrbit Hikmah, 2006.

lampiran  
<sup>85</sup> *Ibid.*

sebuah negara yang memiliki wilayah yang utuh. Karena Israel secara tidak langsung masih mengontrol wilayah-wilayah di Palestina.

## **2. *Memerdekakan Seluruh Tanah Palestina***

Bagi Hamas, tanah milik rakyat Palestina adalah dari Laut Tengah di Selatan sampai sungai Jordan Utara. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Zionis Yahudi sejak tahun 1930-an hingga yang terakhir pada tahun 1967 terhadap beberapa daerah di kawasan itu adalah tindakan penyerobotan. Mereka tidak berhak sama sekali atas daerah-daerah tersebut, apalagi dengan mengusir penduduk yang sudah sejak lama mendiami daerah-daerah tersebut.

Oleh sebab itulah, Hamas menempatkan pembebasan tanah Palestina sebagai tujuan strategis yang mungkin dicapai dalam jangka waktu cukup panjang mengingat penguasaan Israel atas daerah-daerah itu cukup kuat. Untuk mencapai tujuan ini, berdasarkan Piagam Hamas, harus dilakukan oleh tiga kekuatan yaitu kekuatan rakyat Palestina itu sendiri, kekuatan Negara-negara Arab, dan kekuatan seluruh umat Islam. Untuk mewujudkan tujuan itu, rakyat Palestina tidak bisa berjuang sendirian. Oleh karena itu, pada prakteknya Hamas selalu mengedepankan upaya kerja sama dan menjalin dukungan dari seluruh dunia.

Dalam hal ini Hamas yang memiliki tujuan untuk memerdekakan seluruh tanah Palestina tidak akan tercapai apabila Hamas ikut menyetujui hasil Kesepakatan Oslo. Karena hasil Kesepakatan Oslo dalam salah satu isinya menyatakan bahwa hanya wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diberikan otonomi dan berhak untuk menyatakan kedaulatan negara Palestina sebagai Negara yang merdeka. Hal ini berarti apabila melihat dari tujuan Hamas yang memiliki pandangan bahwa sesungguhnya wilayah Palestina adalah dari Laut Tengah di Selatan sampai sungai Jordan Utara, maka sudah sangat jelas Hamas secara tegas menolak hasil Kesepakatan Oslo I maupun Oslo II. Karena kedua kesepakatan tersebut membuat wilayah Palestina menjadi berkurang.

#### 4.4 Langkah-Langkah Hamas dalam Menolak Perjanjian Oslo

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Hamas yang merupakan salah satu organisasi di Palestina, memiliki pandangan tersendiri mengenai segala perjanjian yang telah dibuat oleh pihak Palestina (diwakilkan oleh PLO) dan Israel yaitu Perjanjian Oslo I dan II. Hamas dengan tegas menolak isi dari kedua perjanjian tersebut. Karena isi dari kedua perjanjian tersebut ternyata tidak sesuai dengan visi dan misi Hamas. Selain itu, Hamas juga tidak percaya dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat Israel. Karena dalam implementasinya Israel sering melanggar dan menunda-nunda segala kesepakatan yang telah dibuat. Berbagai upaya dilakukan Hamas untuk menggagalkan segala bentuk kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Pihak otoritas Palestina yaitu PLO dan Israel.

##### 4.4.1 Melakukan Intifadhah

Intifadhah adalah nama untuk perjuangan yang dilakukan oleh sekelompok orang Palestina yang bersenjatakan batu melawan tentara Israel yang memiliki perlengkapan militer mutakhir. Intifadhah ini merupakan perlawanan rakyat Palestina terhadap hegemoni Israel pada 8 Desember 1987. Kemunculan intifadhah pertama kali dipicu oleh pembunuhan enam orang anak-anak secara biadab oleh tentara Israel. Untuk membalas hal itu para pemuda Palestina yang bersenjatakan batu melakukan perlawanan terhadap tentara-tentara Israel.<sup>86</sup>

Berdasarkan prinsip anti-penjajah Israel, sejak tahun 1987, rakyat Palestina melakukan Intifadhah. Gerakan ini merupakan gerakan yang secara terang menolak Pemerintahan Israel di bumi Palestina yang dilakukan oleh rakyat Palestina. Intifadhah juga menyerukan boikot atas produk-produk Israel dan Amerika. Gerakan ini mendapat dukungan luas dunia internasional terutama dari Pemerintah Iran.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Harun Yahya. *Palestina: Intifadhah dan Muslihat Israel*, Bandung: Dzikra. 2005, hal. 1

<sup>87</sup> Anwar M Aris., *Israel Is Not Real: Negara Fiktif Di Tanah Rampasan*, Jakarta: Rajut Publishing House, 2009. hal 110.

Ada beberapa faktor yang membuat gerakan perlawanan tersebut menjadi begitu fenomenal, di antaranya adalah sebagai berikut.<sup>88</sup>

1. Keberanian mereka menentang pasukan Israel yang dilengkapi berbagai senjata muktahir, sementara senjata mereka hanya berupa batu-batu dan ban-ban bekas. Namun, justru karena hal itulah intifadhah berhasil membangkitkan simpati dunia internasional, khususnya Dunia Islam. perlawanan kaum muda Palestina terhadap pasukan Israel itu bagaikan David melawan Goliath.
2. Kendati hanya bersenjatakan batu-batu dan ban-ban bekas, para pejuang intifadhah sebenarnya dibekali oleh keyakinan agama yang sangat kuat bahwa berjuang melawan kaum zionis adalah bagian dari jihad fi sabilillah dan jika tewas, Tuhan akan langsung memasukkan mereka kedalam surga. Oleh karena itu, para pejuang intifadhah berhasil menempatkan rezim Israel pada posisi yang dilematis. Semakin keras tindakan Israel untuk menumpas intifadhah, semakin keras pula perlawanan yang harus mereka hadapi dan di sisi lain semakin keras juga kecaman dari pembela hak-hak asasi (HAM) dari berbagai penjuru dunia terhadap Tel Aviv. Sebaliknya, jika Israel melunakkan sikapnya, dengan sendirinya gerakan intifadhah akan semakin luas.
3. Pada umumnya, intifadhah dilancarkan oleh para remaja Palestina yang berusia antara 15 sampai 20 tahun. Dengan kata lain, mereka adalah generasi muda Palestina yang tidak secara langsung mengalami masa-masa revolusi perjuangan melawan Israel, baik dalam perang tahun 1948 maupun 1967. Namun, karena sejak lahir tinggal di wilayah pendudukan, mereka justru yang paling merasakan secara langsung berbagai kekejaman yang dilakukan rezim Zionis. Dalam hal ini, mereka jelas lebih menderita dan dipandang lebih berani ketimbang para pejuang PLO yang lebih banyak berjuang dari “luar” dan menjalani kehidupan yang lebih “baik”.
4. Intifadhah telah terbukti memberikan sumbangan terbesar bagi perjalanan sejarah bangsa Palestina, terutama karena keberhasilannya dalam membukakan

---

<sup>88</sup> Riza Sihbudi. *Menyandera Timur Tengah: Kebijakan AS dan Israel atas Negara-Negara Muslim*. Jakarta: Mizan, 2007, hal 36-37.

mata dunia internasional bahwa penderitaan bangsa Palestina di wilayah pendudukan dan kebiadaban para penguasa Israel yang telah berlangsung puluhan tahun tidaklah mungkin dibiarkan berlarut-larut. Apalagi kebangkitan intifadhah terjadi hampir bersamaan waktunya dengan menguatnya gelombang demokratisasi serta advokasi terhadap HAM di segenap penjuru dunia. Mereka yang semula kurang memerhatikan nasib bangsa Palestina, setelah meletusnya intifadhah, kemudian menjadi simpati terhadap perjuangan kaum muda di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Kemudian dalam visi dan misi serta tujuan gerakan Hamas terdapat isi yang menyatakan untuk melanjutkan gerakan intifadhah dalam tujuan antaranya.<sup>89</sup> Dengan demikian, Hamas lebih memilih untuk terus melakukan gerakan intifadhah dalam menekan Israel. Karena Hamas melihat gerakan Intifadhah adalah salah satu cara jihad yang dapat mengantarkan pada tujuan utama, yakni membebaskan seluruh negeri Palestina dari cengkraman kezaliman Israel, bukan dengan sebuah perjanjian yang telah disepakati oleh otoritas Palestina PLO dan Israel yang disebut Perjanjian Oslo.

#### 4.4.2 Menolak Mengikuti Pemilu 1996

Dalam salah satu isi Perjanjian Oslo I 13 September 1993 menyatakan bahwa:

*Pasal III Pemilu  
Rakyat Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza bisa memerintah berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, langsung, bebas dan politik umum, pemilu untuk memilih Dewan di bawah pengawasan yang disepakati.*<sup>90</sup>

Dengan demikian, akan diadakan pemilu pertama di Palestina yang akan diadakan tanggal 13 Juli 1994. Pemilihan umum ini akan memilih Dewan Palestina untuk mengambil alih fungsi dan tugas pemerintah Palestina. Pada waktu itu tentara Israel hanya akan berada di luar pusat-pusat perkampungan Arab.

<sup>89</sup> Anwar Tiar Bachtiar. *Hamis Kenapa Dibenci Amerika?*. Jakarta : Penbit Hikmah, 2006., hal 118.

<sup>90</sup> Lihat pasal-pasal Perjanjian Oslo I diatas

Tetapi yang terjadi adalah Israel seakan menunda-nunda pelaksanaan pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan 13 Juli 1994. Pemilihan umum di Palestina ini baru terlaksana pada 20 Januari 1996 di wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza dan Jerussalem Timur sekaligus untuk pemilihan presiden PNA (*Palestina National Authority*) dan untuk pemilihan anggota PLC (*Palestinian Legislative Council*). Pemilu pertama ini dilaksanakan dalam situasi optimistis akan terciptanya perdamaian antara Palestina dan Israel. Pemilu kali ini sesungguhnya tidak menunjukkan legitimasi yang kuat. Dari sisi representasi, dapat dikatakan bahwa pemilu tersebut tidak cukup memuaskan. Hal ini disebabkan begitu besarnya dominasi Fatah.<sup>91</sup>

Fatah sendiri merupakan partai politik yang mendapatkan dukungan penuh oleh Israel. Karena itu, harapan Israel adalah Pemilu Palestina dapat mengakhiri riwayat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) secara resmi, digantikan oleh pemerintah otonomi Palestina hasil ciptaan Kesepakatan Oslo.

Sedangkan Dewan Legislatif terpilih dalam Pemilu bisa mengakhiri pula keberadaan Majelis Nasional Palestina. Pemilu Palestina kali ini menganut sistem perorangan dan partai. Setiap warga Palestina yang memenuhi syarat undang-undang pencalonan berhak mencalonkan diri sebagai presiden maupun anggota dewan legislatif. Maka Pemilu Palestina kali ini banyak diwarnai pula oleh calon-calon independen yang tidak terikat oleh partai manapun.

Sebagian besar calon independen tersebut berasal dari faksi Fatah yang tidak lolos seleksi dalam pencalonan resmi faksi terbesar Palestina itu. Maka persaingan sesungguhnya terjadi antara calon resmi Fatah dan calon independen yang berasal dari Fatah juga.<sup>92</sup>

Seperti yang sudah diperkirakan, Fatah memperoleh kemenangan mutlak dalam pemilu legislatif. Dari jumlah 88 kursi legislatif yang diperebutkan,

---

<sup>91</sup> Anwar Tiar Bachtiar. *Hamas Kenapa Dibenci Amerika?*. Jakarta : Penerbit Hikmah, 2006, hal. 149.

<sup>92</sup> Musthafa Abd Rahman. *Jejak-Jejak Juang Palestina : Dari Oslo hingga Intifadah Al-Aqsa*. Jakarta : Kompas. 2002 hal. 71.

sebanyak 55 kursi dikuasai oleh Fatah. Sisanya diperoleh calon-calon independen non-partai.<sup>93</sup>

Kemudian dalam pemilu presiden, Yasser Arafat yang sudah sangat lama melintang dalam dunia politik Palestina menang mudah atas lawannya, Samiha Khalil. Ia mengantongi 88,2 persen suara, sedangkan Khalil mendapatkan 11,5 persen. Khalil memang bukan saingan berat bagi Arafat yang sejak lama memimpin Fatah sekaligus PLO dan menjadi presiden PNA sejak pertama kali didirikan tahun 1994.<sup>94</sup>

**Tabel**

Hasil Pemilu Legislatif tahun 1996<sup>95</sup>

No	Nama Partai atau Koalisi Partai	Kursi
1	Fatah	55
2	Independents	15
3	Independent Fatah	7
4	Independent Islamists	4
5	Independent Christians	3
6	Samaritans	1
7	Other	1
8	Vacant	2
	<b>Total</b>	<b>88</b>

Sementara bagi kelompok oposisi Yasser Arafat, penyelenggaraan Pemilu Palestina justru menyulitkan posisi mereka. Disatu pihak, mereka tidak mampu menggagalkan kesepakatan damai Israel-PLO. Di pihak lain, sangat tidak realistis bila mereka terus berada di luar struktur politik Palestina. Apalagi setelah segala

<sup>93</sup> Bawono Kumoro, *Hamis: Ikon Perlawanan Islam Terhadap Zionisme Israel*, Bandung : Mizan, 2009, hal. 102.

<sup>94</sup> Anwar, Tiar Bachtiar, *Hamis Kenapa Dibenci Amerika?*. Jakarta : Penerbit Hikmah, 2006, hal. 150.

<sup>95</sup> Bawono Kumoro, *Hamis: Ikon Perlawanan Islam Terhadap Zionisme Israel*. Bandung : Mizan, 2009, hal.103.

bentuk upaya mereka menggagalkan kesepakatan damai Israel-PLO tidak pernah berhasil.

Pada pertengahan Oktober tahun 1993, kelompok oposisi Yasser Arafat sempat membentuk Front Nasional Demokrasi Islam yang menghimpun berbagai faksi oposan Yasser Arafat baik di luar negeri maupun di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Mereka sempat pula mengeluarkan deklarasi bersama, yakni akan terus berupaya menggagalkan kesepakatan damai Israel-PLO dan memboikot Pemilu Palestina. Namun kabar yang beredar front tersebut terus susut dan akhirnya tenggelam.

Beberapa alternatif pilihan sempat menjadi pertimbangan sebagian oposan Yasser Arafat. Antara lain, akan ikut serta dalam Pemilu tanpa harus turut menjadi anggota dalam lembaga legislative hasil pemilu itu. Sikap ini pernah disampaikan oleh pemimpin spiritual Hamas, Ahmad Yassin, yang mengisyaratkan kemungkinan Hamas ikut serta dalam pemilu tanpa harus terikat dengan kesepakatan damai Israel-PLO.

Sedangkan Front Demokrasi Palestina yang dipimpin Nayef Hawatmeh hanya bersedia ikut pemilu legislatif bukan pemilu administrasi dalam kerangka pemerintahan otonomi. Faksi Hamas sempat mengusulkan pula bisa memperoleh jatah sedikitnya 45 kursi dalam dewan legislatif sebagai keikutsertaan faksi radikal itu dalam struktur politik PLO dan selanjutnya ikut serta dalam pemilu.<sup>96</sup>

Sikap kelompok oposan Yasser Arafat itu akhirnya dipertegas oleh gagalnya dialog rekonsiliasi PLO-Hamas tetap tidak bersedia mengambil jalan kompromi tentang pemilu itu.

---

<sup>96</sup> Musthafa Abd Rahman. *Jejak-Jejak Juang Palestina : Dari Oslo hingga Intifadah Al-Aqsa*. Jakarta : Kompas, 2002 hal. 67.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Konflik antara Israel-Palestina merupakan sebuah konflik yang berkepanjangan yang tidak kunjung usai. Berbagai bentuk perjanjian damai telah dibuat oleh PBB, Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan Mesir untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Akan tetapi, dari segala bentuk perjanjian damai yang telah dibuat, seakan-akan tidak ada yang benar-benar menjadi sebuah solusi bagi terciptanya perdamaian antara Israel dan Palestina. Hal ini terjadi karena dalam implementasinya Negara Israel telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap isi dari setiap perjanjian damai yang telah dibuat. Salah satu bentuk perjanjian damai yang telah dilanggar oleh pihak Israel adalah Kesepakatan Oslo I (13 September 1993) dan II (28 September 1995).

Kesepakatan Oslo I dan II secara umum memiliki arti yang penting bagi berdirinya negara Palestina. Karena hasil dari kedua kesepakatan tersebut memberikan hak-hak otonom terhadap wilayah-wilayah di Palestina serta penarikan pasukan Israel yang khususnya berada di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Dengan demikian, masyarakat Palestina terbebas dari segala intimidasi yang dilakukan pasukan Israel agar mereka keluar dari wilayah-wilayah yang telah mereka tinggali. Selain itu, dengan ditandatangani kedua kesepakatan tersebut berhak menyatakan kemerdekaan Palestina di wilayah-wilyah yang telah disepakati dalam kesepakatan tersebut yaitu Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Kemudian dampak positif dari salah satu hasil Kesepakatan Oslo ini adalah diadakannya pemilu. Dengan pemilu ini masyarakat Palestina dapat bebas memberikan aspirasinya serta memilih anggota dewan yang akan mengurus masalah-masalah pendidikan, kebudayaan, ekonomi, politik dan keamanan. Dan dalam pemilu ini administrasi sipil Israel akan dibubarkan. Namun Israel akan terus bertanggung jawab kepada kemungkinan ancaman dari luar dan terus mempertahankan keamanan dan ketenteraman tempat-tempat pemukiman Israel.

Akan tetapi, Kesepakatan Oslo walaupun sepiintas terlihat memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi masyarakat dan negara Palestina ternyata menimbulkan dampak negative bagi Palestina. Pada akhirnya masyarakat Palestina mengakui keberadaan Israel di wilayah Palestina yang sebelumnya mereka tentang keberadaan Israel tersebut. Masyarakat Palestina tidak menyadari bahwa dengan mengakui keberadaan Israel di Palestina sama saja dengan mengurangi wilayah Palestina itu sendiri. Karena Israel akan mendapatkan sebagian wilayah Palestina yang seharusnya wilayah tersebut dimiliki Palestina seluruhnya.

Kemudian Kesepakatan Oslo ini dapat menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat Palestina itu sendiri. Karena diantara masyarakat tersebut terdapat masyarakat yang mendukung Fatah merupakan organisasi pro terhadap Kesepakatan Oslo dan ada yang mendukung Hamas yang secara tegas menolak seluruh Kesepakatan Oslo. Dengan demikian, hal ini akan menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat Palestina. Karena akan terjadi ketegangan diantara dua pendukung yang saling bertolak belakang dalam menyikapi Kesepakatan Oslo ini. Hamas merupakan salah satu organisasi di Palestina yang menolak terhadap kesepakatan Oslo. Organisasi tersebut adalah kepanjangan tangan dari organisasi Ikhwanul Muslimin yang berada di Mesir. Dalam pendiriannya organisasi ini mempunyai visi, tujuan dan piagam Hamas yang isinya mengenai pandangannya terhadap permasalahan yang ada di Palestina.

Berbagai upaya dilakukan Hamas untuk menggagalkan segala bentuk kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Pihak otoritas Palestina yaitu PLO dan Israel, khususnya pada waktu Kesepakatan Oslo ditandatangani yaitu dengan melakukan Intifadhah. Intifadhah adalah nama untuk perjuangan yang dilakukan oleh sekelompok orang Palestina yang bersenjatakan batu melawan tentara Israel yang memiliki perlengkapan militer mutakhir. Intifadhah ini merupakan perlawanan rakyat Palestina terhadap hegemoni Israel pada 8 desember 1987. Kemunculan intifadhah pertama kali dipicu oleh pembunuhan enam orang anak-anak secara biadab oleh tentara Israel. Untuk membalas hal itu para pemuda

Palestina yang bersenjatakan batu melakukan perlawanan terhadap tentara-tentara Israel.

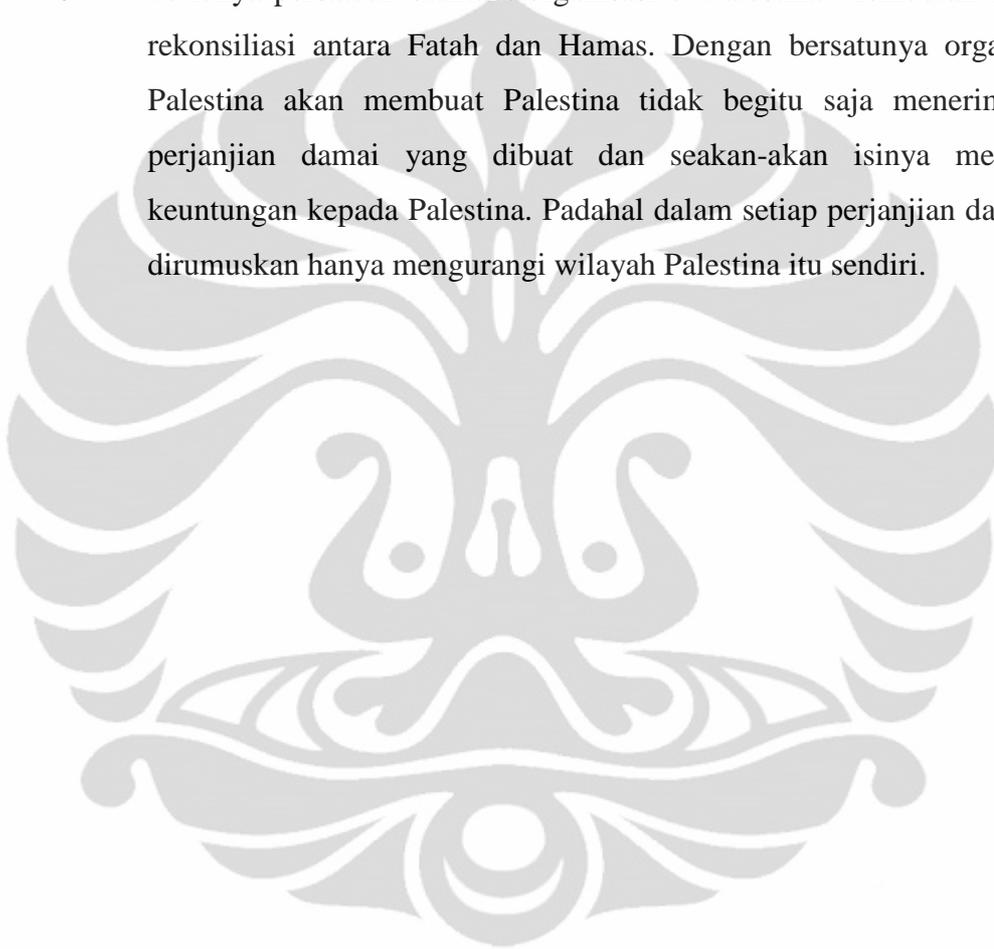
Selain itu, Hamas pada pemilu pertama tahun 1996 yang diselenggarakan di Palestina tidak ikut serta dalam pemilu tersebut. Karena pemilu yang pertama kali diselenggarakan di Palestina itu, merupakan hasil dari Kesepakatan Oslo I (13 September 1993) antara otoritas Palestina dan Israel.

## 5.2 Saran

Beberapa saran yang akan penulis berikan dalam permasalahan perjanjian damai antara Israel-Palestina yaitu perjanjian Oslo I dan II adalah:

1. Hendaknya dalam setiap perjanjian damai yang telah disepakati seperti Perjanjian Oslo I dan II ini dilakukan dengan baik dan sesuai oleh kedua belah pihak tanpa mengulur waktu dalam pelaksanaannya seperti yang sudah tertera dalam butir-butir perjanjian itu.
2. PLO (*Palestine Liberation Organization*) yang merupakan pihak yang mewakili rakyat Palestina dalam perumusan Perjanjian Oslo I dan II agar lebih cermat dalam merumuskan isi dari Perjanjian Oslo I dan II. Karena dari setiap isi Perjanjian Oslo I dan II mempunyai kelemahan dalam masalah waktu yang pasti pada setiap isi-isi perjanjian yang nantinya akan dilaksanakan. Sehingga Israel tidak mengulur waktu dalam pelaksanaan perjanjian damai tersebut.
3. Adanya pengawasan yang ketat dan tegas oleh pihak ketiga yaitu PBB dalam mengawasi setiap pelaksanaan dari perjanjian damai tersebut. Dalam pengawasan tersebut hendaknya PBB tidak terintervensi oleh negara yang secara tidak langsung mendukung setiap kebijakan Israel yaitu Amerika.
4. Dengan adanya pihak ketiga khususnya PBB dalam melakukan pengawasan dalam implementasi perjanjian damai tersebut, pihak Israel maupun pihak Palestina yang melanggar dari butir-butir yang telah ada dalam Perjanjian Oslo I dan II untuk diberikan sanksi.

5. Ada baiknya PLO yang mewakili Palestina dalam perumusan perjanjian damai dengan Israel tersebut untuk merundingkan setiap butir-butir yang akan disepakati kepada setiap organisasi yang ada di Palestina salah satunya Hamas.
6. Perlunya persatuan diantara organisasi di Palestina. Kemudian dilakukan rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas. Dengan bersatunya organisasi di Palestina akan membuat Palestina tidak begitu saja menerima setiap perjanjian damai yang dibuat dan seakan-akan isinya memberikan keuntungan kepada Palestina. Padahal dalam setiap perjanjian damai yang dirumuskan hanya mengurangi wilayah Palestina itu sendiri.



## DAFTAR REFERENSI

- Aris, Anwar. M. *'Israel Is Not Real' Negara Fiktif di Tanah Rampasan*. Jakarta: Rajut Publishing House, 2009.
- Azzam, Abdullah. *Surat Dari Garis depan: Suara Hati Tokoh Perlawanan*. Trans. Abu Musa At-Thayyar. Solo: Jazera, 2006. Trans. *Washiyyatus Syaikh Abdullah Azzam*.
- Bachtiar, Tiar Anwar. *'Hamis Kenapa Dibenci Amerika?'*. Jakarta: Penerbit Hikmah, 2006 .
- Bakar, Abu. *'Berebut tanah Suci Palestina'*. Yogyakarta: Pustaka Madani, 2008.
- Bawono Kumoro. *'Hamis: Ikon Perlawanan Islam Terhadap Zionisme Israel'*. Bandung: Mizan, 2009.
- Boulding, Kenneth E. *Conflict and defense; General Theory*. New York. Harper Torchbooks.
- Bennet A. Leroy, *International Organizations: Principles & Issues*, New Jersey: Prentice Hall inc, 1977.
- Carter, Jimmy. *'Palestine Peace Not Apartheid' Palestina Perdamaian bukan Perpecahan*. Trans. Khairul Fuad. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- '. *'We Can Have Peace In The Holy Land' Merengkuh Perdamaian Di Kota Suci*. Trans. Heri Purwosusanto. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Coser A. Lewis. *The Functions of Sosial Conflict*. New York: Free Press
- Dudung Abdurrahman. *'Metode Penelitian Sejarah'*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2007
- Findley, Paul. *'Diplomasi Munafik Zionis Israel' Mengungkap Fakta Hubungan As-Israel'*. Trans. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 2006. Trans. *Deliberate Deceptions: Facing the Facts about the U.S.-Israeli Relationship, 1993*.
- Holsti, K.J. *'Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Diterjemahkan oleh Wawan Juanda. Bandung: Bina Cipta.
- Harun Yahya. *'Palestina: Intifadhah dan Muslihat Israel'*. Bandung:Dzikra.2005.
- Mitchell, Richard Paul. *'Masyarakat Al-Ikhwan Al-Muslimin' Gerakan Dakwah Al Ikhwan di Mata Cendekiawan Barat*. Penerjemah edisi Arab. Abdus Salam

- Radwwan. Penerjemah. Safrudin Edi Wibowo. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Malik, Maszlee. '*Hamis Daripada Underground Kepada Parti Pemerintah*'. Kuala Lumpur: PTS Millenia, 2009.
- Minderop, Albertine. *Pragmatisme: Sikap Hidup dan Politik Luar Negeri Amerika Serikat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia: 2006.
- Noto Susanto. '*Mengerti Sejarah*'. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986
- Rahman, Musthafa Abd. '*Jejak-Jejak Juang Palestina: Dari Oslo hingga Intifadhah Al-Aqsa*'. Jakarta: Kompas, 2006.
- Ridha Abu. *Palestina Nasibmu Kini*. Yayasan SIDIK: Jakarta. 1994.
- Sihbudi, Riza., *Menyandera Timur Tengah*. Jakarta : Mizan, 2007.
- Saleh, Muhsin M. '*Palestina Sejarah, Perkembangan, dan Konspirasi*'. Trans. Tim Comes. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1994
- Universitas Surabaya. Pusat Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dinamika HAM: Dimensi HAM Dalam Dunia Industri*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002,

### **Tesis**

- Masyrofah, "Peranan PLO Dalam Proses Perdamaian Israel-Palestina (Studi Tentang Perjanjian Damai Oslo I & II)", Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kurniady Rudy, "*Fundamentalisme Islam : Reaksi Terhadap Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Israel dalam Perjanjian Palestina-Israel (1991-1993)*", Jakarta : 1999. Universitas Indonesia.
- Saud P.Krisnawan yang berjudul "*Peran Hamas dalam Proses Perdamaian Israel-Palestina (1993-1998)*". Jakarta : Universitas Indonesia
- Fatoni, Malik, *Gerakan Islam Politik Di Timur Tengah; Studi Atas Hamas Di Palestina*. Jakarta : Universitas Indonesia

### **Artikel**

- , "*Perjanjian Otonomi Palestina; Lebih banyak Pertanyaan ketimbang Jawaban*". Republika. 13 September 1993
- , "*Pasal-Pasal Oslo, Tempo*. 11 september 1993

----, "PLO-Israel, Setelah Perundingan Rahasia", *Tempo*, 11 September 1993  
Muhammad Luthfi Zuhdi. "Menyelesaikan Konflik Palestina", *Koran Republika*, 14 Mei 2008

----, "Perdamaian Tidak Mudah Dicapai", *Koran Kompas*, 24 Oktober 1998

### Situs

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori: Yitzhaq\\_Rabin.](http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Yitzhaq_Rabin)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Shimon\\_Peres.](http://id.wikipedia.org/wiki/Shimon_Peres)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Yasser\\_Arafat.](http://id.wikipedia.org/wiki/Yasser_Arafat)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmed\\_Qurei.](http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Qurei)

<http://id.syahabasfa.wordpress.com/.../majelis-syura-alternatif-”demokrasi-islam”/>  
“Tips dari liputan pemilu Palestina (2),” diakses tanggal 25 Juli 2010 dari <http://www.journalist-adventure.com/?p=97>

[www.en.wikipedia.org/wiki/Fatah.](http://www.en.wikipedia.org/wiki/Fatah)

[http://en.wikipedia.org/wiki/Sara\\_Roy](http://en.wikipedia.org/wiki/Sara_Roy)

[http://en.wikipedia.org/wiki/Ralf\\_Dahrendorf](http://en.wikipedia.org/wiki/Ralf_Dahrendorf)

## Lampiran 1

### PIAGAM HAKAKAH AL-MUQAWAMAH AL-ISLAMİYAH FALASHTIN (HAMAS)

Palestina, 1 Muharram 1409/18 Agustus 1988

Bismillahirrahmanirrahim

*Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kamu, selain dari gangguan-gangguan dan celaan saja. Jika mereka berperang melawan kami pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah). Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.*

*Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. Mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu, karena mereka kafir dan ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan melampui batas.” (QS Ali ‘Imran [3] 110-112).*

*“Israel akan berdiri dan tetap akan berdiri  
Sampai Islam menghancurkannya,  
Sebagaimana telah dihancurkan sebelum ini.”  
(Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna)*

*“Dunia Islam kini sedang terbakar.  
Setiap kali berkewajiban segera menyiramkan air  
Sekalipun sedikit untuk memadamkan api yang bisa  
Dipadamkan tanpa menunggu orang lain.(Syekh Amjad Al-Zahawi).*

## Mukadimah

Segala puji milik Allah. Kami memohon pertolongan, ampunan dan hidayah-Nya. Kami bertawakal kepada-Nya. Semoga salawat dan salam atas Rasulullah SAW., keluarganya, sahabatnya dan berdakwah dengan dakwahnya Waba'dui

Wahai manusia!

Ditengah situasi yang amat kritis, dalam lautan penderitaan, dari denyut jantung orang-orang beriman dan lengan-lengan suci karena wudu; demi melaksanakan kewajiban dan menyambut perintah Allah; lahirlah dakwah. Kemudian terbentuklah komunitas. Dilanjutkan dengan tarbiyah (pembinaan) atas manjab Allah sehingga lahirlah kemauan keras untuk menunaikan tugasnya dalam kehidupan, dengan cara melintasi segala rintangan dan kesulitan yang menghadang di jalan. Akhirnya terbentuklah kesiapan untuk mengorbankan jiwa dan segala yang ada di jalan Allah.

Generasi perintis (pertama) terbentuk sudah. Mereka mulai meretas di tengah samudra cita-cita dan harapan di tengah gelombang penderitaan, rintangan dan tantangan dari dalam dan dari luar.

# **BAB PERTAMA**

## **PENJELASAN TENTANG GERAKAN**

### **1**

#### **LANDASAN PEMIKIRAN**

##### *Pasal Pertama*

*Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyyah (HAMAS):* Islam adalah ;Manhaj-nya; sumber pemikiran, pemahaman dan konsepsinya mengenai alam, kehidupan dan manuswia. Islamlah yang menentukan dan menuntun seluruh tindakan dan langkah gerakan ini.

### **2**

#### **HUBUNGAN GERAKAN PERLAWANAN ISLAM (HAMAS) DENGAN IKHWANUL MUSLIMIN**

##### *Pasal Kedua*

Hamas adalah salah satu sayap dari sayap-sayap Ikhwanul Muslimin di Palestina. Sedangkan gerakan Ikhwanul Muslimin adalah suatu tanzhim (struktur) internasional di samping merupakan gerakan Islam terbesar di masa sekarang. Keutamaan gerakan Ikhwan, ialah memiliki pemahaman yang mendalam dan konsepsi yang sangat rinci dan menyeluruh; meliputi segenap ajaran Islam tentang seluruh aspek kehidupan; menyangkut *tashawwur* dan *I'tiqad*, politik dan ekonomi, tarbiyah (pembinaan) sosial, peradilan dan pemerintahan, dakwah dan pendidikan, seni, dan media massa, masalah gaib dan nyata dan seluruh aspek kehidupan yang lainnya.

### **3**

#### **STRUKTUR KEANGGOTAAN DAN PEMBENTUKAN**

##### *Pasal Ketiga*

Struktur keanggotaan utama HAMAS terdiri atas kaum muslimin yang telah menyerahkan wala' (loyalitas)-nya kepada Allah. Kemudian beribadah kepada-Nya secara benar.

*“Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku,”(QS Adz- Dzariyat [51]: 56).*

Juga mereka yang telah mengetahui kewajibannya terhadap diri, keluarga dan negerinya. Kemudian bertakwalah kepada Allah dalam semuanya itu, serta menebarkan panji jihad di hadapan para tiran, untuk membebaskan negeri dan penduduknya dari kenistaan, kejahatan dan najis mereka.

*“Bahkan kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu melumatkannya, maka dengan serta merta yang batil itu lenyap,...” (QS Al-Anbiya [21]: 18).*

#### ***Pasal Keempat***

HAMAS menyambut setiap muslim yang meyakini aqidahnya, komitmen terhadap manhaj-nya, menjaga rahasia-rahasianya, dan ingin bergabung ke dalam barisan-barisannya untuk menunaikan kewajiban. Kemudian pahalanya terserah kepada Allah.

### **4**

## **DIMENSI WAKTU DAN TEMPAT HAMAS**

#### ***Pasal Kelima***

Dimensi waktu HAMAS: Dengan menjadikan Islam sebagai manhaj kehidupannya, maka gerakan ini merupakan kelanjutan dari Risalah Islamiyah yang pertama para Salaf Al-Shahih; Allah tujuannya, Rasulullah SAW. Qudwahnya, dan Al-Quran dustur (undang-undang)-nya.

Dimensi tempat HAMAS: Meliputi segenap kaum Muslimin yang telah menjadikan Islam sebagai manhaj kehidupannya, di mana saja mereka berada. Dengan demikian gerakan ini berakar ke lubuk bumi dan menjulang tinggi mencapai langit.

*“Tidakkah kamu memerhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik dan cabangnya (menjulang) ke langit pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabbnya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat,”* (QS Ibrahim [14]: 24-25).

## 5

### CIRI KHAS DAN INDEPENDENSI

#### *Pasal Keenam*

HAMAS adalah gerakan Palestina yang lain dari yang lain, ia menyerahkan wala'-nya kepada Allah, menjadikan Islam sebagai manhaj kehidupan, dan berjuang menegakkan panji Allah di atas setiap jengkal bumi Palestina. Sebab hanya di bawah naungan Islam keamanan jiwa terwujud harta, dan hak asasi para pengikut setiap agama dihormati. Jika Islam tidak tampil, maka tumbuhlah pertentangan tersebarlah penindasan dan kerusakan, dan terjadilah peperangan dan pertumpahan darah.

Muhammad Iqbal dalam bait syairnya:

*Tanpa iman tak ada kedamaian*

*Tanpa agama tiada arti dunia*

*Kehidupan tanpa agama*

*Bararti kefanaan berkepanjangan.*

## 6

### UNIVERSITAS GERAKAN HAMAS

#### *Pasal Ketujuh*

Karena kaum Muslimin yang menempuh manhaj HAMAS ini tersebar di seluruh penjuru dunia, di samping mereka berjuang untuk membelanya, menyetujui sikap-sikapnya, dan mendukung jihadnya, maka gerakan ini adalah gerakan universal. Dan memang laik untuk itu, karena kejelasan fikrah-nya, keluhuran tujuannya, dan ketinggian sasarannya.

Atas dasar tersebut, maka gerakan ini wajib mendapat perhatian, penghargaan, dan pengakuan peranannya. Siapa yang mengabaikannya dan enggan mendukungnya atau tidak mengakui peranannya, maka tak ubahnya seperti orang yang menolak takdir. Siapa saja yang tidak mau membuka kedua matanya untuk melihat hakikat, dengan atau tanpa sengaja, maka dia akan tersentak dan tersadar setelah semuanya berlalu, dan tak akan mendapatkan alasan untuk membenarkan sikapnya.

*“Kezaliman dari keluarga dekat lebih perih dirasakan jiwa ketimbang goresan keris India.”*

*“Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain, maka putuskanlah perkara mereka menurut yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat antara kamu Kami berikan aturan dan man sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,” (QS Al-Maidah [5]: 48).*

HAMAS merupakan salah satu dari mata rantai jihad melawan zionis, yang diawali oleh gerakan Asy-Sya Izzuddin Al-Qassam bersama Mujahidin lainnya di Ikhwanul Muslimin pada tahun 1936. Gerakan ini terus berlanjut, disusul oleh gerakan jihad rakyat Palestina, jihad Ikhwanul Muslimin pada perang tahun 1948, dan gerakan jihad Ikhwanul Muslimin pada tahun 1968 atau sesudahnya.

Demikianlah, kendatipun mata rantai jihad ini telah putus oleh rintangan-rintangan yang diletakan ka zionis dan antek-anteknya, namun HAMAS akan

tetap optimis dan menanti terwujud janji Allah betapapun lama masa tersebut.  
Sabda Rasulullah SAW:

*“ Tidak akan terjadi Hari Kiamat sehingga kaum Muslimin memerangi orang-orang Yahudi, (lalu kaum Muslimin membunuh mereka) sehingga orang-orang yahudi bersembunyi di balik tembok, batu-batun, dan pohon; “Hai Muslim, hai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah dia.” Kecuali (yang tidak memberi tahu) pohon Ghaqad karena pohon itu adalah pohon Yahudi,” (HR Bukhari-Muslim)*

7

## **SEMBOYAN HAMAS**

### ***Pasal kedelapan***

Allah tujuannya, Rasulullah qudwah-nya, Al-Quran undang-undangnya, jihad jalannya, dan mati di jalan Allah puncak cita-citanya.

## **BAB KEDUA MOTIVASI DAN SASARAN**

HAMAS mendapati dirinya berada di suatu masa di maa Islam telah lenyap dari realitas kehidupan. Karena itu semua kriteria, ajaran, dan nilai terjungkir balik sedemikian rupa. Sehingga tersebarlah kejahatan, kezaliman, dan kegelapan. Penjajahan negeri dan pengusiran penduduknya secara sadis terjadi dimana-mana. Negara kebenaran tumbang, digantikan oleh negara kebatilan. Tidak ada satupuuun yang tidak beergeser dari posisinya yang benar. Demikian juga Islam jadi surut dari pentas kehidupan, Semua itulah motivasi yang membangkitkan HAMAS.

Adapun sasarannya ialah menumbangkan kebatilan dan menggantinya dengan kebenaran ; mengembalikan negeri-negeri yang dijarah ; mengumandangkan suara azan di menara masjid-masjid pertanda berdirinya

negara Islam mengembalikan manusia dan segala sesuatu kepada posisi yang benar. Allah tempat memohon pertolongan.

*“...Sesungguhnya Allah tidak menolak (keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas alam semesta,” (QS Al Baqarah [2] : 251).*

#### ***Pasal Kesepuluh***

HAMAS, bagaimanapun akan tetap meretas jalannya, membela setiap orang yang tertindas dan menolong setiap orang yang teraniaya. Dengan segenap kekuatan yang dimilikinya, ia tidak akan segan-segan mengukuhkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan dengan perkara dan perbuatan di tempat ini (Palestina, pent.), dan di setiap tempat yang mungkin bisa dicapai.

### **BAB KETIGA**

#### **STRATEGI DAN SARANA**

##### **STRATEGI HAMAS:**

#### **PALESTINA ADALAH TANAH WAKAF ISLAM**

##### ***Pasal Kesebelas***

Hamis meyakini bumi Palestina adalah tanah wakaf Islam kepada segenap umat Islam sampai hari kiamat. Tidak boleh dikurangi sebagian apalagi seluruhnya, atau diserahkan kepada orang lain. Tanah ini tidak boleh dimiliki oleh satu atau raja atau semua raja dan kepala negara. Juga tidak boleh dimiliki oleh satu atau semua organisasi Palestina atau Arab mana pun.

Dikarenakan tanah Palestina adalah tanah wakaf Islam kepada seluruh generasi Islam sampai hari kiamat, maka siapakah yang memiliki hak mewakili seluruh generasi Islam hingga hari kiamat?

Demikianlah hukum negeri Palestina dalam syariat Islam. Demikian pula setiap negeri yang pernah dikuasai oleh kaum Muslim. Karena kaum Muslim telah mewakafkannya kepada segenap generasi Islam sejak dikuasai hingga hari kiamat.

Menurut catatan sejarah, setelah berhasil menguasai Syam dan Irak, para pemimpin militer Islam mengirim utusan kepada khalifah Umar bin Khathab, meminta pendapatnya tentang negeri yang telah dikuasai: apakah penduduknya atau bagaimana?

Setelah diadakan beberapa kali musyawarah antara khalifah Umar bin Khathab dan para sahabat Rasulullah SAW., dicapailah keputusan bahwa negeri itu harus tetap berada di tangan para penduduknya untuk dimanfaatkan dan dikelola hasil buminya.

Tetapi mengenai penguasaan negeri dan negeri itu sendiri kedudukannya adalah wakaf Islam kepada segenap generasi Islam hingga hari kiamat, para penduduknya hanya memiliki hak pemanfaatannya. Wakaf ini tetap berlaku selama bumi menghampar dan langit masih berkembang. Tindakan apa pun yang bertentangan dengan syariat Islam menyangkut negeri Palestina ini adalah tindakan batil dan tertolak.

*Sesungguhnya (yang disebut ini) adalah suatu keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabb-mu Yang Mahabesar. (QS Al-Waqi'ah [56]: 95-96).*

## **TANAH AIR DAN PATRIOTISME DI PALESTINA DALAM PANDANGAN HAMAS**

### ***Pasal Keduabelas***

Patriotisme di Palestina dalam pandangan Hamas adalah bagian dari akidah. Tidak ada patriotisme yang lebih dibutuhkan daripada apabila musuh merampas bumi kaum Muslim. Maka berjihad untuk melawan menjadi *fardhu'ain* atas setiap Muslim dan Muslimah. Wanita boleh berjihad keluar rumah tanpa seizin suaminya dan hamba sahaya pun boleh keluar rumah berjihad tanpa izin tuannya.

Hal seperti ini tidak akan didapatkan dalam sistem manapun selain Islam. Dan hal ini tidak terbantahkan. Jika patriotisme dalam nasionalisme yang beraneka ragam itu berkaitan dengan faktor-faktor material, kebangsaan, dan

geografis, patriotisme Hamas di samping berkaitan dengan sumber ruh dan pemberi kehidupan, seraya menegakkan panji Ilahi untuk menghubungkan bumi dan langit dengan ikatan yang kukuh.

*“Jika Musa datang melemparkan tongkatnya, lenyaplah sihir si penenung itu.”*

*Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah itu. Karena itu, siapa saja yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 256).*

## **USAHA PERDAMAIAN, PRAKARSA DAN MUKTAMAR INTERNASIONAL**

### *Pasal Ketigabelas*

Berbagai prakarsa dan apa yang disebut sebagai penyelesaian serta muktamar-muktamar (konferensi/kongres) internasional yang diadakan untuk menyelesaikan masalah Palestina adalah bertentangan dengan akidah Hamas. Mengurangi sebagian Palestina sama dengan mengurangi sebagian dari agama (Islam). Sebab patriotisme Hamas merupakan bagian dari agamanya. Atas dasar inilah para kadernya dibina. Jihad yang mereka lakukan di atas tanah air mereka adalah demi menegakkan panji Allah.

*... Dan Allah berkuasa atas urusan –Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. (QS Yusuf [12]: 21)*

Telah berkali-kali disebarkan undangan untuk mengadakan muktamar internasional guna menyelesaikan masalah Palestina. Di samping pihak-pihak yang menerima terdapat pula pihak-pihak yang menolak dengan alasan tertentu atau alasan-alasan lainnya seraya menuntut beberapa persyaratan untuk dapat menyetujui dan berpartisipasi dalam muktamar.

Namun, karena melihat pihak-pihak yang terlibat dalam muktamar dan karena menyadari sikap-sikapnya terhadap seluruh permasalahan kaum Muslim pada masa lalu dan masasekarang, Hamas tidak melihat muktamar-muktamar itu akan dapat mewujudkan beberapa tuntutan atau mengembalikan hak-hak yang telah hilang atau memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas.

Muktamar-muktamar itu tidak lain hanyalah salah satu dari bentuk pemaksaan kaum kafir di atas bumi kaum Muslim. Kapankah orang-orang kafir pernah bersikap adil terhadap kaum Muslim?

*Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya). “Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang padamu, Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. (QS Al-Baqarah [2]: 120)*

Tidak ada alternatif bagi penyelesaian masalah Palestina, kecuali dengan jihad. Semua prakarsa dan muktamar internasional hanyalah membuang-buang waktu dan sia-sia. Bangsa Palestina adalah bangsa yang mulia, tidak akan menerima jika masa depan, nasib, serta hak-haknya disia-siakan dan dipermainkan.

### **TIGA CAKUPAN**

#### ***Pasal Keempatbelas***

Masalah pembahasan Palestina berkaitan erat dengan tiga cakupan, yaitu Palestina, Arab, dan Islam. Ketiga cakupan tersebut memiliki kewajiban dan peran tersendiri dalam perlawanan terhadap Zionis. Kesalahan besar jika salah satu dari tiga hal itu diabaikan. Palestina adalah bumi Islam tempat kiblat pertama kaum Muslim, tempat suci ketiga setelah Masjid Al-Haram di Makkah dan Madinah. Masjid Al-Aqsha juga adalah tempat *Isra'* Rasulullah SAW.

*Mahasuci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam hari dari Masjidilqsha yang telah kami berkati sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan) kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS Al-Isra' [17]: 1)*

Dengan demikian, pembebasan Palestina merupakan *fardhu'ain* atas setiap Muslim di mana pun berada. Atas dasar ini pula, setiap Muslim wajib mengetahui dan memerhatikan masalah Palestina.

Jika masalah Palestina diselesaikan atas dasar ini, yang melibatkan seluruh potensi ketiga cakupan tersebut, dan kemenangan pun akan segera tiba.

*Sesungguhnya, dalam hati mereka (keberadaan) kalian lebih ditakuti ketimbang Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. (QS Al-Hasyr [59]: 13)*

## **JIHAD MEMBEBAKANKAN PALESTINA ADALAH FARDHU'AIN**

### ***Pasal Kelimabelas***

Jika ada sebagian bumi kaum Muslim yang dirampas musuh, jihad bagi setiap Muslim menjadi *fardhu'ain*. Dalam menghadapi pendudukan Yahudi atas Palestina ini kita tidak boleh tidak harus mengibarkan panji jihad. Dan, ini memerlukan penyebaran kesadaran Islam (*Al-wa'yu al-Islam*) di kalangan kaum Muslim sejak di peringkat lokal, dunia Arab hingga Dunia Islam. Juga harus mengibarkan semangat jihad di tengah-tengah Dunia Islam dan di tengah-tengah umat, menentang musuh dan bergabung ke dalam barisan mujahidin.

Dalam kegiatan penyadaran ini dituntut partisipasi para ulama, tokoh-tokoh pembinaan dan pendidikan, tokoh-tokoh pers dan media massa, kaum intelektual, dan khususnya para aktivis gerakan Islam dari kalangan muda dan tua.

Juga harus diadakan perubahan mendasar ke dalam sistem-sistem pendidikan dan pengajaran, agar dapat membebaskannya dari *ghazwul fikri* yang

telah disusupkan oleh para orientalis dan misionaris. Sebab, *ghazwul fikri* telah menyerang wilayah tersebut setelah Salahuddin berhasil mengusir tentara Salib.

Kaum Salib menyadari kaum Muslim tidak akan dapat dikalahkan sebelum dilakukan serangan pemikiran yang mengacaukan pemikiran mereka, juga merusak warisan sejarah militer yang notabena merupakan perataan jalan bagi kolonialisasi.

Ketika Alanby berhasil memasuki Al-Quds, ia menyatakan, "*Sekarang perang Salib telah usai*". "Diatas makam Salahuddin, Jenderral Ghorro pernah berkata, "*Sekarang kami telah kembali, wahai Salahuddin*". Kolonialisme memiliki saham yang sangat besar dalam mendukung dan mengembangkan *ghazwul fikri*. Semua ironi merupakan muqaddimah (awal) bagi pencaplokan Palestina.

Masalah Palestina harus dipahami oleh generasi Islam sebagai masalah agama dan harus diselesaikan atas dasar ini. Sebab di dalam Palestina terdapat tempat-tempat suci Islam, yaitu Masjid Al-Aqsha, yang memiliki ikatan yang tak pernah putus dengan Masjid Al-Haram.

*"Menjaga perbatasan sehari di jalan Allah lebih baik daripada dunia seisinya. Tempat (seluas) cambuk seorang di surga lebih baik daripada dunia seisinya. Berpergian seorang hamba di jalan Allah pagi ataupun petang lebih baik daripada dunia seisinya."* (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

*"Demi Zat yang menguasai jiwa Muhammad, sungguh aku ingin berperang di jalan Allah lalu terbunuh lagi, kemudian aku berperang lagi lalu terbunuh, kemudian aku berperang lagi lalu terbunuh lagi."* (HR Bukhari dan Muslim)

## **PEMBINA GENERASI**

### ***Pasal Keenambelas***

Generasi Islam di wilayah kita harus dibina dengan pembinaan yang Islami. Pembinaan yang berupaya melaksanakan kewajiban-kewajiban agama,

mengkaji kitab Allah secara mendasar, mengkaji Sunnah Nabawiyah, menelaah sejarah dan warisan Islam, dan sumber-sumbernya yang terpercaya, dengan pengarahan para ahli dan para ulama, dan berdasarkan kepada manhaj yang mampu membentuk satu *tashawur* (gambaran) yang benar menyangkut pemikiran dan keyakinan.

Di samping itu kita perlu mengadakan pengkajian yang mendalam tentang musuh dan segala kepastiannya (kekuatannya) ybaik yang bersifat material maupun sumber daya manusianya, mengetahui titik-titik lemah dan kekuatannya, dan mengetahui kekuatan-kekuatan yang mendukungnya, juga perlu mengikuti peristiwa-peristiwa kontemporer dan mempelajari analisis-analisisnya. Perlu membuat perencanaan untuk masa sekarang, mendatang, dan mengkaji setiap fenomena yang ada agar setiap Mujahid Muslim mampu hidup pada zamannya dengan penuh kesadaran.

*”Wahai anakku, sesungguhnya jika ada (satu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan (balasan)-Nya. Sesungguhnya Allah Mahahalus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan mencegah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamudari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri”. (QS Luqman [31]: 16-18)*

## **PERANAN WANITA MUSLIMAH**

### ***Pasal Ketujuhbelas***

Wanita Muslimah dalam perjuangan pembebasan memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dari peran kaum lelaki. Wanita berperan sebagai pembentuk kader. Ia berperan besar dalam mengarahkan dan membina generasi. Para musuh telah menyadari peran wanita penting ini sehingga mereka berupaya dan menumbuhkannya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Mereka mengarahkan pertumbuhan kewanitaan seorang wanita jauh dari Islam. Dan, kalau wanita Muslimah tumbuh jauh dari Islam, berarti satu kemenangan bagi mereka.

Karena itu, mereka telah mengarahkan segala upaya untuk mencapai maksud tersebut melalui media massa, film, sistem pendidikan, dan pengajaran, melalui organisasi-organisasi Zionis yang memiliki beraneka ragam baju seperti *Freemasonry*, *Rotary Club*, dan kelompok-kelompok intelijen.

Semua ini merupakan sarana-sarana perusak dan penghancur. Organisasi-organisasi Zionis ini didukung oleh dana fasilitas yang sangat besar sehingga dapat memainkan peranannya di tengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan sasaran-sasaran kaum Zionis dan memperkuat ajaran-ajaran yang memihak musuh. Organisasi-organisasi ini melakukan kegiatannya di lapangan yang tidak tersentuh gerakan Islam secara baik. Karena itu, para aktivis Islam wajib menuanikan peranannya dalam menghadapi makar-makar atau rencana jahat para perusak tersebut. Sebab, bila Islam telah memegang kendali kehidupan, akan sirnalah organisasi-organisasi yang mengancam kemanusiaan dan Islam tersebut.

### ***Pasal Kedelapanbelas***

Wanita Muslimah dalam rumah dan keluarga mujahid, baik sebagai ibu maupun remaja putri, memiliki peran yang paling penting dalam memelihara dan menumbuhkan anak-anak sesuai dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai akhlak yang bersumber dari Islam serta membina anak-anaknya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, guna menyongsong peran jihad yang menanti mereka. Dari sini kita harus memerhatikan madrasah-madrasah dan manhaj-manhaj yang dipakai untuk membina anak-anak wanita Muslimah agar menjadi

seorang ibu yang solehah dan menyadari peranannya dalam perjuangan pembebasan.

Wanita juga harus memiliki kesedaran dan pengetahuan yang cukup untuk mengatur urusan rumah tangganya. Ekonomis dan menjauhi pemborosan dalam pembelanjaan keluarga, termasuk tuntutan untuk melanjutkan perjalanan dalam situasi yang amat krisis. Hendaklah mereka menyadari bahwa kecukupan harta sama dengan darah yang tidak boleh dialirkan, kecuali pada aliran-alirannya demi menjaga kelangsungan kehidupan, baik dalam urusan kecil maupun besar.

## **PERANAN SENI ISLAMI DALAM PERJUANGAN PEMBEBASAN**

### *Pasal Kesembilanbelas*

Seni memiliki aturan-aturan dan kriteria-kriteria tertentu. Melalui kriteria-kriteria tersebut dapat diketahui apakah seni tersebut seni Islami atau *jahili*. Masalah-masalah pembebasan Islam juga memerlukan seni Islami yang dapat membangkitkan semangat, tanpa mengabaikan aspek tersebut secara seimbang dan terpadu.

Manusia adalah ciptaan Allah yang unik, terdiri dari unsur tanah dan tiupan ruh. Karena itu, seni Islami harus “berbicara” kepada manusia atas dasar ini. Sementara itu, seni jahiliah hanya mementingkan aspek tanah.

Buku, makalah, brosur, nasihat surat, nasyid dan qasidah, syair, teater, dan sebagainya, apabila memenuhi karakteristik dan syarat-syarat seni Islami, termasuk mobilisasi pemikiran yang diperlukan dan makna jiwa yang aktual untuk melanjutkan gerakan di samping merupakan “hiburan” bagi jiwa dalam menghadapi perjalanan panjang, penuh beban, dan membosankan. Seni Islami dapat mengusir kejenuhan, mengakibatkan gerak, dan menumbuhkan moralitas yang tinggi pada wanita. Kesemuanya berlangsung dalam keseriusan, karena umat yang sedang berjihad tidak mengenal senda gurau yang sia-sia.

## **SOLIDARITAS SOSIAL**

### ***Pasal Keduapuluh***

Masyarakat Muslim adalah masyarakat yang anggotanya saling merasa senasib sepenanggungan (mutafakil). Sabda Rasulullah SAW., "Kaum yang terbaik adalah kaum 'As'ari. Bila mereka menghadapi masalah serius di luar perjalanan ataupun di dalam perjalanan, mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki. Kemudian membaginya di antara mereka secara sama."

Semangat Islam inilah yang harus mewarnai setiap masyarakat Muslim. Khususnya masyarakat yang sedang menghadapi sebuah musuh yang zalim apalagi penyiksaan fisik. Merampas negeri dan harta kekayaan. Mengejar sampai ketempat-tempat pengungsian. Menembaki wanita dan anak-anak, juga menjebloskan ribuan pemuda ke dalam penjara.

Kekejaman Yahudi ini menimpa semua orang, termasuk wanita dan anak-anak. Mereka menghancurkan mata pencaharian dan harta kekayaan. Menodai kehormatan dan memperlakukan manusia lebih kejam dari perlakuan yang dialami para tawanan perang.

Dalam menghadapi perlakuan keji ini diperlukan adanya solidaritas sosial di kalangan masyarakat. Laksana satu tubuh, jika salah satu anggotanya sakit, seluruh tubuh akan merasakan sakitnya.

### ***Pasal Keduapuluh Satu***

Diantara bentuk solidaritas sosial ialah memberikan kepada setiap orang yang memerlukan, material dan moral, atau berpartisipasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kepada unsur-unsur Hamas diwajibkan memerhatikan kepentingan masyarakat seperti halnya mereka memerhatikan kepentingannya sendiri. Juga diwajibkan atas mereka agar tidak segan-segan mengarahkan segala upaya guna mewujudkan dan memelihara kepentingan tersebut.

Hendaknya mereka mencegah setiap upaya yang ingin mempermainkan segala sesuatu yang memengaruhi masa depan generasi atau akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat mereka. Kekuatannya adalah kekuatan mereka. Masa depannya adalah juga masa depan mereka. Unsur-unsur Hamas harus ikut

merasakan segala suka dan duka masyarakat. Memperjuangkan segala tuntutan masyarakat serta segala sesuatu yang akan mewujudkan kemaslahatan bersama. Bila semangat solidaritas ini telah merata, niscaya ikatan hati akan semakin erat dan terciptalah ta'awun dan tafahum. Selanjutnya, kesatuan dan barisan pun akan semakin kuat dan kukuh untuk menghadapi musuh.

## **KEKUATAN YANG MENDUKUNG LAWAN**

### ***Pasal Keduapuluh Dua***

Sejak lama para musuh telah menyusun program secara rapi untuk mencapai sasarannya. Menggunakan beraneka sarana yang sangat ampuh. Mereka kuasai kekayaan material secara besar-besaran untuk mewujudkan mimpi mereka. Dengan harta, mereka semua dapat menguasai seluruh media massa: radio, penerbitan, surat kabar, majalah, dan lain-lain.

Dengan harta, mereka berhasil meledakkan berbagai revolusi di berbagai penjuru dunia dalam rangka mewujudkan kepentingan mereka. Mereka berada di belakang Revolusi Perancis, revolusi komunis, dan setiap revolusi atau pemberontakan keji yang kita dengar diberbagai tempat.

Dengan harta, mereka bentuk organisasi-organisasi rahasia yang tersebar di segenap penjuru dunia untuk menghancurkan tatanan masyarakat dan mewujudkan impian Zionisme, seperti *Freemasonry*, *Rotary Club*, dan *Lions Club*. Semua itu adalah organisasi-organisasi intelijen yang sangat berbahaya.

Dengan harta, mereka berhasil menguasai negara-negara kolonial dan menggerakkannya untuk menjajah negara-negara lain, agar mereka dapat menguras kekayaan negara-negara tersebut dan menyebarkan kerusakan di kalangan penduduknya.

Berbagai peperangan yang berskala dunia atau lokal terjadi dengan lancar. Mereka pihak yang berada di belakang Perang dunia I, sehingga mereka berhasil menumbangkan negara *Khilafah Islamiyah*. Mengeruk keuntungan dan menguasaia pelbagai sumber kekayaan. Mendapat Deklarasi “Belfour” serta mendirikan Liga Bangsa-Bangsa untuk menguasai dunia. Para Zionis pula yang berada di belakang Perang Dunia II, sehingga mengeruk keuntungan besar dari

perdagangan alat dan senjata perang. Mereka berhasil dalam melicinkan jalan untuk mendirikan negara Yahudi dan berhasil memerintahkan PBB dan Dewan Keamanan sebagai ganti dari Liga Bangsa-Bangsa dan sebagai alat untuk menguasai dunia.

Di setiap peperangan yang berlangsung di mana-mana, Zionis senantiasa berada di belakangnya.

*...setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. (QS Al-Ma'idah [5]: 64)*

Negara-negara kolonial kapitalis di barat dan komunis di timur adalah kekuatan-kekuatan yang mendukung lawan, dengan segenap kekuatan yang mereka miliki, baik berupa sumber daya manusia maupun materi. Dalam sepak terjangnya, mereka saling berganti peran. Tetapi ketika Islam muncul, segenap kekuatan kaum *kuffur* akan bersatu padu dalam menghadapi Islam. Kekafiran adalah satu *millah*.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (kami), jika kamu memahaminya. (QS Ali 'Imran [3]: 118)*

## **BAB KEEMPAT**

### **SIKAP KAMI TERHADAP GERAKAN-GERAKAN ISLAM**

#### ***Pasal Keduapuluh Tiga***

Hamis memandang gerakan-gerakan Islam lainnya dengan penuh penghormatan dan penghargaan. Kalaupun ia berada dengan gerakan-gerakan tersebut mengenai satu aspek dan pandangan, tetap lebih banyak kesamaan di antara mereka dan Hamis. Hamis memandang gerakan-gerakan tersebut, jika didorong dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah, sebagai satu ijtihad,

selama tindakan-tindakannya masih berada dalam batas-batas kawasan Islam. Tiap mujtahid memperoleh bagiannya.

Hamis memandang gerakan-gerakan Islam yang ada sebagai “deposito” baginya. Semoga Allah memberikan hidayah dan bimbingan kepada semua pihak. Hamis tidak akan bosan-bosan mengangkat panji persatuan dan bersungguh-sungguh mewujudkannya atas dasar Al-Quran dan sunnah.

*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (QS Ali ‘Imran [3]: 103).*

#### ***Pasal Keduapuluh Empat***

Dan Hamis tidak menoleransi sikap mencela atau “menyerang” seseorang atau jamaah yang memperjuangkan Islam. Sebab, orang Mukmin itu bukanlah tukang cela dan pelaknat. Meskipun demikian, kita harus membedakan kasus perkasus. Jika menyangkut sikap dan tindakan, Hamis memiliki hak untuk menjelaskan kesalahan dan mengingatkannya serta berusaha menjelaskan kebenaran dan membahasnya secara objektif. Sebab, hikmah itu milik orang Mukmin yang hilang, di mana saja ditemukan, maka dialah yang paling berhak.

*Allah tidak menyukai ucapan burruk (yang diucapkan) dengan terus terang, kecuali (ucapan tersebut dilontarkan) oleh orang yang terzalimi. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jika kamu melahirkan suatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan (orang lain), sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Mahakuasa. (QS An-Nisa’[4]: 148-149)*

## GERAKAN GERAKAN NASIONAL DI PALESTINA

### *Pasal Keduapuluh Lima*

Kami menghormatinya, memakluminya dalam berbagai kondisi dan faktor yang mengitari dan memengaruhinya. Mendukungnya selama gerakan-gerakan nasionalis itu tidak memberikan *wala'*-nya kepada timur komunis atau kepada barat salibis. Hamas menegaskan kepada setiap orang yang bergabung dengannya atau bersimpati terhadapnya bahwa Hamas adalah satu gerakan jihad dan akhlak yang jelas konsepsinya terhadap kehidupan dan bersama orang lain. Ia mengancam oportunisme: tidak menginginkan kecuali kebaikan manusia. Hamas berjuang secara mandiri dengan potensi yang dimilikinya.

*Dan persiapkanlah bagi mereka, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi.*  
(QS Al-Anfal [8]: 60)

Hamas respek terhadap orientasi patriotisme yang bekerja di pentas Palestina untuk membebaskan Palestina karena semua itu merupakan dukungan atau bantuan. Semestinya memang demikian, ucapan atau perbuatan, sekarang ataupun yang akan datang. Kita memang harus bersatu, tidak boleh bercerai-berai, melindungi, tidak menindas, dan melakukan usaha yang terpuji, kita harus menutup rapat-rapat pintu yang akan mendatangkan pertentangan sampingan, tidak terpengaruh oleh desas-desus dan isu yang tidak berdasar dengan menyadari hak untuk membela diri.

Setiap yang bertentangan atau yang bertolak belakang dengan pengarahan ini, maka ia adalah kebohongan yang oleh musuh-musuh atau agen-agensya ditujukan untuk mengguncangkan barisan, memecah belah persatuan, dan membuat sibuk dengan persoalan-persoalan sampingan.

*Hai, orang-orang yang beriman. Jika datang kepadamu seorang fasik (dengan membawa berita), periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, sehingga menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.* (QS Al-Hujurat [49]: 6)

### ***Pasal Keduapuluh Enam***

Hamas memandang gerakan-gerakan nasionalis Palestina yang tidak memberikan *wala'* kepada Timur atau Barat dengan pandangan positif. Karena itu, tidak terhalang kemungkinan diadakan dialog yang serius dalam perangkat lokal dan internasional tentang persoalan Palestina, dialog yang objektif yang dapat membuka sejauh mana kesamaan dan perbedaannya dengan kemaslahatan nasional. Semua itu tentu diteropong dengan perspektif Islam.

### **PALESTINE LIBARATION ORGANIZATION (PLO)**

#### ***Pasal Keduapuluh Tujuh***

Palestine Liberation Organization (PLO) adalah gerakan yang paling dekat dengan Hamas. Di dalam keanggotaanya terdapat mungkin seorang ayah, saudara, teman dekat, atau sahabat baik kita. Tanah air kita satu, penderitaan dan nasib kita sama, dan musuh kita adalah musuh bersama. Karena terpengaruh oleh kondisi yang mengitari pembentukan PLO dan suasana kekacauan pemikiran yang melanda dunia Arab akibat *ghazwul fikri* yang terus-menerus memengaruhi dunia Arab semenjak diobrak-abrik oleh orang-orang salib dan diguncang terus oleh orientalis, kolonialis, dan misionaris, maka PLO mengadopsi *fikrah* negara sekuler. Ini jelas menjadi perhitungan Hamas.

Pemikiran sekuler sangat bertentangan dengan *fikrah diniyah*. Sedangkan di atas pemikiran itulah sikap, tindakan, dan pengambilan keputusan dibangun.

Dari sini, dengan tetap menghargai PLO (bisa jadi akan terus mengalami perkembangan) dan tidak mengurangi jasa-jasanya dalam pertarungan Arab-Israel, Hamas menegaskan bahwa tidak mungkin kita mengganti keislaman Palestina sekarang dan yang akan datang dengan mengadopsi pemikiran sekulerisme. Sebab, keislaman Palestina adalah bagian dari agama kita, siapa saja yang meremehkannya maka ia akan merugi.

*Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri... (QS Al-Baqarah [2]: 130)*

## **NEGARA DAN PEMERINTAHAN ARAB DAN ISLAM**

### ***Pasal Keduapuluh Delapan***

Penyerbuan Zionis adalah penyerbuan biadab. Untuk mewujudkan tujuannya, Zionis mempergunakan berbagai sarana yang tidak berperikemanusiaan dan sangat buruk. Dalam operasi-operasinya sebagian besar mengandalkan operasi intelijen melalui organisasi-organisasi rahasia, seperti *Freemasonry*, *Rotary Club*, dan *Lions Club*, dan kelompok-kelompok intelijen lainnya. Semua organisasi rahasia atau yang terang-terangan bekerja untuk kepentingan zionis dan mendapat pengarahan dari Zionis. Operasi-operasi yang dilakukannya diarahkan untuk mengacaukan masyarakat, merusak nilai-nilai, menghancurkan kendali, merosotkan akhlak, dan menghapus Islam. Zionis berada di belakang perdagangan obat bisu dan semacamnya demi memudahkan dan memperluas kekuasaannya.

Negara Arab di sekitar Israel diminta Hamas membuka perbatasannya untuk para mujahidin dari negara-negara Arab dan Islam yang ingin menunaikan tugas dan peran mereka, serta bergabung dengan saudara-saudara mereka dari Ikhwanul Muslimin Palestina.

Tidak lupa Hamas mengingatkan kepada setiap Muslim bahwa orang-orang Yahudi, ketika berhasil menduduki Al-Quds pada tahun 1967, berdiri di halaman Masjid Al-Aqsha seraya berkata, "*Muhammad meninggal di belakang wanita.*"

Dengan demikian, Israel dengan keyahudiannya menentang Islam dan kaum Muslim. "*Semoga mata para pengecut tidak dapat tidur.*"

## **PERKUMPULAN NASIONALIS DAN AGAMA, YAYASAN, PARA INTELEKTUAL, DUNIA ARAB DAN DUNIA ISLAM**

### ***Pasal Keduapuluh sembilan***

Hamas mengharap agar kelompok-kelompok tersebut sepihak, mendukung kegiatan dan pergerakan, memperkuat sikap, dan berusaha mencari dukungan agar bangsa-bangsa Islam menjadi pendukung strategis cita-cita perjuangan Hamas pada semua peringkat kemanusiaan. Karena itu, Hamas meminta dukungan

materi, media massa, dan sebagainya melalui berbagai penyelenggaraan berbagai konferensi solidaritas, penerbitan brosur, makalah, buku-buku kecil yang terprogram, penjelasan kepada masyarakat, tentang keadaan Palestina sebenarnya dan memobilisasi bangsa-bangsa Islam dalam bentuk pemikiran, pendidikan, dan kebudayaan, agar Hamas dapat mengambil perannya dalam pertarungan yang menentukan melawan kaum Zionis sebagaimana pernah mereka perankan dalam pengusiran kaum Salib dan Tartar: serta penyelamatan peradaban manusia. Semua itu tidaklah sukar bagi Allah.

*Allah telah menetapkan,"aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang."Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa. (QS Al-Mujadilah [58]: 21).*

### ***Pasal Ketigapuluh***

Para sastrawan, ilmuwan, tokoh-tokoh pers, khatib, tokoh pembinaan dan pendidikan, dan semua pihak dalam berbagai kalangan di Dunia Arab dan Islam diimbau agar melaksanakan peran dan kewajibannya mengingat kejam dan kejinya serangan yang dilancarkan oleh kaum Zionis dan ekspansinya ke banyak negara serta kekuasaannya kepada materi dan media massa.

Jihad tidak terbatas pada komando senjata dan menumbangkan musuh. Kalimat yang baik, makalah yang menarik, buku yang bermanfaat, dukungan dan bantuan semuanya, jika diniatkan untuk menegakkan dan meninggikan panji Allah, adalah termasuk *jihad fi sabilillah*.

*"Siapa saja yang mempersiapkan seseorang yang berperan di jalan Allah, maka dia (sama seperti orang yang) telah berperang dan siapa saja yang menggantikan seseorang yang berperang (di jalan Allah) dalam mengurus kekurangan dan keluarganya dengan baik maka dia telah berperang"* (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi).

**PARA PEMELUK AGAMA LAIN:  
HAMAS GERAKAN KEMANUSIAAN**

***Pasal Ketigapuluh Satu***

Hamis adalah satu gerakan kemanusiaan yang melindungi hak-hak asasi manusia dan berpegang teguh kepada toleransi Islam dalam memandang pemeluk agama-agama lain, kecuali mereka yang menyatakan dan melakukan permusuhan terhadap Hamas dan menghalangi gerakannya, atau merongrong perjuangannya.

Dalam Islam, para pemeluk ketiga agama samawi, Islam, Nasrani, dan Yahudi, dapat hidup berdampingan dengan penuh aman dan damai. Keamanan dan kedamaian ini tidak mungkin didapatkan kecuali di bawah naungan Islam. Sejarah masa kini atau masa lampau membuktikan kenyataan ini.

Karena itu, para pemeluk agama-agama lain hendaknya menahan diri dari merintangi, menentang, dan memusuhi ekspansi Islam di wilayah ini (Palestina). Sebab, jika orang Yahudi yang berkuasa di negeri ini, yang akan terjadi hanyalah pembunuhan, penyiksaan, dan pengusiran. Bahkan sesama mereka sendiri pun terjadi saling memangsa, apalagi terhadap pemeluk agama lain selain yahudi. Sejarah telah membuktikan semua itu.

*Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu padu padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. (QS Al-Hasyr [59]:14)*

Islam memberikan hak kepada setiap orang yang memilikinya dan melarang perampasan hak orang lain. Praktik-praktik Zionisme yang keji dan kejam dalam menindas bangsa kami tidak akan berumur panjang karena negara kezaliman hanya berusia sesaat, tetapi negara kebenaran akan berusia panjang sampai hari kiamat.

*“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir*

*kamu dari negeri ini. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS Al-Mumtahanah [60]: 8)*

## **UPAYA PENGUCILAN BANGSA PALESTINA**

### ***Pasal Ketigapuluh Dua***

Zionisme internasional dan kekuatan-kekuatan kolonial berusaha secara licik dan sistematis untuk mendepak negara-negara Arab satu demi satu dari gelanggang pertarungan melawan Zionisme. Tujuan akhir dari upaya ini adalah mengucilkan bangsa Palestina. Mesir, melalui perjanjian pengkhianatan Camp David, telah terdepak jauh dari kancah pertarungan. Negara-negara Islam lainnya juga sedang digiring untuk membuat perjanjian serupa agar terpisah dari pertarungan.

Hamis menghimbau bangsa-bangsa Arab dan Islam agar berusaha serius dan terus menerus untuk menggagalkan rencana dan program yang sangat berbahaya tersebut. Menyadarkan masyarakat bahwa meninggalkan pertarungan melawan Zionisme adalah bahaya besar. Hari ini Palestina, esok lusa mungkin negara anda.

Rencana Zionis ini tidak mengenal batas. Setelah Palestina, mereka berambisi melakukan ekspansi dari Nil sampai Eufrat. Setiap kali berhasil mencaplok satu wilayah, mereka segera berusaha melakukan ekspansi ke negara lain. Rencana-rencana mereka tertuang dalam ”protokolat zionisme” dan realitas mereka pada masa sekarang merupakan bukti jelas terhadap apa yang kami katakan.

Meninggalkan pertarungan Zionis adalah pengkhianatan terbesar yang patut mendapat kutukan.

*Siapa saja yang mundur dari menghadapi mereka di hari itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya adalah neraka jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya. (QS Al-Anfal [8]: 16)*

Segala kekuatan dan potensi harus dihimpun untuk menghadapi sebulan licik dan kejam tersebut. Jika tidak, kita akan kehilangan tanah air, diusir, kerusakan akan tersebar di bumi, serta semua nilai agama akan dihancurkan. Hendaklah setiap orang menyadari bahwa dirinya akan ditanya di hadapan Allah.

*Siapa saja yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. (QS Az-Zalzalah [99]: 7-8)*

Dalam pertarungan melawan Zionisme internasional, Hamas hanya merupakan ujung tombak atau klangkah awal perjalanan bersama aktivis lainnya di Palestina. Karena itu, ia harus dilanjutkan dengan langkah-langkah lain dari bangsa-bangsa Arab dan Islam serta dari perkumpulan-perkumpulan Islam yang ada di Dunia Arab dan Islam. Mereka harus siap menghadapi serangan-serangan Yahudi berikutnya.

*...Kami telah menimbulkan permusuhan dan kebencian kepada mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berbuat kerusakan di bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS Al-Ma'idah [5]: 64)*

### ***Pasal Ketigapuluh Tiga***

Hamas berangkat dari pemahaman-pemahaman umum yang selaras dan sejalan dengan *sunnah kauniyah* dan berjuang di lembah takdir menghadapi para musuh untuk membela manusia Muslim, peradaban Islam, dan tempat-tempat suci Islam, khususnya Masjid Al-Aqsha, memperingatkan bangsa-bangsa Arab dan Islam seluruh pemerintahannya, perkumpulan-perkumpulannya yang formal dan non-formal agar dalam memandang Hamas dan bersikap terhadapnya tetap takut kepada Allah.

Hendaknya mereka sebagaimana dikehendaki Allah menjadi dukungan dan sandaran yang senantias memberikan bantuan kepadanya sampai tiba keputusan Allah. Hendaknya barisannya didukung barisan-barisan yang lain. Hendaknya semua pihak di seluruh dunia Islam bergerak menyambut seruan

kewajiban mengumandangkan panggilan jihad ke segenap penjuru sampai tercapai pembebasan dan tiba pertolongan Allah dan musuh terusir.

*Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa. (QS Al-Hajj [22]: 40)*

**BAB KELIMA**  
**KESAKSIAN SEJARAH**  
**MENGHADAPI PENINDASAN SEPANJANG SEJARAH**  
*Pasal Ketigapuluh Empat*

Palestina adalah pusat bola bumi, titik pertemuan semua benua dan sasaran bagi semua pihak semenjak dahulu kala sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadisnya yang disampaikan kepada Muadz bin Jabal:

*“Wahai Muadz, sesungguhnya Allah akan menaklukan Syam untuk kalian pada abad sesudahnya dari Arisy sampai ke Furad. Para penduduknya, laki-laki, wanita atau para budak, bersiap siaga sampai hari kiamat. Siapa saja di antara kamu memilih (bertempat tinggal) di salah satu pantai Syam atau Baitulmaqdis, berarti dia dalam keadaan jihad terus-menerus sampai hari kiamat.”*

Palestina telah berkali-kali menjadi ajang perebutan dari orang-orang serakah. Kemudian salib datang ke Palestina seraya membawa ideologi mereka hingga berhasil mengusir kaum Muslim selama beberapa masa. Kaum Muslim tidak dapat merebutnya kembali, kecuali setelah mereka berjuang di bawah panji Islam seraya bertakbir kepada Allah dan berjihad di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi selama hampir dua dekade. Akhirnya, mereka berhasil memperoleh kemenangan, mengusir kaum Salib dan membebaskan Palestina.

*Katakanlah kepada orang-orang kafir bahwa kamu pasti akan dikalahkan (di dunia) dan akan digiring ke Neraka Jahanam. Dan itulah tempat seburuk-buruknya. (QS Ali ‘Imran [3]: 12)*

Inilah satu-satunya jalan dan cara membebaskan Palestina. Kenyataan ini, selain merupakan kesaksian sejarah yang tidak terbantahkan, juga merupakan salah satu *sunnah kauniyah* dan hukum kehidupan. BESI tidak dapat dikalahkan

kecuali dengan besi. Akidah mereka yang palsu dan batil tidak akan dikalahkan kecuali dengan akidah Islam yang benar. Akidah tidak dapat diruntuhkan kecuali dengan akidah. Pada akhirnya, kemenangan akan berpihak kepada kebenaran.

*dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba yang menjadi Rasul, (yaitu) sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya mereka itulah yang mendapat pertolongan. (QS Ash-Shaffat [37]: 171-172)*

### ***Pasal Ketigapuluh Lima***

Hamis memandang kekalahan kaum Salib di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dan pembebasan Palestina, kekalahan kaum Tartar Ain Jalut di bawah tangan Qut Khusy dan Zahir Bibrasy, dan penyelamatan dunia Arab dari serbuan Tartar yang menghancurkan segala bentuk peradaban manusia merupakan pelajaran yang sangat berharga. Serangan Zionisme sekarang merupakan kelanjutan Perang Salib. Seperti halnya kaum Muslim berperang menghadapi berbagai serangan tersebut dan berhasil mengalahkannya, maka kaum Muslim sekarang pun harus menghadapi Zionis dan mengalahkannya. Semua itu tidaklah sulit bagi Allah asalkan kaum Muslim mengikhlaskan niatnya, memiliki kemauan keras mempelajari pengalaman masa lalu, membersihkan dari pengaruh-pengaruh *ghazwul fikri*, dan mengikuti sunnah para pendahulu.

## **PENUTUP**

### **HAMAS ADALAH TENTARA-TENTARA ALLAH**

#### ***Pasal Ketigapuluh Enam***

Hamis sejak awal telah berkali-kali menegaskan kepada segenap bangsa Palestina dan juga kepada bangsa-bangsa Arab dan Islam di seluruh dunia bahwa Hamis tidak bermaksud mengejar popularitas pribadi, keuntungan materi, dan status sosial. Hamis tidak bermaksud menentang salah seorang anak bangsa kami, baik sebagai saingan maupun berusaha merebut kedudukannya. Tidak juga akan menentang salah seorang dari kaum Muslim atau orang-orang non-Muslim yang menginginkan kedamaian di tempat ini. Gerakan ini tidak lain hanyalah

merupakan bantuan dan dukungan bagi setiap perkumpulan dan organisasi yang berjuang melawn Zionisme dan sekutu-sekutunya.

Hamas menjadikan Islam sebagai *manhaj* kehidupan. Islam sebagai akidah dan agamanya. Siapa saja yang telah menjadikan Islam sebagai *manhaj* kehidupannya di mana saja ia berada baik sebagai *tanzhim*, jamaah, organisasi, negara, maupun perkumpulan lainnya, maka Hamas siap menjadi prajuritnya.

Semoga Allah memberikan hidayah kepada kami dan keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak.

*“...Rabbana, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil) dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.”* (QS Al-A’raf [7]: 89)

Akhir doa kami, segala puji hanya milik Allah.

Palestina, 1 Muharram 1409 H/18 Agustus 1988

Sumber: Khaled Hroub, *Hamas: Political Thought and Practice* (Washington DC: Institute of Palestine Studies, 2000), hh.267-291.

## **LAMPIRAN 2**

### **Declaration of Principles On Interim Self-Government Arrangements (September 13, 1993)**

The Government of the state of Israel and the P.L.O. team (in the Jordanian-Palestinian delegation to the Middle East Peace Conference) (the “Palestinian Delegation”), representing the Palestinian people, agree that it is time to put an end to a decade of confrontation and conflict, recognize their mutual legitimate and political rights, and strive to live in peaceful coexistence and mutual dignity and security and achieve a just, lasting and comprehensive peace settlement and historic reconciliation through the agreed process. Accordingly, the two sides agree to the following principles.

#### **ARTICLE I AIM OF THE NEGOTIATIONS**

The aim of the Israeli-Palestinian negotiations within the current Middle East peace process is, among other things, to establish a Palestinian Interim Self-Government Authority, the elected Council (the “Council”), for the Palestinian people in the West Bank and the Gaza Strip, for a transitional period not exceeding five years, leading to a permanent settlement based on Security Council Resolutions 242 and 338.

It is understood that the interim arrangements are an integral part of the whole peace process and that the negotiations on the permanent status will lead to implementation of Security Council Resolutions 242 dan 338.

#### **ARTICLE II FRAMEWORK FOR THE INTERIM PERIOD**

The agreed framework for the interim period is set forth in this Declaration of Principles.

#### **ARTICLE III ELECTIONS**

1. In order that the Palestinian people in the West Bank and Gaza Strip may govern themselves according to democratic principles, direct, free and general political elections will be held for the Council under agreed

supervision and international observation, while the Palestinian police will ensure public order.

2. An agreement will be concluded on the exact mode and conditions of the elections in accordance with the protocol attached as Annex I, with the goal of holding the elections not later than nine months after the entry into force of this Declaration of Principles.
3. These elections will constitute a significant interim preparatory step toward the realization of the legitimate rights of the Palestinian people and their just requirements.

#### **ARTICLE IV** **JURISDICTION**

Jurisdiction of the Council will cover West Bank and Gaza Strip territory, except for issues that will be negotiated in the permanent status negotiations. The two sides view the West Bank and the Gaza Strip a single territorial unit, whose integrity will be preserved during the interim period.

#### **ARTICLE V** **TRANSITIONAL PERIOD AND PERMANENT STATUS NEGOTIATIONS**

1. The five-year transitional period will begin upon the withdrawal from the Gaza strip and Jericho area.
2. Permanent status negotiations will commence as soon as possible, but not later than the beginning of the third year of the interim period, between the Government of Israel and the Palestinian people representatives.
3. It is understood that these negotiations shall cover remaining issues, including: Jerusalem, refugees, settlements, security arrangements, borders, relations and cooperation with order neighbors, and other issues of common interest
4. The two parties agree that the outcome of the permanent status negotiations should not be prejudiced or preempted by agreements reached for the interim period.

#### **ARTICLE VI** **PREPARATORY TRANSFER OF POWERS AND RESPONSIBILITIES**

1. Upon the entry into force of this Declaration of Principles and the withdrawal from the Gaza Strip and the Jericho area, a transfer of authority from the military government and its Civil Administration to the authorized Palestinians for this task, as detailed here in, will commence. This transfer

of authority will be of a preparatory nature until the inauguration of the Council.

2. Immediately after the entry into force of this Declaration of Principles and the withdrawal from the Gaza Strip and Jericho area, with the view to promoting economic development in the West Bank and Gaza Strip, authority will be transferred to the Palestinians on the following spheres: education and culture, health, social welfare, direct taxation, and tourism. The Palestinian side will commence in building the Palestinian police force, as agreed upon. Pending the inauguration of the Council, the two parties may negotiate the transfer of additional powers and responsibilities, as agreed upon

## **ARTICLE VII**

### **INTERIM AGREEMENT**

1. The Israeli and Palestinian delegations will negotiate an agreement on the interim period (the "Interim Agreement")
2. The Interim Agreement shall specify, among other things, the structure of the council, the number of its members, and the transfer of powers and responsibilities from the Israeli military government and its Civil Administration to the Council. The Interim Agreement shall also specify the Council's executive authority, legislative authority in accordance with Article IX below, and the independent Palestinian judicial organs.
3. The Interim Agreement shall include arrangements, to be implemented upon the inauguration of the Council, for the assumption by the Council of all of the powers and responsibilities transferred previously in accordance with article VI above.
4. In order to enable the Council to promote economic growth, upon its inauguration, the Council will establish, among other things, a Palestinian Electricity Authority, a Gaza Sea Port Authority, a Palestinian Development Bank, a Palestinian Export Promotion Board, a Palestinian Environmental Authority, a Palestinian Land Authority and a Palestinian Water Administration Authority, and any other Authorities agreed upon, in accordance with the interim agreement that will specify their powers and responsibilities.
5. After the inauguration of the Council, the Civil Administration will be dissolved, and the Israeli military government will be withdrawn.

## **ARTICLE VII**

### **PUBLIC ORDER AND SECURITY**

In order to guarantee public order and internal security for the Palestinians of the West Bank and the Gaza Strip, the Council will establish a strong police force, while Israel will continue to carry the responsibility for defending against external threats, as well as the responsibility for overall security of Israelis for the purpose of safeguarding their internal security and public order.

## **ARTICLE IX**

### **LAWS AND MILITARY ORDERS**

1. The Council will be empowered to legislate, in accordance with the Interim Agreement, within all authorities transferred to it.
2. Both parties will review jointly laws and military orders presently in force in remaining spheres.

## **ARTICLE X**

### **JOINT ISRAELI-PALESTINIAN LIAISON COMMITTEE**

in order to provide for a smooth implementation of this Declaration of Principles and any subsequent agreements pertaining to the interim period, upon the entry into force of this Declaration of Principles, a Joint Israeli-Palestinian Liaison Committee will be established in order to deal with issues requiring coordination, other issues of common interest, and disputes.

## **ARTICLE XI**

### **ISRAELI-PALESTINIAN COOPERATION IN ECONOMIC FIELDS**

Recognizing the mutual benefit of cooperation in promoting the development of the West Bank, the Gaza Strip and Israel, upon the entry into force of this Declaration of Principles, an Israeli-Palestinian Economic Cooperation Committee will be established in order to develop and implement in a cooperative manner the programs identified in the protocols attached as Annex III and Annex IV.

## **ARTICLE XII**

### **LIAISON AND COOPERATION WITH JORDAN AND EGYPT**

The two parties will invite the Governments of Jordan and Egypt to participate in establishing further liaison and cooperation arrangements between the Government of Israel and the Palestinian representatives, on the one hand, and the

Governments of Jordan and Egypt, on the other hand, to promote cooperation between them.. These arrangements will include the constitution of a Continuing Committee that will decide by agreement on the modalities of admission of persons displaced from the West Bank and Gaza Strip in 1967, together with necessary measures to prevent disruption and disorder.. Other matters of common concern will be dealt with by this Committee.

### **ARTICLE XIII**

**REDEPLOYMENT OF ISRAELI FORCES** After the entry into force of this Declaration of Principles, and not later than the eve of elections for the Council, a redeployment of Israeli military forces in the West Bank and the Gaza Strip will take place, in addition to withdrawal of Israeli forces carried out in accordance with Article XIV.

1. In redeploying its military forces, Israel will be guided by the principle that its military forces should be redeployed outside populated areas. Further redeployments to specified locations will be gradually implemented commensurate with the assumption of responsibility for public order and internal security by the Palestinian police force pursuant to Article VIII above.

### **ARTICLE XIV**

#### **ISRAELI WITHDRAWAL FROM THE GAZA STRIP AND JERICHO**

**AREA** Israel will withdraw from the Gaza Strip and Jericho area, as detailed in the protocol attached as Annex II.

### **ARTICLE XV**

#### **RESOLUTION OF DISPUTES**

1. Disputes arising out of the application or interpretation of this Declaration of Principles. or any subsequent agreements pertaining to the interim period, shall be resolved by negotiations through the Joint Liaison Committee to be established pursuant to Article X above. Disputes which cannot be settled by negotiations may be resolved by a mechanism of conciliation to be agreed upon by the parties.
2. The parties may agree to submit to arbitration disputes relating to the interim period, which cannot be settled through conciliation. To this end, upon the agreement of both parties, the parties will establish an Arbitration Committee.

## **ARTICLE XVI**

### **ISRAELI-PALESTINIAN COOPERATION CONCERNING REGIONAL**

Both parties view the multilateral working groups as an appropriate instrument for promoting a "Marshall Plan", the regional programs and other programs, including special programs for the West Bank and Gaza Strip, as indicated in the protocol attached as Annex IV .

## **ARTICLE XVII**

### **MISCELLANEOUS PROVISIONS**

1. This Declaration of Principles will enter into force one month after its signing.
2. All protocols annexed to this Declaration of Principles and Agreed Minutes pertaining thereto shall be regarded as an integral part hereof.

Done at Washington, DC, this thirteenth day of September, 1993.

For the Government of Israel For the PLO

Witnessed By:

The United States of America

The Russian Federation

## **ANNEX I**

### **PROTOCOL ON THE MODE AND CONDITIONS OF ELECTIONS**

1. Palestinians of Jerusalem who live there will have the right to participate in the election process, according to an agreement between the two sides.
2. In addition, the election agreement should cover, among other things, the following issues:
  - a. the system of elections;
  - b. the mode of the agreed supervision and international observation and their personal composition; and
  - c. rules and regulations regarding election campaign, including agreed arrangements for the organizing of mass media, and the possibility of licensing a broadcasting and TV station.
3. The future status of displaced Palestinians who were registered on 4th June 1967 will not be prejudiced because they are unable to participate in the election process due to practical reasons.

## **ANNEX II**

### **PROTOCOL ON WITHDRAWAL OF ISRAELI FORCES FROM THE GAZA STRIP AND JERICHO AREA**

1. The two sides will conclude and sign within two months from the date of entry into force of this Declaration of Principles, an agreement on the withdrawal of Israeli military forces from the Gaza Strip and Jericho area. This agreement will include comprehensive arrangements to apply in the Gaza Strip and the Jericho area subsequent to the Israeli withdrawal.
2. Israel will implement an accelerated and scheduled withdrawal of Israeli military forces from the Gaza Strip and Jericho area, beginning immediately with the signing of the agreement on the Gaza Strip and Jericho area and to be completed within a period not exceeding four months after the signing of this agreement.
3. The above agreement will include, among other things:
  - a. Arrangements for a smooth and peaceful transfer of authority from the Israeli military government and its Civil Administration to the Palestinian representatives.
  - b. Structure, powers and responsibilities of the Palestinian authority in these areas, except: external security, settlements, Israelis, foreign relations, and other mutually agreed matters.
  - c. Arrangements for the assumption of internal security and public order by the Palestinian police force consisting of police officers recruited locally and from abroad holding Jordanian passports and Palestinian documents issued by Egypt). Those who will participate in the Palestinian police force coming from abroad

should be trained as police and police officers. Mereka yang akan berpartisipasi di kepolisian Palestina yang datang dari luar negeri harus dilatih sebagai petugas polisi dan polisi.

- d. A temporary international or foreign presence, as agreed upon.
  - e. Establishment of a joint Palestinian-Israeli Coordination and Cooperation Committee for mutual security purposes.
  - f. An economic development and stabilization program, including the establishment of an Emergency Fund, to encourage foreign investment, and financial and economic support. Both sides will coordinate and cooperate jointly and unilaterally with regional and international parties to support these aims.
  - g. Arrangements for a safe passage for persons and transportation between the Gaza Strip and Jericho area.
4. The above agreement will include arrangements for coordination between both parties regarding passages:
    - a. Gaza - Egypt; and
    - b. Jericho - Jordan. ,.
  5. The offices responsible for carrying out the powers and responsibilities of the Palestinian authority under this Annex II and Article VI of the Declaration of Principles will be located in the Gaza Strip and in the Jericho area pending the inauguration of the Council.
  6. Other than these agreed arrangements, the status of the Gaza Strip and Jericho area will continue to be an integral part of the West Bank and Gaza Strip, and will not be changed in the interim period.

### **ANNEX III**

#### **PROTOCOL ON ISRAELI-PALESTINIAN COOPERATION IN ECONOMIC AND DEVELOPMENT**

The two sides agree to establish an Israeli-Palestinian continuing Committee for Economic Cooperation, focusing, among other things, on the following:

1. Cooperation in the field of water, including a Water Development Program prepared by experts from both sides, which will also specify the mode of cooperation in the management of water resources in the West Bank and Gaza Strip, and will include proposals for studies and plans on water rights of each party, as well as on the equitable utilization of joint water resources for implementation in and beyond the interim period.
2. Cooperation in the field of electricity, including an Electricity Development Program, which will also specify the mode of cooperation for the production, maintenance, purchase and sale of electricity resources.

3. Cooperation in the field of energy, including an Energy Development Program, which will provide for the exploitation of oil and gas for industrial purposes, particularly in the Gaza Strip and in the Negev, and will encourage further joint exploitation of other energy resources. This Program may also provide for the construction of a Petrochemical industrial complex in the Gaza Strip and the construction of oil and gas pipelines.
4. Cooperation in the field of finance, including a Financial Development and Action Program for the encouragement of international investment in the West Bank and the Gaza Strip, and in Israel, as well as the establishment of a Palestinian Development Bank.
5. Cooperation in the field of transport and communications, including a Program, which will define guidelines for the establishment of a Gaza Sea Port Area, and will provide for the establishing of transport and communications lines to and from the West Bank and the Gaza Strip to Israel and to other countries. In addition, this Program will provide for carrying out the necessary construction of roads, railways, communications lines, etc.
6. Cooperation in the field of trade, including studies, and Trade Promotion Programs, which will encourage local, regional and inter-regional trade, as well as a feasibility study of creating free trade zones in the Gaza Strip and in Israel, mutual access to these zones, and cooperation in other areas related to trade and commerce.
7. Cooperation in the field of industry, including Industrial Development Programs, which will provide for the establishment of joint Israeli-Palestinian Industrial Research and Development Centers, will promote Palestinian-Israeli joint ventures, and provide guidelines for cooperation in the textile, food, pharmaceutical, electronics, diamonds, computer and science-based industries.
8. A program for cooperation in, and regulation of, labor relations and cooperation in social welfare issues.
9. A Human Resources Development and Cooperation Plan, providing for joint Israeli-Palestinian workshops and seminars, and for the establishment of joint vocational training centers, research institutes and data banks.
10. An Environmental Protection Plan, providing for joint and/or coordinated measures in this sphere.
11. A program for developing coordination and cooperation in the field of communication and media.
12. Any other programs of mutual interest.

## ANNEX IV

### PROTOCOL ON ISRAELI-PALESTINIAN COOPERATION CONCERNING REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS

1. The two sides will cooperate in the context of the multilateral peace efforts in promoting a Development Program for the region, including the West Bank and the Gaza Strip, to be initiated by the G-7. The parties will request the G-7 to seek the participation in this program of other interested states, such as members of the Organisation for Economic Cooperation and Development, regional Arab states and institutions, as well as members of the private sector.
2. The Development Program will consist of two elements:
  - a. An Economic Development Program for the 'West Bank and the Gaza Strip.
  - B. A Regional Economic Development Program.
  - C. The Economic Development Program for the West Bank and the Gaza strip will consist of the following elements:
    1. A Social Rehabilitation Program, including a Housing and Construction Program.
    2. A Small and Medium Business Development Plan.
    3. An Infrastructure Development Program (water, electricity, transportation and communications, etc.)
    4. A Human Resources Plan.
    5. Other programs.
  - D. The Regional Economic Development Program may consist of the following elements:
    1. The establishment of a Middle East Development Fund, as a first step, and a Middle East Development Bank, as a second step.
    2. The development of a joint Israeli-Palestinian-Jordanian Plan for coordinated exploitation of the Dead Sea area.
    3. The Mediterranean Sea (Gaza) - Dead Sea Canal.
    4. Regional Desalinization and other water development projects.
    5. A regional plan for agricultural development, including a coordinated regional effort for the prevention of desertification.
    6. Interconnection of electricity grids.
    7. Regional cooperation for the transfer, distribution and industrial exploitation of gas, oil and other energy resources.

8. A Regional Tourism, Transportation and Telecommunications Development Plan.
3. Regional cooperation in other spheres. The two sides will encourage the multilateral working groups, and will coordinate towards their success. The two parties will encourage intersessional activities, as well as pre-feasibility and feasibility studies, within the various multilateral working groups.

## **AGREED MINUTES TO THE DECLARATION OF PRINCIPLES ON INTERIM SELF-GOVERNMENT ARRANGEMENTS**

### **A. GENERAL UNDERSTANDINGS AND AGREEMENTS**

Any powers and responsibilities transferred to the Palestinians pursuant to the Declaration of Principles prior to the inauguration of the Council will be subject to the same principles pertaining to Article IV, as set out in these Agreed Minutes below.

### **B. SPECIFIC UNDERSTANDINGS AND AGREEMENTS**

#### **Article IV**

It is understood that:

1. Jurisdiction of the Council will cover West Bank and Gaza Strip territory, except for issues that will be negotiated in the permanent status negotiations: Jerusalem, settlements, military locations, and Israelis.
2. The Council's jurisdiction will apply with regard to the agreed powers, responsibilities, spheres and authorities transferred to it.

#### **Article VI (2)**

It is agreed that the transfer of authority will be as follows:

1. The Palestinian side will inform the Israeli side of the names of the authorised Palestinians who will assume the powers, authorities and responsibilities that will be transferred to the Palestinians according to the Declaration of Principles in the following fields: education and culture, health, social welfare, direct taxation, tourism, and any other authorities agreed upon.
2. It is understood that the rights and obligations of these offices will not be affected.
3. Each of the spheres described above will continue to enjoy existing budgetary allocations in accordance with arrangements to be mutually agreed upon. These arrangements also will provide for the necessary adjustments required in order to take into account the taxes collected by the direct taxation office.

4. Upon the execution of the Declaration of Principles, the Israeli and Palestinian delegations will immediately commence negotiations on a detailed plan for the transfer of authority on the above offices in accordance with the above understandings.

Article VII (2)

The Interim Agreement will also include arrangements for coordination and cooperation.

Article VII (5)

The withdrawal of the military government will not prevent Israel from exercising the powers and responsibilities not transferred to the Council.

Article VIII

It is understood that the Interim Agreement will include arrangements for cooperation and coordination between the two parties in this regard. It is also agreed that the transfer of powers and responsibilities to the Palestinian police will be accomplished in a phased manner, as agreed in the Interim Agreement.

Article X

It is agreed that, upon the entry into force of the Declaration of Principles, the Israeli and Palestinian delegations will exchange the names of the individuals designated by them as members of the Joint Israeli-Palestinian Liaison Committee.

It is further agreed that each side will have an equal number of members in the Joint Committee. The Joint Committee will reach decisions by agreement. The Joint Committee may add other technicians and experts, as necessary. The Joint Committee will decide on the frequency and place or places of its meetings.

Annex II

It is understood that, subsequent to the Israeli withdrawal, Israel will continue to be responsible for external security, and for internal security and public order of settlements and Israelis. Israeli military forces and civilians may continue to use roads freely within the Gaza Strip and the Jericho area.

Done at Washington, DC, this thirteenth day of September, 1993.

For the Government of Israel

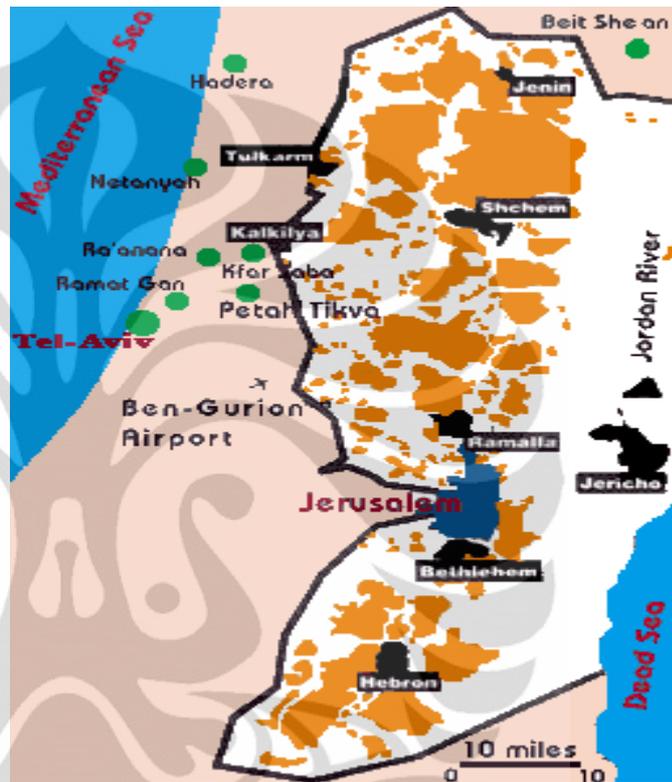
For the PLO

Witnessed By:

The United States of America

### LAMPIRAN 3

#### PETA KESEPAKATAN OSLO I



- Area A: Full Palestinian civil and military control
- Area B: Full Palestinian civil control and joint Israeli-Palestinian military control
- Area C: Full Israeli civil and military control

## LAMPIRAN 4

### PETA KESEPAKATAN OSLO II

